



**ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI JAWA TIMUR**

TESIS

Oleh:

Junaidi S.Pd. 130820201001

**PROGRAM PASCASARJANA
STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI JAWA TIMUR**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi (S2) dan mencapai gelar Sarjana
Magister Ilmu Ekonomi

Oleh:

Junaidi S.Pd. 130820201001

**PROGRAM PASCASARJANA
STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Tesis ini tidak akan mudah dikerjakan bila tanpa ridho, doa, dukungan dan semangat dari mereka, untuk itu terimalah persembahan dari lubuk hati yang paling dalam, ribuan rasa terimakasih yang tulus dan ikhlas, kepada mereka yang selalu ada saat suka dan duka.

Allah SWT

Ini semua adalah karunia dari-Mu

Bapak dan Ibu

Setiap cinta kasih, doa, nasehat, pengertian, perhatian, yang tak henti-hentinya yang diberikan hingga memudahkan langkah demi langkah kehidupan ini, ribuan rasa terimakasih dengan tulus dari lubuk paling dalam dan berusaha menjadi (putra) yang terbaik untukmu.

Seluruh Keluargaku;

Terimakasih setiap doa, nasehat, dukungan, perbedaan pendapat, dan pertengkaran yang menandakan kasih dan sayang, kalian semua adalah anugerah terindah dalam kehidupan ini.

Guru-guruku;

Terimakasih setiap huruf yang diajarkan, setiap pengalaman, waktu luang yang diberikan, semua itu sangat berarti bagiku untuk menjalini masa sekarang dan masa depan.

Teman-temanku;

Terimakasih atas kebersamaan kalian, bantuan kalian, kepercayaan kalian dan segalanya yang telah kalian berikan kepadaku, akan selalu kuingat jasa-jasa kalian dan semoga Allah yang akan membalasnya, karena sebaik-baiknya balasan adalah milik Allah SWT.

Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember
tempatku menimba ilmu yang aku banggakan

MOTTO

" Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya ALLAH beserta orang yang sabar"

(Qs. Al-Baqarah : 153)

" Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka (berusaha) merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"

(Qs. Ar-Ra'd : 11)

" Jangan jadikan pasrah sebagai alasan untuk berputus asa, teruslah berikhtiar dan berdoa"

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Junaidi

Nim : 130820201001

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul: “*Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2015

Yang menyatakan,

Junaidi

NIM 130820201001

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN
/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
Nama Mahasiswa : Junaidi, S.Pd
NIM : 130820201001
Jurusan : Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si
NIP. 197002061994031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Siti Komariyah S.E., M.Si
NIP. 197106102001122002

PENGESAHAN

JUDUL TESIS

**ANALISIS POTENSI EKONOMI KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Junaidi, S.Pd
NIM : 130820201001
Jurusan : Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

..... 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Magister Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji:

1. Ketua : Dr.Moh. Adenan M.M. (.....)
NIP.
2. Anggota : Dr.Siti Komariyah S.E., M.Si. (.....)
NIP. 197106102001122002
3. Anggota : Dr.Zainuri M.Si. (.....)
NIP. 196403251989021001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si.
NIP. 19630614 199002 1 001

ABSTRAK

Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

Oleh : Junaidi

Jurusan Program Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor basis Kabupaten/Kota di masing-masing Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhan ekonomi sektoral yang memiliki nilai kompetitif dan spesialisasi terkait dengan klasifikasi atau tipologi wilayah objek penelitian dengan kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2009-2013. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kuantitatif dengan menggunakan analisis *location quotient*, metode rasio pertumbuhan, *shift-share analysis esteban marquillas*, *klassen tipology*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota disetiap SWP bertipologi daerah tertinggal dan berkembang cepat dengan sektor basisnya adalah pertanian dan jasa-jasa, sedangkan daerah-daerah lainnya merupakan daerah-daerah yang bertipologi maju dan tertekan yang berdasarkan rata-rata berbasis sektor industri dan jasa-jasa.

Kata kunci : potensi ekonomi, sektor ekonomi basis, satuan wilayah pengembangan (SWP).

ABSTRACT

Analysis of the economic potential of the district/city in the province of East Java

Oleh : Junaidi

Jurusan Program Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRACT

This research aims to determine the base sectors of districts / cities in each regional development unit (RDU) in the province of East Java based on the criteria of contribution and sectoral criteria for the economic growth rate which has a competitive value and specialization related to the classification or typology of the object area of research with period of 5 years that is from 2009 to 2013. This research method using descriptive-quantitative analysis method using location quotient analysis, method of growth ratios, shift-share analysis esteban marquillas, Klassen typology. The results of this research indicate that the average district / city in each SWP has typology underdeveloped and rapidly growing sector is the base of agriculture and services, while other areas are areas that have developed typology and depressed that based on average based on industries and services.

Keywords : economic potential, economic sectors base, regional development unit (RDU)

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan Tesis yang berjudul “Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur” yang merupakan syarat akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

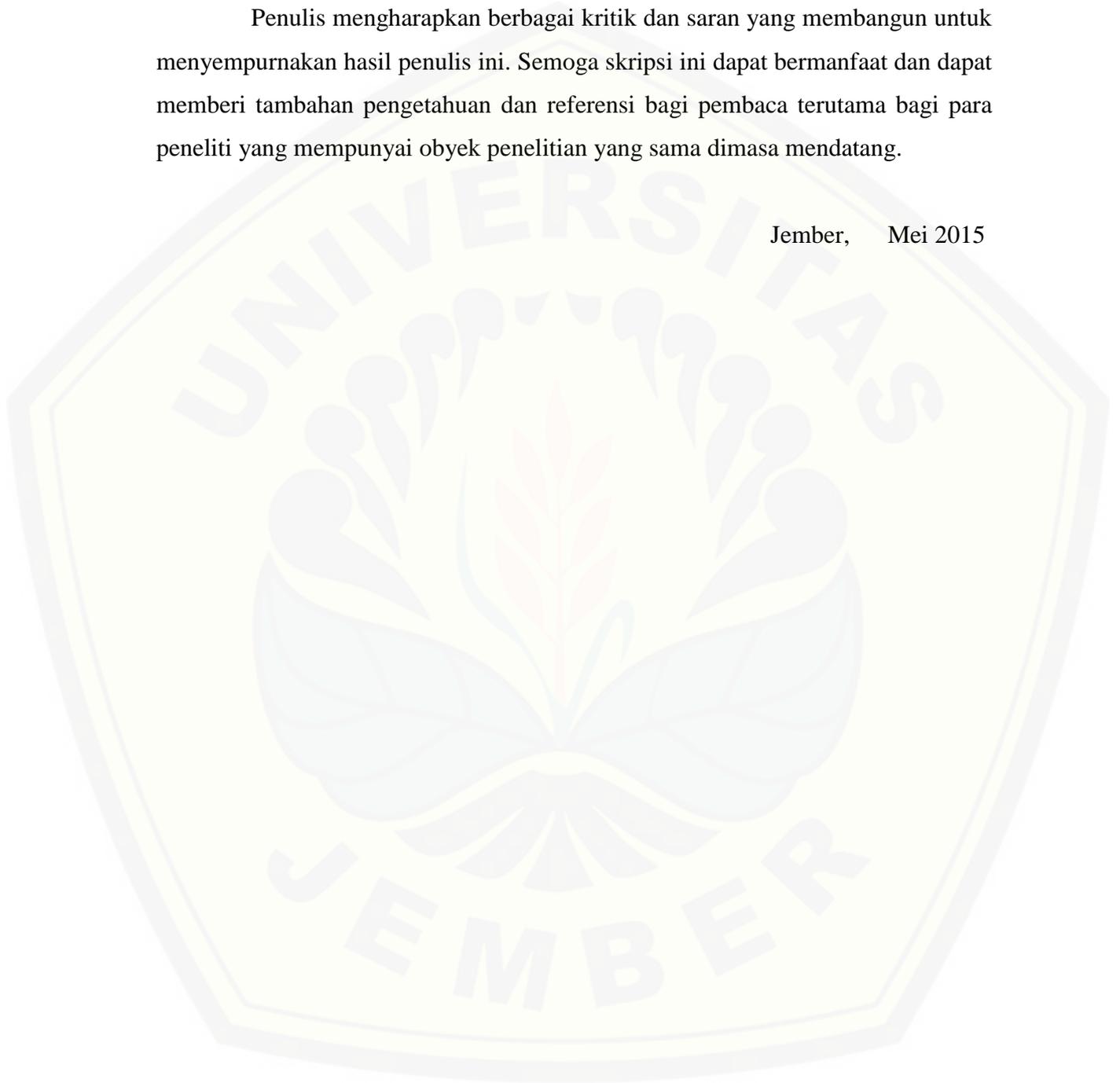
Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin M.Kes dan Bapak Dr. Teguh Hadi Priyono S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan pengarahan selama penyusunan Tesis;
2. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Siti Komariyah, SE, M.Si selaku Ketua Program Magister Studi Ilmu Ekonomi;
4. Ibu dan Bapak Dosen yang memberikan bekal akademik;
5. Seluruh Staf Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang telah banyak membantu;
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Jumarno dan Ibu Suprpti atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, doa dan nasehat yang selalu menyemangati penulis untuk terus maju, bangkit dan berani;
7. Keluarga besar penulis, atas segala bentuk dukungan, doa dan bantuannya pada penulis;
8. Adik penulis, Nur Rahayu Februantika yang selalu menghibur dan menyemangati penulis;
9. Teman-teman penulis dan kakak-kakak tingkat MIE khususnya MbK Aminatus Zahriyah, MbK Echa, MbK Diyah yang selalu menemani penulis sampai saat ini dan telah memberikan warna dalam setiap waktu yang penulis lewati;

10. Semua pihak yang telah membantu memperlancar proses penulisan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan hasil penulis ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pembaca terutama bagi para peneliti yang mempunyai obyek penelitian yang sama dimasa mendatang.

Jember, Mei 2015



DAFTAR ISI

HALAMAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	10
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.2.1 Teori Harrod-Domar Dalam Sistem Regional.....	13
2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang di Sinergikan.....	14
2.1.3 Teori Basis Ekonomi	15
2.1.4 Teori Pertumbuhan Endogen (<i>New Endogenous Growth Theory</i>)	17
2.1.4 Peranan Sektor Potensial Ekonomi dalam Pengembangan Daerah.	21

2.1.5	Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	23
2.2	Penelitian Terdahulu	26
2.3	Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Rancangan Penelitian	41
3.1.1	Jenis Penelitian	41
3.1.2	Unit Analisis	41
3.1.3	Objek Penelitian	41
3.1.4	Jenis dan Sumber Data	41
3.2	Metode Analisis Data	42
3.2.1	Analisis <i>Kuosien</i> Lokasi (LQ)	42
3.2.4	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	44
3.2.5	Analisis <i>Overlay</i>	46
3.2.2	Analisis <i>Shift-Share</i> Modifikasi E-M	47
3.2.3	Analisis <i>Tipologi</i> Daerah/Wilayah (<i>Klassen Typology</i>)	52
3.3	Definisi Operasional	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	55
4.2	Hasil dan Pembahasan	61
4.2.1	Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Jawa Timur	61
4.2.1.1	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	61
4.2.1.2	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	64
4.2.1.3	Analisis <i>overlay</i>	71
4.2.1.4	Analisis <i>Shift-Share</i>	76
4.2.1.5	Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	86
4.2.1.6	Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 1 Jawa Timur .	87
4.2.2	Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Jawa Timur	100
4.2.2.1	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	100

4.2.2.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	101
4.2.2.3 Analisis <i>overlay</i>	103
4.2.2.4 Analisis <i>Shift-Share</i>	105
4.2.2.5 Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	109
4.2.2.6 Pembahasan Kabupaten/Kota Di SWP 2 Jawa Timur..	138
4.2.3 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Jawa Timur	117
4.2.3.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	117
4.2.3.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	118
4.2.3.3 Analisis <i>overlay</i>	121
4.2.3.4 Analisis <i>Shift-Share</i>	124
4.2.3.5 Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	129
4.2.3.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 3 Jawa Timur ..	163
4.2.4 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Jawa Timur	138
4.2.4.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	138
4.2.4.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	140
4.2.4.3 Analisis <i>overlay</i>	142
4.2.4.4 Analisis <i>Shift-Share</i>	145
4.2.4.5 Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	149
4.2.4.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 4 Jawa Timur ..	149
4.2.5 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Jawa Timur	158
4.2.5.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	158
4.2.5.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	160
4.2.5.3 Analisis <i>overlay</i>	162
4.2.5.4 Analisis <i>Shift-Share</i>	163
4.2.5.5 Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	165
4.2.5.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 5 Jawa Timur ..	167

4.2.6	Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Jawa Timur	174
4.2.6.1	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	174
4.2.6.2	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	175
4.2.6.3	Analisis <i>overlay</i>	176
4.2.6.4	Analisis <i>Shift-Share</i>	178
4.2.6.5	Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	181
	4.2.6.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 6 Jawa Timur .	182
4.2.7	Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Jawa Timur	189
4.2.7.1	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	189
4.2.7.2	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	191
4.2.7.3	Analisis <i>overlay</i>	192
4.2.7.4	Analisis <i>Shift-Share</i>	194
4.2.7.5	Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	198
	4.2.7.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 7 Jawa Timur .	198
4.2.8	Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Jawa Timur	207
4.2.8.1	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	207
4.2.8.2	Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)	208
4.2.8.3	Analisis <i>overlay</i>	209
4.2.8.4	Analisis <i>Shift-Share</i>	210
4.2.8.5	Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	212
	4.2.8.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 8 Jawa Timur .	213
	BAB V PENUTUP	218
5.1	Kesimpulan.....	218
5.2	Saran-Saran	220
	DAFTAR PUSTAKA	224
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Matrik Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Sebelumnya.....	29
2.1 Matrik Penelitian Sebelumnya.....	32
3.1 Kemungkinan Efek Alokasi (<i>Shift-Share</i>)	52
3.1 Klasifikasi Daerah Menurut Analisis Tipologi Daerah	53
4.1 Jumlah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2015	56
4.2 Struktur Penduduk Jawa Timur menurut Jenis Kelamin	56
4.3 Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) 2000 JAWA TIMUR Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)	57
4.4 Struktur Perekonomian Jawa Timur (persen), 2009-2013.....	59
4.5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2009-2013.....	60
4.6 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Provinsi Jawa Timur.....	61
4.7 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 1 Provinsi Jawa Timur.....	64
4.8 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 1 Provinsi Jawa Timur..	72
4.9 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 1	77
4.10 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 1	78
4.11 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Industri Pengolahan di SWP 1	79
4.12 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di SWP 1	80
4.13 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Bangunan di SWP 1.....	81
4.14 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 1	82
4.15 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di SWP 1.....	83

4.16	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 1	84
4.17	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 1.....	85
4.18	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP I Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	86
4.19	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	90
4.20	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 1 Jawa Timur	93
4.21	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Jawa Timur	100
4.22	Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur	101
4.23	Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur..	104
4.24	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian Di SWP 2.....	105
4.25	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertambangan dan Penggalan Di SWP 2.....	106
4.26	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Industri Pengolahan Di SWP 2	106
4.27	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	107
4.28	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Bangunan Di SWP 2.....	107
4.29	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Perdagangan, Hotel dan Restrn....	107
4.30	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	108
4.31	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Di SWP 2	108
4.32	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa Di SWP 2.....	108
4.33	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	109

4.34	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	112
4.35	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 2 Jawa Timur.....	113
4.36	Hasil Perhitungan LQ di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Jawa Timur.....	117
4.37	Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 1 Provinsi Jawa Timur	118
4.38	Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 3 Provinsi Jawa Timur..	122
4.39	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 3	124
4.40	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertambangan dan Penggalain untuk SWP 3	124
4.41	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Industri Pengolahan Di SWP 3	125
4.42	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	125
4.43	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk sektor Bangunan Di SWP 3.....	126
4.44	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Di SWP 3	126
4.45	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Di SWP 3	127
4.46	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Di SWP 3	127
4.47	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa Di SWP 3	128
4.48	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 3 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	129
4.49	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	132
4.50	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 3 Jawa Timur	133

4.51	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Jawa Timur	138
4.52	Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di SWP 4	140
4.53	Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 4 Provinsi Jawa Timur..	143
4.54	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 4	145
4.55	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 4	145
4.56	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Industri Pengolahan di SWP 4.....	146
4.57	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	146
4.58	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Bangunan di SWP 4.....	146
4.59	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 4	147
4.60	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di SWP 4.....	147
4.61	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 4	148
4.62	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 4.....	148
4.63	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 4 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013	149
4.64	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	152
4.65	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 4 Jawa Timur.....	153
4.66	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Provinsi Jawa Timur.....	157
4.67	Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di SWP 4	159
4.68	Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 5 Provinsi Jawa Timur...	161
4.69	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 5	162
4.70	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	163
4.71	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Industri Pengolahan di SWP 5.....	163

4.72	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	163
4.73	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Bangunan di SWP 5.....	164
4.74	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rest	164
4.75	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Pengangkutan dan Komunika	164
4.76	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 5.....	165
4.77	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa	165
4.78	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 5 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	166
4.79	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian untuk SWP 3	156
4.80	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	169
4.81	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 5 Jawa Timur.....	170
4.82	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Provinsi Jawa Timur.....	173
4.83	Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 6 Provinsi Jawa Timur	174
4.84	Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 6 Provinsi Jawa Timur...	176
4.85	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 6.....	177
4.86	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 6	178
4.88	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Industri Pengolahan di SWP 6	178
4.89	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	178
4.90	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Bangunan di SWP 6.....	179
4.91	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Perdagangan, Hotel dan Rest	179
4.92	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Pengangkutan dan Komunisi	179
4.93	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuang, Sewa dan Js Perush.....	179

4.94	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 6.....	180
4.95	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 6 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	181
4.96	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	184
4.97	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 6 Jawa Timur	185
4.98	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Jawa Timur	188
4.99	Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Provinsi Jawa Timur	190
4.100	Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 7 Provinsi Jawa Timur..	192
4.101	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 7	193
4.102	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 7	194
4.103	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 7	194
4.104	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	194
4.105	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Bangunan di SWP 7.....	195
4.106	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 7	195
4.107	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pengangkutan dan Penggalian di SWP 7	196
4.108	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 7	196
4.109	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 7.....	196
4.110	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 7 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	197
4.111	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	201

4.112	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 7 Jawa Timur.....	202
4.113	Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Provinsi Jawa Timur.....	206
4.114	Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kab. Banyuwangi ..	207
4.115	Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 8 Jawa Timur	208
4.116	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertanian di SWP 8.....	209
4.117	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 8	209
4.118	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Industri Pengolahan di SWP 8	209
4.119	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Sektor Listrik, Gas, Air Bersih di SWP 8	209
4.120	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Bangunan di SWP 8.....	210
4.121	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 8	210
4.122	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di SWP 8	210
4.123	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 8	211
4.124	Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 8.....	211
4.125	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 8 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013	212
4.126	Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan	214
4.127	Hasil analisis <i>Shift-Share</i> Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 8 Jawa Timur.....	215

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2009-2013.....	2
1.2 Pembagian Wilayah Berdasarkan per SWP di Provinsi Jawa Timur	6
1.3 Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2013	7
2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	42
4.1 Peta Administrasi menurut Kabupaten/Kota dan Luas Area.....	57
4.2 Sektor Unggulan Utama Berdasarkan Analisis <i>Location Quotient</i>	68
4.3 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian.....	123
4.4 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	123
4.5 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Industri Pengolahan	124
4.6 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.....	124
4.7 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Bangunan	125
4.8 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran....	125
4.9 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	126
4.10 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Keungan, Persewaan dan Jasa	126
4.11 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan yang mempunyai keunggulan di Sektor Jasa-jasa.....	127
4.12 Sektor Unggulan Utama Berdasarkan Analisis <i>Location Quotient</i>	129
4.13 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian	144

4.14 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	144
4.15 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 yang mempunyai keunggulan di Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.....	145
4.16 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 yang mempunyai keunggulan di Sektor Jasa-jasa.....	145
4.17 Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Jawa Timur.....	148
4.18 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian.....	173
4.19 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	173
4.20 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 yang mempunyai keunggulan di Sektor Bangunan.....	174
4.21 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 yang mempunyai keunggulan di Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	174
4.22 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 yang mempunyai keunggulan di Sektor Jasa-jasa.....	175
4.23 Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Jawa Timur.....	178
4.24 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian.....	199
4.25 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	200
4.26 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 yang mempunyai keunggulan di Sektor Industri Pengolahan.....	200
4.27 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 yang mempunyai keunggulan di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran....	201
4.28 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 yang mempunyai keunggulan di Sektor Jasa-jasa.....	201

4.29	Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Jawa Timur.....	204
4.30	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian	218
4.31	Kab./Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 yang mempunyai keunggulan di Sektor Keungan, Persewaan dan Jasa perusahaan	218
4.32	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 yang mempunyai keunggulan di Sektor Jasa-jasa.....	219
4.33	Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Jawa Timur.....	221
4.34	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian	233
4.35	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	233
4.36	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 yang mempunyai keunggulan di Sektor Jasa-jasa.....	234
4.37	Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Jawa Timur.....	237
4.38	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian	251
4.39	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	252
4.40	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 yang mempunyai keunggulan di Sektor Jasa-jasa.....	252
4.41	Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Jawa Timur.....	254
4.42	Kabupaten di Satuan Wilayah Pengembangan 8 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian.....	263
4.43	Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 8 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian.....	263

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 PDRB ProVinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan Rupiah)	275
2 PDRB Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan Rupiah)	276
3 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i>	314
4 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), <i>Location Quotient</i> (LQ) dan <i>Overlay</i>	352
5 Hasil Analisis <i>Shift-Share</i> Modifikasi Esteban Marquillas	390
1 Hasil Analisis <i>Tipologi Klassen</i>	428

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

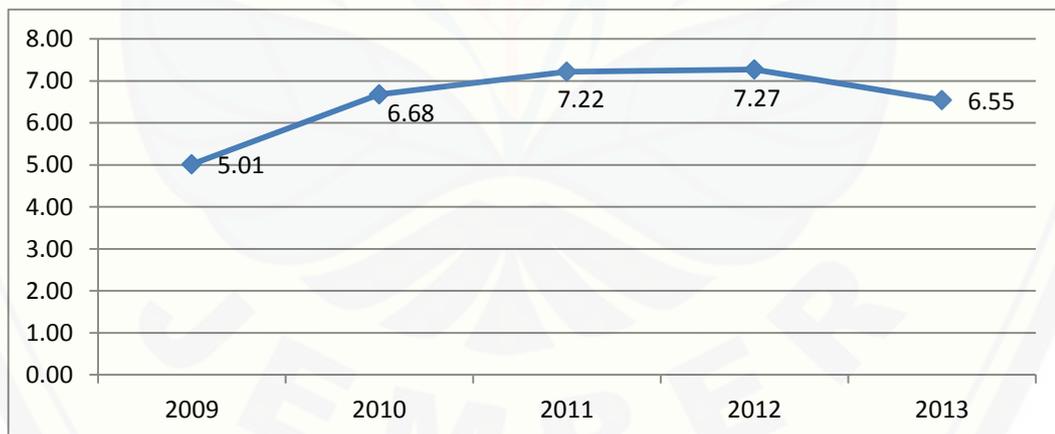
Pembangunan ekonomi daerah yang diimplementasikan melalui pengembangan wilayah yang telah disesuaikan dengan fungsi ekonomi masing-masing satuan wilayah pengembangan Jawa Timur yang dengan tujuan utamanya yakni mencapai kesejahteraan masyarakat, yang menurut (Todaro dan Smith, 2008:35) pembangunan itu merupakan suatu proses menuju perubahan yang diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara menciptakan peluang kerja baru sehingga dapat memberikan kesempatan peluang baru bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola sumberdaya ekonomi untuk menghasilkan pendapatan (*income*).

Menurut teori endogen pertumbuhan ekonomi itu merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi itu sendiri yang berbasis pada SDA dan SDM maupun iptek. Jadi pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan sebagai modal dasar daerah untuk mengelola potensi dan keunggulan ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan wilayah yang disertai dengan dukungan dari pihak pemerintah daerah maupun swasta dalam bentuk memberikan fasilitas dan prasarana yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Pengembangan potensi daerah yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah diharapkan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dengan cara saling mendukung antar sektor satu dengan sektor lainnya (utamanya sektor inti dengan hinterlannya), pengembangan sektor unggulan tersebut hendaknya diarahkan pada upaya untuk menciptakan keterkaitan antar daerah sebagai upaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Keberadaan dari sektor atau subsektor yang memiliki pengaruh (*multiplier effect*) sangat diprioritaskan didalam usaha pembangunan mengingat jumlah penduduk di Jawa Timur dari Tahun ke Tahun

terus mengalami peningkatan, yang pada Tahun 2010 terdapat 37.475,70 jiwa kemudian meningkat pada Tahun 2013 sebanyak 38.363,195 jiwa dengan kepadatan penduduk 7953 jiwa per km², dengan tingkat rata-rata persentase penduduk terhadap penduduk nasional 15%. Dengan jumlah pencari kerja tahun 2013 sebesar 844.174 orang, naik 3.55 % dibanding tahun 2012 (BPS,2014).

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang sedang tumbuh pesat pertumbuhannya yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Jawa Timur selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2011 tercatat Rp. 884,50 triliun dan pada tahun 2013 mencapai 1.136,33 triliun. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, menempatkan Jawa Timur sebagai penopang utama perekonomian Nasional setelah DKI Jakarta. Namun jika kita lihat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun 5 tahun terakhir memperlihatkan *trend* perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,01 persen, berikutnya tahun 2010 tumbuh sebesar 6,68 persen, bahkan tahun 2011 dan 2012 tumbuh diatas 7 persen, tepatnya masing-masing tumbuh 7,22 persen dan 7,27 persen, sedangkan tahun 2013 tumbuh sebesar 6,55 persen, melambat dibanding tahun 2012 yang mencapai 7,27 persen.



Gambar.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Perlambatan itu lebih disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan di sektor pertanian dan industri termasuk perlambatan perdagangan, hotel dan restoran. Dimana sektor tersebut yang mendominasi PDRB Jawa Timur mengalami pertumbuhan 8.61 %, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10.06 persen. Dari total nilai PDRB Jawa Timur, kontribusi terbesar dari sektor

perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp.356,10 triliun (31,34%), diikuti sektor industri pengolahan Rp.302,31 triliun (26,60%), sedangkan kontribusi sektor pertanian sebesar Rp.169,43 triliun (14,91%). Kontribusi terkecil tercatat pada sektor listrik, gas dan air bersih dengan PDRB sebesar Rp.14.60 triliun (1.29%).

Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur merupakan hasil dari tingkat perkembangan pertumbuhan ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah bisa dicapai diantaranya dengan memicu pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*) yang akan mendorong pertumbuhan daerah-daerah sekitarnya dengan harapan akan terjadi penetasan ke bawah (*trickle down effect*) kepada daerah maupun masyarakat luas dalam bentuk lapangan pekerjaan baru maupun kesempatan ekonomi yang lainnya. Sehingga pertumbuhan wilayah dapat berlangsung dengan adanya keterkaitan antar daerah yang kuat, pembangunan ekonomi pada dasarnya saling terkait antar daerah dengan daerah lainnya baik keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) baik dari sisi sektor ekonomi unggulan maupun lokasi aktivitas ekonomi yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan bagi daerah lainnya sebagai hubungan (*partner*) yang menurut (Adisasmita, 2006:253) salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan atau ketimpangan antar daerah yakni melakukan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya maupun dengan berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah.

Maka dalam usaha meningkatkan pendapatan ekonomi daerah difokuskan kepada pembangunan sektor atau subsektor unggulan yang memberikan dampak pengganda yang besar terhadap sektor-sektor lainnya agar dapat memberikan peluang besar terhadap penyerapan tenaga kerja maupun dalam pemerataan pendapatan antar penduduk maupun antar sektor dan daerah karena pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata, justru akan menghambat pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal semakin tertinggal. Hal tersebut menggambarkan bahwa pembangunan daerah secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik, ada beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, dan sebaliknya ada beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat.

Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama di sebabkan oleh kurangnya sumberdaya (teknologi, sdm dan ilmu pengetahuan) yang di miliki, yang menurut teori endogen peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994:6).

Strategi pembangunan daerah yang berlangsung selama ini merupakan gabungan pendekatan sektoral dan pendekatan spasial dalam rangka terwujudnya keberimbangan pembangunan wilayah (Rustiadi, et al., 2009). Pendekatan sektoral lebih difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas sektor ekonomi, sedangkan pendekatan spasial mempertimbangkan aspek keruangan atau lokasi kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan sesuai dengan *resources endowment* yang dimilikinya. Sehingga pengembangan wilayah berkaitan dengan proses berlangsungnya pertumbuhan pembangunan dalam suatu wilayah ditinjau dari segi hubungan struktural (keterkaitan antar sektor) maupun dari segi hubungan fungsional (interaksi antar subsistem dalam suatu wilayah) (Adisasmita, 2008:79).

Dalam peraturan daerah tentang rencana tataruang wilayah (RTRW) yakni membentuk satuan wilayah pengembangan (SWP) yang diantaranya berdasarkan potensi dan permasalahan, serta berdasar kesesuaian fungsi dan peranan masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan potensi dan komoditi andalan. Sehingga akan tercipta kesamaan pandangan, saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar daerah. Berdasarkan RTRW Jawa Timur Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 8 wilayah pengembangan yang didasarkan pada potensi basis ekonomi masing-masing daerah, yang diantaranya yaitu:

1. SWP Germakertosusila Plus dengan pusat di Kota Surabaya meliputi: Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan,

pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri.

2. SWP Malang Raya dengan pusat di Kota Malang meliputi: Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri;
3. SWP Madiun dan sekitarnya dengan pusat di Kota Madiun meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri;
4. SWP Kediri dan sekitarnya dengan pusat di Kota Kediri, meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri.
5. SWP Probolinggo–Lumajang dengan pusat di Kota Probolinggo meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan;
6. SWP Blitar dengan pusat di Kota Blitar meliputi: Kota Blitar dan Kabupaten Blitar dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
7. SWP Jember dan sekitarnya dengan pusat di Perkotaan Jember meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata; dan

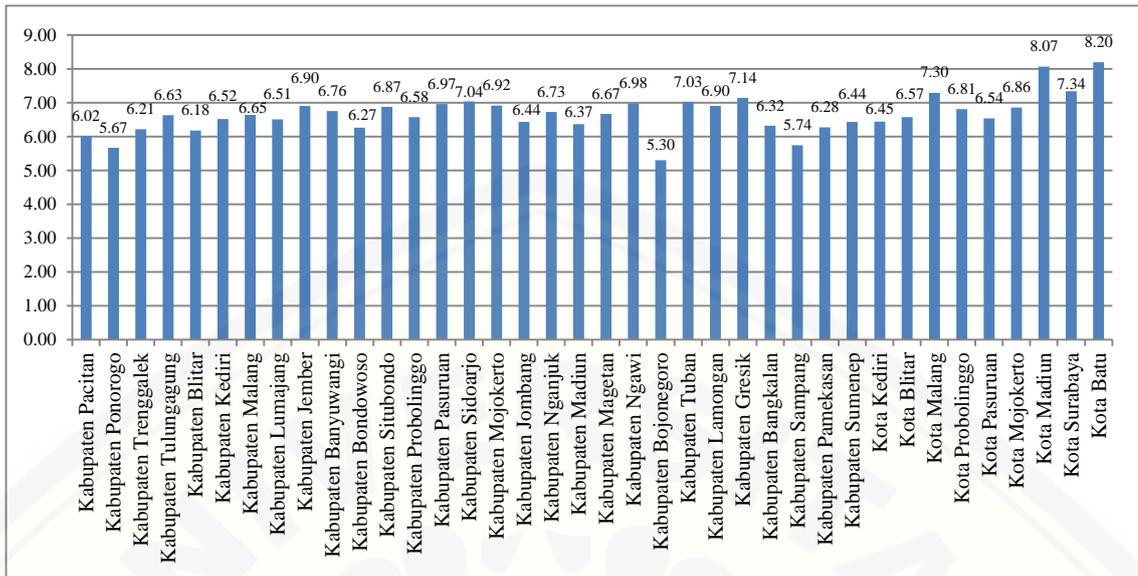
8. SWP Banyuwangi dengan pusat di Perkotaan Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.



Gambar 1.2 Pembagian Wilayah Berdasarkan per SWP di Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.2 menerangkan bahwa setiap daerah mempunyai potensi dan keunggulan ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan wilayah. Untuk menjamin itu dapat berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, maka setiap pemerintah daerah senantiasa berupaya memberikan perhatian dan fasilitas yang memadai sesuai dengan kemampuan dan fungsi ekonomi daerahnya. Sehingga masing-masing daerah akan saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi positif terhadap Jawa Timur.

Seperti yang kita ketahui bahwa pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur merupakan hasil dari tingkat perkembangan ekonomi di tingkat Kabupaten/Kota. Namun jika dicermati pada Kabupaten/Kota tingkat pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh tiap Kabupaten/Kota sangat beragam dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun terdapat juga Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat.



Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2013

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah di Kota Batu yaitu sebesar 8.20% sedangkan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah adalah di Kabupaten Bojonegoro sebesar 5.30%. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari peranan sektor-sektor ekonomi yang berada disetiap daerah. Sehingga disetiap SWP diharapkan adanya kesesuaian dalam fungsi dan peranannya sebagai motor penggerak perekonomian wilayah sekaligus menjadi pendukung bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan wilayah hinterlannya melalui koordinasi dan keterpaduan (*integration district*) agar daerah tertinggal dan belum berkembang dapat mempercepat pertumbuhannya mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah yang telah dan sedang berkembang.

Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah di setiap satuan wilayah pengembangan (SWP), maka pemanfaatan sumber daya akan menjadi kurang optimal, menurut (Subandi, 2011:113) pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan pada daerah (*endogenous*) yang bersangkutan dengan menggunakan potensi SDM, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal/daerah (*endogenous*).

Yang berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom dimana dalam hal penyusunan tata ruang wilayah Provinsi harus berdasarkan keserasian antar wilayah Kabupaten/Kota. Sehingga dengan desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk memajemeni pembangunan menjadi lebih lincah, akurat dan cepat (Yustika, 2013:210). Maka diupayakan agar pembangunan daerah harus merupakan kegiatan mengantisipasi dan mengelola masa depan di tingkat daerah (Stimson,et,al, 2006:45). Sebagaimana peran penting daerah adalah berperan sebagai ujung tombak proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut (Tarigan, 2005:79).

Sehingga dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek maupun Jangka Panjang yang telah memasuki tahap ke 3 yakni 2015-2019 dengan prioritasnya “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek (Kuncoro, 2012:45), Untuk itu perlu langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan dari pemerintah, terutama dalam mengambil kebijakan yang mengarah pada perkembangan sektor-sektor potensial daerah.

Yang menurut (Howard dan Booth, 1997:32) pembangunan tersebut jelas dapat dipacu lebih cepat seandainya pemerintah provinsi (daerah) berupaya lebih keras untuk mengembangkan sumber-sumber penerimaannya sendiri dari pada menyandarkan secara berlebihan pada dana pemerintah pusat. Maka menurut (Nazara, 2010:105) bahwa kinerja pembangunan daerah memang bukan semata-mata hanya disebabkan oleh implementasi anggaran saja. Kinerja pembangunan daerah merupakan yang dihasilkan (*resultant*) dari kinerja seluruh elemen pelaku ekonomi di daerah yang bersangkutan yang dijadikan sebagai modal dasar dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah teruraikan diatas, maka pengkajian perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi sektor ekonomi basis Kabupaten/Kota di masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP) Provinsi Jawa Timur.?
2. Sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah pengembangan (SWP) Jawa Timur.?
3. Bagaimana tipologi Kabupaten/Kota di masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP) Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi basis Kabupaten/Kota di masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP) Provinsi Jawa Timur.?
2. Untuk mengetahui sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi di masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP) Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui tipologi Kabupaten/Kota di masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP) Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi para pemangku pemerintahan:

1. Sumbangan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang terkait dengan ekonomi regional;
2. Bahan informasi bagi pihak berkepentingan yaitu pemerintah dan pihak terkait untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Informasi bagi peneliti lain yang berminat terhadap permasalahan pembangunan ekonomi dan perencanaan daerah;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Salah satu sasaran terpenting dari pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, selain dari aspek pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pemerataan berarti bahwa setiap komponen yang relevan di perekonomian itu memiliki kemampuan untuk mempekerjakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimilikinya (Nazara, 2010:104). Pertumbuhan ekonomi menjadi target pembangunan yang di pandang penting karena di dalamnya secara implisit menunjukkan kinerja ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, jumlah ouput, dan peningkatan pendapatan nasional (Yustika, 2013:180).

Pembangunan ekonomi Jawa Timur pada saat ini sebenarnya tak terlepas dari kemampuannya untuk terus mengelola dan memanfaatkan serta terus mengembangkan potensi-potensi vital ekonomi untuk meningkatkan pendapatan perkapita daerah. Pembangunan ekonomi Jawa Timur selanjutnya diupayakan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek (Kuncoro, 2012:45). Dengan membentuk Wilayah Pengembangan (SWP) yang didasarkan pada hubungan fungsional antar wilayah pengembangan kabupaten/kota Jawa Timur. Sehingga disetiap SWP diharapkan adanya kesesuaian dalam fungsi dan peranannya sebagai motor penggerak perekonomian wilayah sekaligus menjadi pendukung bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan wilayah hinterlannya melalui koordinasi dan keterpaduan (*integration district*) agar daerah tertinggal dan belum berkembang dapat mempercepat pertumbuhannya mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah yang telah dan sedang berkembang.

Menurut (Adisasmita, 2006:253) salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan atau ketimpangan antar daerah yakni melakukan kerjasama antar

daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya maupun dengan berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, yang seyogianya menjadi perhatian dalam pengembangan potensi masing-masing wilayah pengembangan melalui perbaikan pembangunan sektoral yang bertumpu pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan. Untuk mencapai itu semua, diperlukannya suatu kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk mencapai pembanguann yang mantap (*steady*), menurut (Blakely, 1994, p. xv dalam Stimson,et.al, 2006:113) dalam kutipannya yaitu:

Pembangunan ekonomi wilayah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah atau lembaga yang berbasis masyarakat terlibat langsung untuk menstimulasi atau mempertahankan kegiatan usaha dan atau pekerjaan.

Sehingga menurut (Arsyad. L, 1999:298) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola ke-mitraan antara Pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Menurut (Adisasmita, 2005:201) keterpaduan pemerintah dan swasta merupakan mitra yang esensial dalam proses pembangunan ekonomi.

Maka kunci pembangunan ekonomi lokal menurut (Tambunan, 2010:53) adalah membangun jaringan pasar di berbagai sektor potensial dan terpilih, jadi pada umumnya, keberhasilan kemajuan Negara Asia Timur dalam transformasi ekonomi dari ekonomi agris ke industri karena adanya hubungan komplementer antara Pemerintah dan sektor swasta. Hubungan komplementer yang dimaksud adalah memberi peranan yang tepat pada Pemerintah (sesuai dengan peranan terbaik di lakukannya) dan demikian juga peran sektor swasta sehingga untuk menjamin terlaksanya pembangunan daeah secara integral dan menyeluruh maka harus ada keserasian atau keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah dengan dukungan dari pihak pemerintah dan swasta.

Menurut teori pertumbuhan baru (teori endogen), pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal

yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia. Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006:89). Pendapat tersebut dibuktikan oleh Kurniawan dalam penelitiannya pada Tahun 2013 yaitu variabel pendidikan berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pengembangan teori pertumbuhan endogen sekaligus meningkatkan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan manusia, banyak studi empiris yang melihat kaitan antara kualitas SDM dengan pertumbuhan. Denison misalnya, menemukan adanya sumbangan yang besar dari peningkatan years of schooling terhadap pertumbuhan di AS. Barro (1991) serta Mankiw, Romer dan Weil (1992) menyatakan partisipasi pendidikan dan investasi yang cukup besar untuk pendidikan pada tahun 1960-an merupakan faktor yang penting dalam menjelaskan variasi pertumbuhan selama 30 tahun (Priyambodo, 1995:72).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dinamis (ditandai dengan adanya inovasi dan perubahan teknologi) sebagai variabel endogen yang berkembang dan disertai dengan adanya akumulasi modal, perubahan struktur ekonomi, reformasi kelembagaan, diversifikasi output, peningkatan investasi melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada di setiap daerah yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah untuk mencapai tingkat pertumbuhan pembangunan yang sustainable yang ditandai dengan adanya menurunnya angka pengangguran, kemiskinan, serta meningkatnya pendapatan riil sesuai dengan partisipasi mereka.

Dengan kata lain semakin maju perekonomian suatu daerah maka kontribusi sektor primer semakin menurun sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan serta munculnya teknologi-teknologi baru yang membuat sistem produksi menjadi lebih efisien dan efektif, menurut (Todaro, 2000:204) tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup “pergeseran” yang berangsur-angsur dari

aktifitas pertanian ke sektor non-petanian dan dari sektor industri ke jasa. Menurut (Irma dan Erinc, 2000:95) pertumbuhan ekonomi itu terdiri dari lima indikator yaitu pertumbuhan yang mandiri, peningkatan kemajuan teknologi, modernisasi dibidang sosial, politik dan kelembagaan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur dari pencapaian pertumbuhan ekonomi dan merupakan ukuran dari adanya perbaikan sistem kelembagaan.

Sehingga secara garis besar pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur dari suatu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, yang menurut (Subandi, 2011:116) melalui pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Kemudian (Sjafrizal, 2008:28) menambahkan yakni keberhasilan pembangunan dapat digambarkan dari PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan pergeseran struktur ekonomi. Maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2001:64).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.2 Teori Harrod-Domar Dalam Sistem Regional

Teori ini di kembangkan hampir pada waktu bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Diantara mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, di mana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi: a).Perekonomian bersifat tertutup b).Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan, c).Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constan return to scale), d).Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Horrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan yang panjang yang mantap hanya bisa tercapai apabila terpenuhinya syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$g = k = n$$

Keterangan: g = tingkat pertumbuhan output (Growth)

k = tingkat pertumbuhan modal (Capital)

n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Agar terdapat keseimbangan maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi di tentukan oleh (capital output ratio = rasio modal output) (Tarigan, 2005:49). Teori Harrod-Domar setidaknya akan sangat bermanfaat apabila diaplikasikan bagi wilayah yang masih terbelakang dan terpencil. Dalam kondisi seperti ini, biasanya barang modal sangat langka sehingga sulit melakukan konversi antara barang modal dengan tenaga kerja. Untuk wilayah seperti itu, bagi sektor yang hasil produksinya tidak layak atau kurang menguntungkan untuk dieskpor (tingginya biaya angkut atau produk tidak tahan lama) maka peningkatan produksi secara berlebihan mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar lokal dan tingkat harga turun drastis sehingga merugikan produsen. Oleh karena itu, lebih baik mengatur pertumbuhan berbagai sektor secara seimbang. Dengan demikian, pertambahan produksi di satu sektor dapat diserap oleh sektor lain yang tumbuh secara seimbang (Tarigan, 2005:51).

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang di Sinergikan

Samuelson, 1955 dalam Tarigan (2005:54) memperkenalkan teori Pertumbuhan Jalur Cepat (*turnpike*). Teori ini menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) untuk di kembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian yang cukup besar.

Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar yang lebih luas. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Men-sinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung sehingga pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan men-sinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat. Dalam kaitan itu, salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melihat dan mengidentifikasi lapangan usaha atau sektor ekonomi unggulan serta menganalisis perkembangan sektor-sektor ekonomi daerah.

2.1.2.4 Teori Basis Ekonomi

Beberapa analisis teori pembangunan ekonomi telah menggunakan konsep atau teori basis ekonomi (*economic base theory*). Mereka percaya bahwa permasalahan dasar dari sistem ekonomi regional adalah aktivitas ekonomi basis itu sendiri. Menurut (Hoover, 1971:19) salah satu pendekatan untuk menjelaskan tentang pertumbuhan wilayah yaitu yang disebut dengan basis ekonomi. Bahwasannya pertumbuhan suatu wilayah tergantung pada pertumbuhan industri ekspornya. Perluasan dalam perekonomian eksternal terhadap suatu wilayah merupakan penentu permulaan pertumbuhan dalam wilayah tersebut. Menurut (Stimson et.al, 2006:19) sistem ekonomi terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Pertama, disebut non basis, yang dilihat sebagai menghasilkan produksi untuk keperluan konsumsi lokal, dan
2. Selanjutnya, disebut basis, yang dianggap sebagai menghasilkan produksi barang dan jasa utamanya untuk konsumsi eksternal (kegiatan ekspor)

Menurut (Hoover, 1971:117) pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan efek dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang diekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya

menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan menaikkan permintaan terhadap sektor non basis berarti juga mendorong kenaikan investasi sektor non basis dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri nonbasis.

Sehingga faktor-faktor penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi regional adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Lincoln Arsyad, 1999:116). Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melebihi pertumbuhan alamiah (Tarigan, 2005:28). Kemudian (Adisasmita, 2005:28) menambahkan bahwa keutamaan kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Maka menurut (Chaniago, C. 2012:43) ekonomi yang berorientasi ekspor itu akan membuat perekonomian nasional lebih kuat karena terbentuknya cadangan devisa dari hasil produk nasional bukan dari hutang luar negeri.

Aktivitas basis memang memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Yang akhirnya perkembangan sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dan efek pertumbuhan dalam perekonomian regional. Sektor non basis akan menjadi penting ketika terhubung dengan sektor basis dengan begitu akan membantu transformasi kedalam peraranan sektor basis baru.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan kedalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah

tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis.

2.1.2.6 Teori Pertumbuhan Endogen (New Endogenous Growth Theory)

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, terdapat beberapa pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari adanya kekuatan endogen. Seperti halnya Adam Smith yang menjelaskan pertumbuhan produktivitas disebabkan oleh adanya pembagian kerja yang bergantung pada besarnya kekuatan pasar. Alfred Marshall menekankan bahwa peranan alam dalam kegiatan produksi akan dikenakan hasil yang semakin menurun (*diminishing returns*), namun peranan manusia akan semakin meningkat (*increasing returns*). Kemudian J.M.Clark menganggap pengetahuan (*knowledge*) merupakan satu-satunya instrumen produksi yang tidak dikenakan hasil yang menurun (*diminishing returns*).

Kemunculan teori ini bermula dari Pertama, mereka yang percaya bahwa *learning by doing* dengan introduksi hal-hal baru (bersifat eksternal) dalam suatu perekonomian merupakan pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian. Kedua, mereka yang percaya bahwa penemuan-penemuan baru adalah sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Sehingga kedua aliran ini sepakat bahwa SDM merupakan kunci utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi (Priambodo, 1995:68).

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) merupakan pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan dalam jangka panjang yang ditentukan dari dalam sistem (*endogen*), bukan dari luar (*eksogen*) (Romer, 1994:3). Secara keseluruhan teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih

besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994:6).

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal di perluas dengan memasukkan ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model (*exogen*) tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Munculnya pengaruh dari modal pengetahuan dan investasi diasumsikan bahwa setiap unit modal investasi tidak hanya meningkatkan stok modal fisik, tetapi juga meningkatkan tingkat teknologi untuk semua perusahaan dalam perekonomian melalui *spillover* pengetahuan (Romer,1994:7). Aspek *diminishing return* dapat diatasi melalui spesialisasi dan investasi di bidang sumber daya manusia, seperti halnya Joseph Schumpeter mengatakan bahwa didalam sistem ekonomi posisi *stasioner* tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi. Itulah alasannya mengapa dalam pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa tidak terjadi *diminishing return* terhadap akumulasi modal.

Investasi pengetahuan inilah yang akan mempertahankan pertumbuhan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. Untuk Negara berkembang, implikasi dari teori pertumbuhan baru adalah untuk lebih menekankan pada penempatan modal manusia yang melebihi dari pada modal fisik, dan untuk menekankan keuntungan dari pertukaran ide yang datang dari terhubungnya sistem ekonomi global. Dari hubungan inilah yang akan membawa pengetahuan dan ide baru yang selanjutnya mendorong tumbuhnya daya cipta, kreasi, dan inisiatif, serta diwujudkan dalam kegiatan yang inovatif serta produktif.

Pengembangan teori pertumbuhan endogen sekaligus meningkatkan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan manusia. Apabila pengetahuan baru dan keterampilan terkandung dalam sumber daya manusia, dan pembangunan ekonomi tergantung pada peningkatan teknologi, pengetahuan dan cara-cara baru dalam proses produksi, maka keberhasilan pembangunan akan ditentukan akumulasi dari kualitas sumberdaya manusia. Sumber pertumbuhan dalam teori pertumbuhan endogen, baik yang di dorong oleh *learning by doing*

(*labor learning, capital learning dan organization learning*) maupun penemuan input baru, semua terkandung dalam kualitas SDM.

2.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan, karena perencanaan (*Planning*) adalah merupakan produk keinginan atau cita-cita masa datang yang memiliki lingkup luas. Menurut (Friedman, 1987 dalam Januar, 2006:26) *planning* sebagai upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (*scientific and technical knowledge*) kepada tindakan-tindakan dalam domain publik, menyangkut proses pengarahannya sosial dan proses transformasi sosial.

Maka menurut (Todaro dan Smith, 2003:67) perencanaan bisa diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan dalam beberapa kasus tertentu, juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu Negara demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut (Albert Waterson dalam Adisasmita, 2006:253) dengan melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Menurut (Januar, 2006:28) ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkaitan pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan, kemudian ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut (Tjokroamidjojo, 1993:87) adalah :

1. suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (*steady social economy growth*). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.

3. usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. adanya perluasan kesempatan kerja.
5. adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
6. upaya membangun secara bertahap berdasar kemampuan sendiri/nasional.
7. usaha terus menjaga stabilitas ekonomi.

Sebagai suatu sistem, proses perencanaan kegiatan pembangunan itu dapat berlangsung dalam keseluruhan (komprehensif) dan parsial (Todaro dan Smith, 2003:69), mulai dari kegiatan perencanaan hingga tahap evaluasi. Rencana yang menyeluruh menetapkan target-target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting dari perekonomian nasional sedangkan rencana parsial hanya akan meliputi sektor-sektor ekonomi tertentu. Sehingga diperlukannya suatu identifikasi maupun upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kelemahan-kelemahan yang ada agar arah prioritas dan keberhasilan dari suatu program dapat berjalan dengan efektif dan dapat di pertanggung jawabkan.

Hasil yang baik menandakan kualitas dari formulasi perencanaan. Maka proses perumusan kebijakan atau penetapan strategi pembangunan tidak boleh menjadi sempit dikarenakan menyangkut seluruh hajat hidup manusia. Karena pada dasarnya hakikat pembangunan merupakan tujuan menuju kearah yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka keberadaan perencanaan mejadi alat penting dalam menuntun dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh Negara sedang berkembang (Kuncoro, 2012:50).

Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat di lakukan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai. Pada dasarnya ada dua kondisi yang memengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu pertama, tekanan yang berasal dari lingkungan dalam maupun luar negeri, dan kedua, kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu Negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda (Kuncoro, 2012:49). Misalnya saja beberapa daerah mengalami

pertumbuhan pada sektor industrinya, sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Maka itulah yang menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah.

2.1.4 Peranan Sektor Potensial Ekonomi dalam Pengembangan Daerah

Menurut (Rahardja dan Manurung, 2008:245) persoalan sebenarnya adalah kemakmuran masyarakat tidak semata-mata hanya didasarkan pada tolak ukur pendapatan nasional dan pendapatan per kapita saja, namun juga didasarkan pada bagaimana pendapatan nasional itu di distribusikan secara lebih merata ataukah timpang. Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi ekonomi wilayah yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa di lepaskan dari prinsip otonomi daerah (Widjaja, 2011:27).

Otoda merupakan solusi dari timbulnya permasalahan lokal daerah seperti berupa ancaman disintegrasi, rendahnya kualitas hidup sumberdaya manusia sehingga merujuk kekemiskinan, ketidak merataan pembangunan. Dari itulah, perlunya komitmen sungguh-sungguh dari pemerintah untuk meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat, salah satunya dengan cara memanfaatkan potensi-potensi daerah. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang terdapat didaerah yang mungkin layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002:78).

Sektor ekonomi potensial atau sektor unggulan dapat diartikan sebagai kegiatan usaha yang produktif dikembangkan sebagai potensi pembangunan serta dapat menjadi basis perekonomian suatu wilayah dibandingkan sektor-sektor lainnya dalam suatu keterkaitan baik secara langsung maupun tak langsung (Tjokroamidjojo, 1993:74). Dengan di ketahuinya prioritas sektor unggulan antar wilayah pengembangan maka akan membuat pertumbuhan ekonomi daerah bisa memengaruhi sektor-sektor lain sehingga menyumbang pemerataan hasil-hasil

nya bagi kesejahteraan masyarakat (Yustika, 2005:35). Dalam era otonomi daerah kecepatan dan optimalisasi pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumberdaya ekonomi (SDA dan SDM) yang dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan (ekonomi) wilayah.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Yang menurut (Sukirno S, 2006:3) dengan berlandaskan pada kemampuan potensi daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan daerah, nasional dan global dengan harapan sektor tersebut mampu menggerakkan seluruh roda perekonomian wilayah (multiplier effect), maka sektor tersebut dapat memberi efek lanjut kepada pembangunan sektor-sektor ekonomi Jawa Timur yang didukung oleh daerah-daerah lainnya sebagai partner usaha ekonomi.

Pada saat ini peranan sumberdaya manusia (*human resources*) dalam pembangunan ekonomi daerah (wilayah) semakin signifikan. Faktor sumberdaya manusia ini telah menghadirkan suatu proses pemikiran baru dalam telaah teori-teori pembangunan ekonomi (*new growth theory*), yang menempatkan sumberdaya manusia sebagai poros utama pembangunan ekonomi baik dalam skala global, nasional maupun daerah. Strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan sumber daya manusia dianggap sangat relevan dan cocok dengan kondisi dan karakter pembangunan ekonomi wilayah. Dengan kata lain, konsep pengembangan potensi wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Ada tiga tipe wilayah yaitu wilayah fungsional, wilayah homogen dan wilayah administratif. Pertama; wilayah fungsional adalah wilayah yang terdiri dari komponen yang saling berinteraksi dan melengkapi. Kedua; wilayah homogen adalah wilayah yang dibagi berdasarkan kemiripan dalam aspek tertentu

seperti sumber daya alam (iklim dan sumber mineral), sosial (agama, suku dan budaya), dan ekonomi (mata pencaharian). Ketiga; wilayah administratif adalah wilayah yang dikaitkan dengan pemerintah dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Wilayah administratif dibedakan menjadi wilayah provinsi, wilayah kecamatan, dan wilayah pedesaan (Nugroho, 2004:15). Menurut (Arsyad, 1999:120) terdapat empat peranan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu entrepreneur, coordinator, dan fasilitator serta stimulator. Aspek lain menurut (Wibowo dan Januar, 2005:36) yang juga perlu harus turut di dorong adalah:

1. Pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi yang telah leading dalam kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB.
2. Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang berimbang (*balanced growth*)
3. Pertumbuhan produksi pada sektor ekonomi strategi, yaitu yang memiliki
a) backward linkages b) forward linkage c) indirect linkage d) indirect forward linkage e) output multiplier dan f) employment multiplier.
4. Memberikan prioritas pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berorientasi ekspor.

2.1.5 Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

Agar berkembang dengan cepat dan selaras dengan fungsi wilayah maupun keberadaan potensi sumberdaya yang di miliki dan sasaran ekonomi dan sosial yang telah di tetapkan, strategi apakah yang tepat untuk di terapkan oleh suatu wilayah. Pernyataan tersebut adalah pertanyaan yang pada akhirnya ditujukan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan untuk mengambil keputusan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat (Adisasmita, 2005:201). Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, staregi pembangunan ekonomi di anggap sebagai kunci yang akan menentukan kebijakan teknis untuk menggulirkan kegiatan ekonomi.

Menurut (Stimson, et, al, 2006:46) perubahan peran ekonomi regional dan dampak globalisasi dalam suatu negara memberikan kontek yang mengkhawatirkan pada masa kini tentang bagaimana untuk mencapai

pembangunan berkelanjutan, maka kebijakan pembangunan dan perumusan strategi sekarang perlu memperhatikan faktor-faktor seperti: a) Menghimpun kemampuan utama; b) Membangun modal sosial; c) Membangun strategi kepemimpinan; d) Mengelola sumber daya; e) Membangun intelegensi pasar; f) Menyediakan infrastruktur yang strategis; g) Mengembangkan kemampuan manajemen resiko; dan h) Memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan kedalam strategi pembangunan ekonomi daerah.

Dengan memaksimalkan peluang dan memanfaatkan sumber ekonomi industri atau sektor bisnis dan peregang sumber daya secara lebih efektif dalam sektor-sektor dan cluster industri. Jika organisasi dapat dilatih untuk 'mencari peluang' dan 'berbagi sumber daya', maka hasil akhirnya adalah mungkin perluasan pengganda sosial, lingkungan dan ekonomi. Terdapat adanya ketertarikan oleh ekonom (Krugman, 1995), termasuk (Steinfels 1999; Galster 1998; Martin dan Sunley 1996; Skott dan Auerbach 1995) tentang hubungan antar modal sosial, modal lingkungan dan modal budaya dan peran mereka dalam mendukung pembangunan. Pembangunan berkelanjutan harus peduli dengan tindakan yang mengakibatkan efek sebab-akibat kumulatif positif, seperti proyek-proyek dan program-program yang di tetapkan dalam penggerak yang menghasilkan peningkatan imbal hasil investasi modal (Stimson, et al, 2006:89).

Sehingga suatu strategi pembangunan seharusnya mengacu pada perangkat kebijakan dan kegiatan yang secara luas memberikan perhatian pada hal-hal yang berupa prasarana, penanaman modal pemerintah, keseimbangan antara berbagai sektor dan wilayah, perdagangan antara wilayah serta strategi dalam menentukan berbagai sumber daya yang potensial, dan hendaknya pembangunan diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya, kondisi, dan tingkat perkembangan dari masing-masing daerah yang bersangkutan.

Oleh karena itu pentingnya pemanfaatan informasi yang aktual dan mendukung yang dapat menjadi dasar pengetahuan untuk mendukung kebijakan pengembangan potensi ekonomi daerah dalam mencapai kinerja pembangunan. Pemanfaatan data tersebut dapat dituangkan melalui kegiatan pemetaan potensi ekonomi daerah untuk mengetahui potensi-potensi keunggulan komparatif dan

kompetitif daerah. Sehingga keberadaan peta potensi ditujukan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap potensi ekonomi daerah yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Menurut (Mangun, 2007:19) langkah-langkah berikut dapat di jadikan acuan dalam mempersiapkan strategi pengembangan potensi di daerah:

1. mengidentifikasi sektor-sektor kegiatan mana yang mempunyai potensi untuk di kembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan serta mencari faktor-faktor penyebab rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. mengidentifikasi sumberdaya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusianya yang siap di gunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. dengan model pembobotan terhadap variabel - variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan sub-sektor, maka akan di temukan sektor-sektor andalan yang selanjutnya dianggap sebagai potensi ekonomi yang patut dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
5. menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang diharapkan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sektor ekonomi basis Kabupaten/Kota Jawa Timur dalam beberapa tahun sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Sudarti dengan Judul *Penentuan Leading Sektor Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur*, dengan alat analisis LQ, Tipologi Klassen, MRP, dengan tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier, bagaimana pertumbuhan ekonomi regional kabupaten/kota dan bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antaar kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur mempunyai sektor unggulan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Berdasarkan pada hasil analisis potensi ekonomi menunjukkan bahwa Kota Blitar merupakan daerah yang paling banyak mempunyai sub sektor ekonomi potensi atau dengan tipologi “cepat tumbuh cepat maju”. sub sektor tersebut diantaranya: 1) peternakan; 2) angkutan rel; 3) jasa penunjang angkutan; 4) pos dan telekomunikasi; 5) bank; 6) jasa perusahaan; 7) pemerintah umum; 8) swasta; dan 9) jasa sosial kemasyarakatan.

Roosmawarni dan Soekarnoto dengan judul *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktural di Provinsi Jawa Timur*, dengan alat analisis LQ, MRP, Overlay, dan *Shift-Share*, dengan tujuannya untuk mengetahui sektor-sektor basis, pola dan struktur pertumbuhan ekonomi serta bagaimana proses transformasi structural yang terjadi. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang menjadi basis di hampir 30 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor bangunan cenderung mengalami perlambatan sebaliknya semua sektor tersier cenderung mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang terjadi di 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Timur sedang terjadi transformasi struktural yang ditandai dengan menurunnya peranan sektor pertanian, dan semakin meningkatnya peranan sektor jasa.

Arifin Zainal dengan judul *Analisis Perbandingan Perekonomian Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Timur*, dengan alat analisis Tipologi, LQ, Perbandingan Perekonomian. Dari hasil analisis Tipologi menunjukkan di empat koridor Jawa Timur yang termasuk daerah berkembang cepat adalah kota Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Probolinggo dan kab. Jember, Bojonegoro. Daerah tergolong maju yaitu Kota Batu, kab. Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Nganjuk, Madiun, Banyuwangi, Probolinggo, Lamongan, Tuban dan kab. Sumenep. Daerah yang berkembang cepat tapi pendapatan rendah yaitu Kota Blitar, Kota Pasuruan, kab. Gresik, Malang, Jombang, Kediri, Ponorogo, Magetan, Banyuwangi, Probolinggo, Ngawi dan kab. Bangkalan. Untuk daerah tertinggal yakni kab. Blitar,

pacitan, trenggalek, lumajang, sampang dan pamekasan. Analisis LQ menunjukkan sektor yang menjadi unggulan adalah pertanian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, angkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, industri, pengolahan, serta pertambangan dan penggalian. Berdasarkan analisis perbandingan; bahwa koridor utara selatan memiliki perekonomian pada peringkat pertama, kemudian koridor barat daya, koridor timur dan peringkat terakhir yaitu koridor utara.

Huda Miftakhul dan Santoro Budi, E. dengan judul *Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensi Daerahnya*, dengan alat analisis AHP. Dengan tujuannya untuk mengetahui kabupaten/kota yang memiliki daya saing tinggi maupun rendah, kemudian dibuat rumusan upaya pengembangan daya saing kabupaten/kota berdasarkan potensi yang diperoleh. Dari hasil penelitiannya diterangkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan daya saing antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Terdapat 17 kabupaten yang masuk dalam kategori kemampuan daya saing rendah. Dari hasil pemetaan, menunjukkan bahwa daerah yang memiliki daya saing tinggi secara umum didominasi oleh daerah yang unggul di indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah serta Lingkungan Usaha Produktif.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Santoso Eko B. dan Aulia Belinda, U. dkk. dengan judul *Analisis Keterkaitan Wilayah Secara Sektoral Ditinjau dari Sektor Unggulan Kawasan GKS Plus terhadap Jawa Timur: Implikasinya terhadap Pengembangan Perkotaan*, dengan alat analisis SLQ-DLQ, *Shift-Share*, dan Analisis Spasial. Dengan tujuannya untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan, mengetahui keterkaitan sektoral kawasan GKS Plus, serta mengidentifikasi Implikasinya terhadap pembangunan perkotaan. Dari hasil analisis SLQ dan DLQ, menunjukkan sektor unggulan yang terdapat di Kawasan GKS adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Kab. Pasuruan, Bangkalan, Mojokerto dan Jombang; dengan sektor unggulan pertaniannya. Kab. Gresik dan Sidoarjo; dengan sektor industri pengolahan. Kab. Jombang; sektor perdagangan dan restoran. Kab. Bangkalan; sektor jasa-jasa. Hasil analisis *Shift-Share* menunjukkan -sektor pertanian

berkecenderungan tumbuh lambat. -sektor industri pengolahan berkecenderungan tumbuh cepat. -sektor perdagangan, hotel, dan restoran berkecenderungan untuk tumbuh cepat. -sektor jasa-jasa berkecenderungan untuk tumbuh.

Jika kita hubungkan penelitian terdahulu dengan sekarang, maka dapat kita garis bawahi keseluruhan yang menjadi point penting dalam penelitian ini dengan yang sebelumnya, yakni penelitian saat ini memfokuskan diri pada penentuan sektor-sektor ekonomi basis yang berada di setiap wilayah pengembangan/satuan wilayah pengembangan di Jawa Timur, kemudian dari sektor-sektor basis tersebut akan diklasifikasi lagi menurut tingkat potensialisasinya dari sektor-sektor basis yang lain untuk lebih diprioritaskan dalam pengembangan wilayah. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ini terbagi dalam 8 wilayah pengembangan (SWP) dan setiap wilayah pengembangan ini terdapat satu pusat pelayanan bagi daerah-daerah disekitarnya yang telah disesuaikan menurut kesamaan fungsi-fungsi sektor-sektor ekonomi masing-masing daerah.

Dari sinilah penelitian ini diangkat untuk menganalisis potensi-potensi ekonomi kabupaten/kota yang berada di setiap wilayah pengembangan. Dan penelitian ini mencoba untuk melihat sudah sesuaikah fungsi-fungsi sektor-sektor ekonomi masing-masing daerah di tiap wilayah pengembangan. Karena seperti yang kita ketahui yaitu apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah pengembangan (WP), maka pemanfaatan sumber daya akan menjadi kurang optimal, menurut (Subandi, 2011:113) pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan pada daerah (*endogenous*) yang bersangkutan dengan menggunakan potensi SDM, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal/daerah (*endogenous*). Karena ketidaksesuaian hanya akan memperlambat proses pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.1 Matrik Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian terdahulu			Penelitian sekarang		Perbedaan (keseluruhan)
	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Variabel	Alat Analisis	
1	Ratnasari (Analisis Sektor-Sektor Pembentuk PDRB dan Penentuan Sektor Unggulan Di Wilayah Kabupaten Kebumen 2014)	PDRB 2005-2009.	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi, MRP dan Overlay	PDRB (ADHB-thn. 2000) 2009-2013	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi, MRP, Overlay	Tahun Analisis; Daerah Objek penelitian
2	Basuki (Penentu sektor unggulan dalam pembangunan daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2009)	PDRB 2003-2007	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi, MRP, Overlay.			Tahun Analisis; Daerah Objek Penelitian
3	Husna (Analisis pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk menguatkan daya saing daerah di Kab Gresik)	PDRB 2006-2011.	LQ, <i>Shift-Share</i>			Tahun Analisis; Objek Penelitian; Metod: Tipologi, MRP, Overlay
4	Abidin (Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Asahan (Pend. model basis ekonomi dan swot) 2013)	PDRB 2004-2008.	LQ, <i>Shift-Share</i> , <i>gravitasi</i> , <i>SWOT</i>			Tahun Analisis; Daerah Objek Penelitian; Metod: Tipologi, MRP, overlay
5	Titisari (Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar, dan Sragen di Provinsi Jawa Tengah 2009)	PDRB	LQ, Tipologi Klassen, MRP.			Tahun Analisis; Objek Penelitian; Metod: <i>Shift-Share</i> , overlay.
6	Prishardoyo (Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk	PDRB 2000-2005.	LQ, <i>Shift-Share</i> , Analisis Gravitasi.			Tahun Analisis; D 29 Objek Penelitian; Metoc 29 ologi, MRP, Overlay

	Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati 2008)			PDRB (ADHB – thn. 2000) 2010-2014	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi, MRP dan Overlay	
7	Oktavilia (Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jateng 2011)	PDRB 2009	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi.			Tahun Analisis; Daerah Objek Penelitian; Metod: MRP, Overlay,
8	Erika (Analisis Sektor-sektor Ekonomi dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Kediri 2013)	PDRB 2006 -2010	LQ, MRP, Tipologi Klassen			Tahun Analisis; Daerah Penelitian; Metod: <i>Shift-Share</i> , overlay
9	Januardy (Analisis Struktur Perekonomian di Kota Manado 2013)	PDRB 2001-2010.	LQ, <i>Shift-Share</i>			Tahun Analisis; Daerah Penelitian; Metod: MRP, Overlay, Tipologi.
10	Panjiputri (Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Strategis Tangkallangka 2013)	wawancara dan PDRB 2005-2011	Tipologi, LQ, MRP, Overlay, <i>ShiftShare</i> , Gravitasi, SWOT			Tahun Analisis; Objek Penelitian;
11	Sari (Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2010)	PDRB Provinsi Indonesia 2004-2010.	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi, Hp.Kuznet.			Tahun Analisis; Daerah Objek Penelitian; Metod : MRP, overlay
12	Setiawan (Analisis Sektor Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu 2014)	PDRB 2008-2012.	Kontribusi Sektoral, LQ, SS, MRP, Tipolo			Tahun Analisis; Daerah Objek Penelitian; Metod : MRP, overlay
13	Wahyuningtyas (Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kab.	PDRB 2006-2010.	Tipologi, LQ, MRP, Overlay dan <i>Shift-Share</i> .			Tahun Analisis; Daerah Objek Penelitian;

	Kendal Tahun 2006-2010)					
14	Ghozali (Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Perekonomian Kab. Malang Tahun 2007-2011)	PDRB 2007-2011.	LQ, <i>Shift-Share</i> .	PDRB (ADHB – thn. 2000) 2009-2013	LQ, <i>Shift-Share</i> (SS), Tipologi, MRP dan Overlay	Tahun Analisis; Daerah Objek Penelitian
15	Sunoto (Analisis Sektor Unggulan Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu 2010)	PDRB 1999-2006	LQ, <i>Shift-Share</i> dan Overlay.			Tahun Analisis Provinsi Objek Penelitian; Metod : MRP

Tabel 2.2 Matrik Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Peneliti dan Hasil Penelitian
1	Analisis Sektor-Sektor Pembentuk PDRB dan Penentuan Sektor Unggulan Di Wilayah Kabupaten Kebumen 2014	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kab. Dan Provinsi Jawa Tengah 2005-2009.	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi Klassen, MRP dan Overlay	Ratnasari E.D: Analisis LQ di Kab.Kebumen menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, jasa-jasa dan keuangan, jasa persewaan, sehingga tidak ada perubahan pergeseran struktur ekonomi di Kab.Kebumen. Untuk hasil Klassen menunjukkan sektor pertambangan dan sektor yang maju dan tumbuh pesat adalah sektor penggalian dan jasa, tapi untuk sektor pertanian dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk sektor maju tetapi tertekan. sektor manufaktur merupakan sektor potensial. Menurut peneliti sektor yang perlu dikembangkan yaitu sektor jasa.
2	Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2009.	PDRB Kab.dan Provinsi Sumatra Selatan 2003-2007	MRP, <i>Shift-Share</i> , LQ, Overlay, Tipologi Klassen	Basuki Agus Tri.dan Gayatri Utari: Dari hasil analisis menunjukkan bahwa sektor ekonomi potensi Kab.OKI adalah sektor pertanian dan industri manufaktur yang merupakan sektor dominan yang ditunjukkan dengan peningkatan atas struktur pertumbuhan ekonomi. Disisi lain mayoritas penduduk merupakan petani dan manufaktur (industri Kemplang dan Pempek) dengan pertumbuhan yang tinggi.
3	Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kab.Gresik	PDRB Kab. Gresik dan Provinsi Jatim 2006-2011.	LQ, dan <i>Shift-Share</i>	Husna N. dan Noor I, serta Rozikin, M: Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sektor yang paling potensial dikembangkan yaitu: Sektor industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih serta pertambangan dan penggalian. Sedangkan dukungan pemerintah terhadap sektor-sektor potensial masih belum tepat sasaran, jadi disarankan agar prioritas program pembangunan maupun pengalokasian anggaran pada sektor unggulan.
4	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Asahan (pend. model basis ekonomi dan swot) 2013	PDRB Kabupaten dan Provinsi Medan 2004-2008.	LQ, <i>Shift-Share</i> analysis, analisis gravitasi, SWOT	Abidin Taufik Z.: Dari hasil analisis LQ, menunjukkan kab. Asahan mempunyai tiga sektor unggulan yaitu sektor pertanian, industri dan listrik, gas dan air. Pertumbuhan ekonomi Kab.Asahan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi Sumatra utara untuk sektor nasional share sebesar Rp.1.129.779.89 juta. Menurut analisis gravitasi, Kab. Asahan mempunyai keterkaitan ekonomi antar daerah sangat kuat terhadap kab.simalungun dan kota tanjung balai. Sedangkan kab. Labuhan batu dan kota medan mempunyai keterkaitan ekonomi secara signifikan dan kab. Deli sedang tidak signifikan

				mempengaruhi perekonomian Kab.Asahan.
5	Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar, dan Sragen di Provinsi Jawa Tengah 2009.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dan Provinsi Jawa Tengah	LQ, MRP, Tipologi Klassen	Titisari K.H: Dari hasil analisis sektor basis dan dengan daya saing kompetitif maupun komparatif di Kab. Boyolali adalah lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Untuk Kab.karanganyar yaitu listrik, gas dan air bersih, jasa-jasa. Kemudian untuk Kab.Sragen adalah sektor jasa-jasa, listrik, gas, dan air bersih, lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor spesialisasi adalah Boyolali : pertanian sub sektor peternakan dan tanaman bahan makanan. Untuk Kab.Karanganyar: pertanian subsektor peternakan dan tanaman perkebunan. Sedangkan Kab.Sragen : pertanian subsektor tanaman perkebunan.
6	Analisis Keterkaitan Wilayah Secara Sektoral Ditinjau dari Sektor Unggulan Kawasan GKS Plus terhadap Jawa Timur: Implikasinya terhadap Pengembangan Perkotaan 2012.	PDRB Kabupaten.Kota dan Kawasan GKS dan Provinsi Jawa Timur (2006-2010).	SLQ-DLQ, <i>Shift-Share</i> , dan Analisis Spasial.	Santoso Eko B. dan Aulia Belinda U. dkk: Dari hasil analisis SLQ dan DLQ, menunjukkan sektor unggulan di Kawasan GKS adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Kab. Pasuruan, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto dan Kab. Jombang; dengan sektor unggulan pertaniannya. Kab. Gresik dan Sidoarjo; dengan sektor unggulan dibidang industri pengolahan. Kab. Jombang; dengan sektor unggulan dibidang perdagangan dan restoran. Kab. Bangkalan; dengan sektor unggulan dibidang jasa-jasa Menurut hasil analisis <i>Shift-Share</i> bahwa -sektor pertanian mempunyai kecenderungan untuk tumbuh lambat. -sektor industri pengolahan mempunyai kecenderungan untuk tumbuh cepat. -sektor pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada kawasan GKS Plus (kecuali Kab.Sidoarjo dan Kota Surabaya) mempunyai kecenderungan untuk tumbuh cepat. -sektor jasa-jasa (khususnya Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Pasuruan, dan Kab. Sidoarjo) mempunyai kecenderungan untuk tumbuh.
7	Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati 2008.	PDRB Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah 2000-2005.	LQ, <i>Shift-Share</i> , Analisis keterkaitan wilayah (Gravitasi).	Prishardoyo Bambang: Berdasarkan hasil analisis LQ, sektor-sektor potensial ditunjukkan oleh sektor pertanian, listrik, gas dan air minum, bangunan, keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Sedangkan, berdasarkan analisis Gravitasi menunjukkan Kabupaten yang paling kuat interaksinya dengan kabupaten Pati adalah Kab. Kudus dengan nilai interaksi rata-rata sebesar 1,491,863,31. Sedangkan yang paling sedikit interaksinya adalah Kab. Jepara dengan nilai interaksinya rata-rata sebesar 138,810,362.3.

8	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah. 2011.	PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah, 2009	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi Klassen Pendekatan sektoral.	Oktavilia Shanty: Dari hasil analisis LQ, sektor pertanian dan jasa adalah sektor yang mendominasi wilayah tertinggal dengan memiliki potensi untuk dikembangkan, namun hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah saja. Sedangkan analisis <i>Shift-Share</i> , apabila dilihat nilai Cij-nya, sama sekali tidak ada sektor yang mampu bersaing. Artinya walaupun nilai LQ sektor pertanian memiliki nilai >1 yang berarti mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam wilayahnya, namun sektor tersebut tidak mampu bersaing dengan daerah lain baik dalam satu provinsi maupun dengan daerah di provinsi lain.
9	Analisis Sektor-sektor Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Kediri 2013.	PDRB Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur 2006-2010	LQ, MRP, Tipologi Klassen.	Erika Rita dan Sri Umi M.W: Hasil LQ menunjukkan sektor basis adalah sektor industri pengolahan. Menurut analisis MRP, sektor-sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari provinsi Jawa Timur adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan hasil dari analisis Tipologi, yaitu tidak terdapat sektor yang termasuk dalam kuadran I. Sektor yang termasuk kuadran II yaitu sektor industri pengolahan. Selanjutnya, sektor yang termasuk potensial adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, konstruksi, jasa-jasa. Sedangkan sektor yang relative tertinggal adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, pertanian, listrik, gas dan air bersih serta sektor pertambangan dan penggalian.
10	Analisis Perbandingan Perekonomian Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Timur 2010.	PDRB Kabupaten/Kota dan PDRB Jawa Timur 2005-2009.	Tipologi Klassen, LQ, analisis Perbandingan Perekonomian.	Arifin Zainal: Analisis Tipologi menunjukkan di empat koridor Jatim, daerah berkembang cepat adalah kota Surabaya, kota Malang, kota Kediri, kota Madiun, kota Probolinggo, kab.jember, dan kab.bojonegoro. yang tergolong daerah maju yaitu kab.sidoarjo, kota batu, kab.mojokerto, kab.kediri, kab.nganjuk, kab.madiun, kab.banyuwangi, kab.probolinggo, kab.lamongan, kab.tuban dan sumenep. Yang tergolong daerah berkembang cepat tapi pendapatan rendah yaitu kab.gresik, kab.malang, kota blitar, kota pasuruan, kab.jombang, kab.kediri, kab.ponorogo, kab.magetan, kab.banyuwangi, kab.probolinggo, kab.ngawi dan bangkalan. Untuk daerah tertinggal yaitu kab.blitar, kab.pacitan, kab.trenggalek, kab.lumajang, kab.sampang dan pamekasan. Untuk analisis LQ; sektor yang menjadi unggulan adalah pertanian, listrik, gas dan air bersih, bangunan, jasa-jasa, keuangan, persewaan dan jasa

				perusahaan, angkutan dan komunikasi, perdagangan, hotel dan restoran, industri, pengolahan, serta pertambangan dan penggalian. Berdasarkan analisis perbandingan; dapat dijelaskan bahwa koridor utara selatan memiliki perekonomian pada peringkat pertama, kemudian disusul koridor barat daya, selanjutnya koridor timur serta pada peringkat terakhir yaitu koridor utara.
11	Analisis Struktur Perekonomian di Kota Manado 2013.	PDRB Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara 2001-2010.	LQ, <i>Shift-Share</i>	Januardy A.J.Hidayat: Dari hasil analisis sektor ekonomi unggulan pada periode 2001-2010 diketahui telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kota Manado, dimana terjadi peningkatan dan perubahan pada struktur ekonomi Kota Manado jika dilihat dari sisi sektor ekonomi yaitu dari 4 sektor ekonomi unggulan meningkat menjadi 5 sektor ekonomi unggulan dengan bertambahnya sektor pengangkutan dan komunikasi. Dari hasil analisis data, diketahui bahwa sektor ekonomi yang dapat dijadikan sektor ekonomi unggulan untuk periode tahun 2009-2010 adalah sektor keuangan, persewaan, & jasa, perusahaan, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel & restoran, dan sektor pengangkutan & komunikasi, dan sektor listrik, gas, dan air bersih.
12	Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Strategis TANGKALLANGKA (Kab.Batang, Kota Pekalongan, Kab.Pemalang dan Kajen) 2013.	Data Primer (wawancara) dan Skunder (PDRB Kab dan Provinsi Jawa Tengah periode 2005-2011)	Tipologi Klassen, LQ, MRP, Overlay, <i>Shift-Share</i> , Analisis Gravitasi dan SWOT.	Panjiputri Agata F: Dari hasil penelitian Kab.Batang termasuk dalam kategori daerah relative terginggal. Kota Pekalongan masuk daerah maju dan cepat maju. Kab.Pemalang dan kajen adalah daerah berkembang cepat. Sedangkan untuk sektor unggulan yaitu; untuk Kab.Batang tidak memiliki sektor unggulan (kompetitif dan komparatif). Kota Pekalongan memiliki sektor unggulan yang berdaya saing kompetitif dan komparatif disektor bangunan, perdagangan dan keuangan. Kab.Pemalang memiliki sektor unggulan disektor perdagangan. Kajen dengan sektor unggulannya yaitu disektor listrik. Sedangkan kota Pekalongan berpotensi dijadikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan strategi Tangkallangka karena memiliki beberapa keunggulan seperti daerah maju dan cepat tumbuh, dengan sektor unggulannya di sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
13	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi	PDRB Provinsi Indonesia 2004-2010.	LQ, <i>Shift-Share</i> , Tipologi	Sari Norma R. dan Pujiyono Arif: Hasil penelitian menunjukkan sektor jasa dan sektor pertanian adalah sektor potensial di masing-masing provinsi di Indonesia. Provinsi di Indonesia masih diklasifikasikan dalam provinsi yang relatif terbelakang, ada 14

	di Indonesia Tahun 2004-2010.		Klassen, Hipotesis Kuznet.	provinsi termasuk daerah yang relatif tertinggal. Kesenjangan pendapatan antar propinsi di Indonesia pada 2004-2010 adalah tinggi ($> 0,5$) dan kecenderungan menurun. Sementara hipotesis Kuznets "U" menggambarkan hubungan terbalik antara pertumbuhan dan ketimpangan yang berlaku di Provinsi Indonesia.
14	Analisis Sektor Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan EKonomi Kota Batu 2014.	PDRB Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur 2008-2012.	Analisis Kontribusi Sektoral, LQ, <i>Shift-Share</i> , MRP, dan Tipologi Klassen	Setiawan Mohammad: Dari hasil analisis LQ menunjukkan sektor basis di Kota Batu yaitu sektor pertanian, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan hotel dan reseteran serta jasa-jasa. Karena dari empat sektor tersebut cukup berkontribusi dalam pembentukan nilai PDRB Kota Batu. Artinya ke empat sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan di daerah tersebut dan dapat di ekspor ke luar daerah baik barang atau jasa. Sektor pertanian, jasa-jasa dan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor penopang pertumbuhan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (kompetitif) dan kontribusi pertumbuhan (komperatif) di kota batu.
15	Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010).	PDRB Kabupaten dan Provinsi Jawa Tengah 2006-2010.	Tipologi Klassen, LQ, MRP, Overlay dan <i>Shift-Share</i> .	Wahyuningtyas Rosita. Dkk: Berdasarkan analisis Tipologi, LQ, MRP dan Overlay menunjukkan, sektor unggulan atau dominan di Kabupaten Kendal adalah sektor pertanian dan pertambangan. Sektor potensial adalah sektor industri-industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air minum. Sedangkan sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa termasuk dalam sektor yang terbelakang. Selain itu untuk sektor pengangkutan dan komunikasi termasuk dalam sektor berkembang.
16	Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cilacap	PDRB Kabupaten dan Provinsi Jawatimur	Tipologi, LQ, MRP, Overlay, dan analisis Skalogram.	Berdasarkan analisis Tipologi: kecamatan dalam kategori maju dan cepat tumbuh adalah wanareja, majenang, cimanggu, sidareja, jeruklegi, kesugihan, sampan, cilacap selatan-tengah dan utara. Sedangkan kecamatan yg termasuk kategori maju tapi tertekan adalah dayeuhluhur dan maos. Untuk daerah yg berkembang cepat: karangpucung, cipari, kedungreja, patimuan, gandrungmangu, bantarsari, kawunganten, kampong laut, adipala, kroya, binangun dan dusawungu. Untuk daerah relative tertinggal tidak ada. Menurut analisis LQ; kecamatan yg memiliki sektor unggulan: dayeuhluhur, wanareja, majenang, cimanggu, karangpucung, wanareja, majenang, cimanggu, karangpucung, cipari, sidareja, kedungreja, patimuan, gandrungmangu, bantarsari, kamp.laut, jeruklegi,

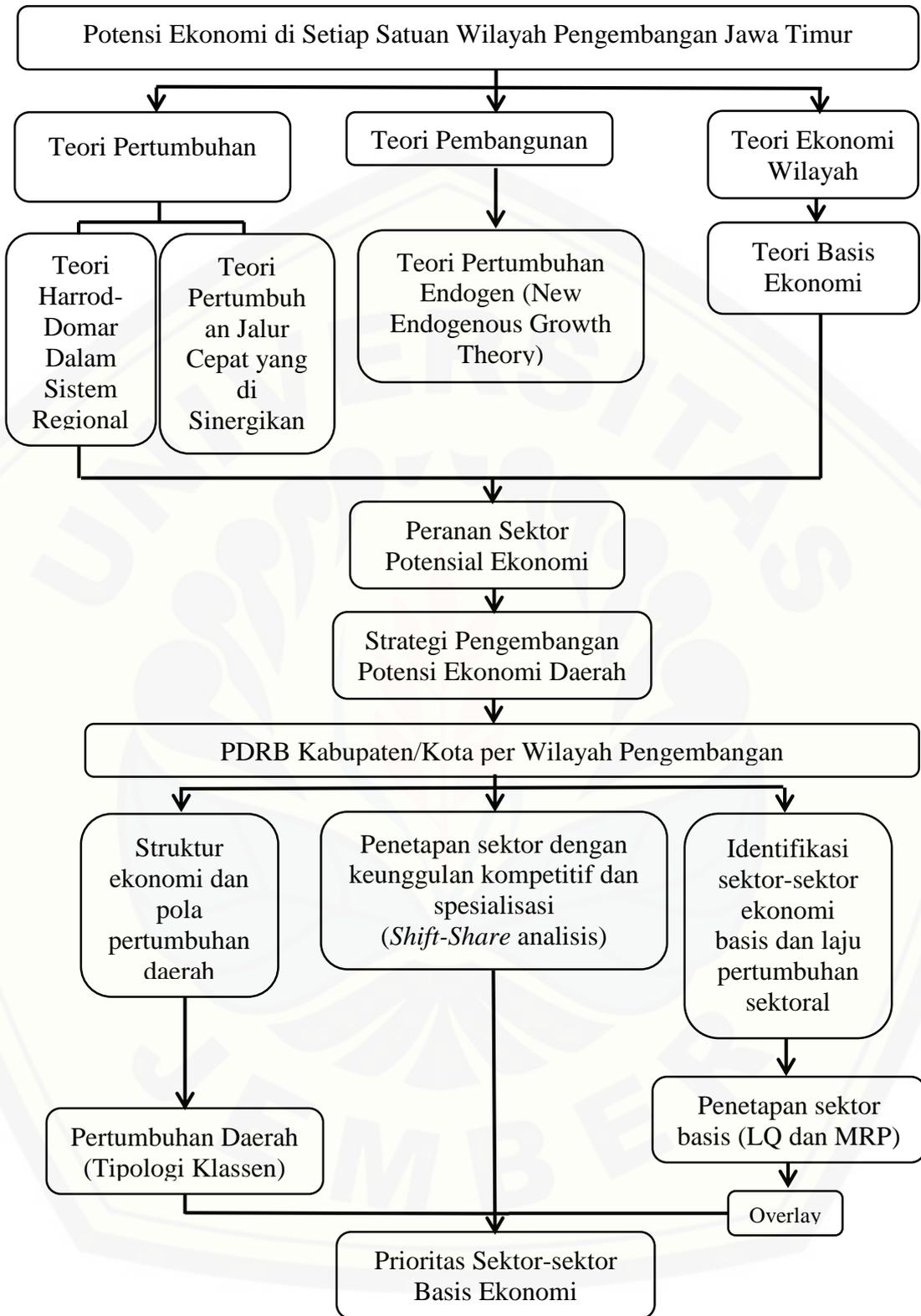
				adipala, maos, binangun, cilacap selatan. Sedangkan berdasarkan analisis skalogram yaitu: yang menjadi pusat pertumbuhan adalah kecamatan mejenang, kecamatan gandrungmangu, kec.kesugihan,
17	Analisis Sektor Unggulan Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu 2010	PDRB Kab/Kota dan Provinsi Bengkulu 1999-2006	LQ, <i>Shift-Share</i> dan Overlay.	Sunoto dan Syafrandi: Analisis <i>Shift-Share</i> menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bengkulu dipengaruhi sebagian besar oleh faktor eksternal, 85,7% dipengaruhi oleh ekonomi Belajar Sumbar dan 4,8% dari sektor ekonomi Belajar Sumbar, dan hanya 9,4% dengan daya saing pertumbuhan ekonomi Bengkulu. LQ dan analisis shift Berbagi di nilai tambah PDRB menemukan bahwa sektor potensial adalah Pertanian, Pertambangan, Industri, Listrik, Gas dan Air, dan jasa. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua PDRB dan pekerjaan, sektor basis potensi Bengkulu adalah Pertanian, Pertambangan dan Jasa.
18	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktural Di Provinsi Jawa Timur 2013.	PDRB Kabupaten/kota dan Provinsi Jawa Timur 2000-2010.	LQ, MRP, Analisis Overlay, dan <i>Shift-Share</i> .	Roosmawarni Anita dan Soekarnoto: Hasil dari penelitian menunjukkan sektor jasa adalah sektor basis di 30 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor bangunan cenderung mengalami perlambatan sebaliknya semua sektor tersier yang meliputi: sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa cenderung mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang terjadi di 33 kabupaten/kota. Hasil analisis <i>Shift-Share</i> menunjukkan di Provinsi Jawa Timur terjadi transformasi struktural yang ditandai dengan menurunnya peranan sektor pertanian, dan semakin meningkatnya peranan sektor jasa.
19	Penentuan Leading Sektor Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2009.	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2003-2004.	LQ, Tipologi Klassen, MRP,	Sudarti: Menunjukkan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mempunyai sektor unggulan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dari hasil analisis potensi ekonomi Kota Blitar merupakan daerah yang paling banyak mempunyai sub sektor ekonomi potensi atau dengan tipologi “cepat tumbuh cepat maju”. Kota Blitar mempunyai 9 (sembilan) sub sektor dengan tipologi “cepat tumbuh cepat maju”, sembilan sub sektor tersebut antara lain: peternakan; angkutan rel; jasa penunjang angkutan; pos dan telekomunikasi; bank; jasa perusahaan; pemerintah umum; swasta; dan jasa sosial kemasyarakatan.

20	Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensi Daerahnya 2014.	PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur 2002	AHP	Huda Miftakhul dan Santoro Budi E: Dari hasil penelitian terdapat perbedaan kemampuan daya saing antara wilayah perkotaan dan kabupaten. Terdapat 17 kabupaten yang masuk dalam kategori kemampuan daya saing rendah. Dari hasil pemetaan, menunjukkan daerah yang memiliki daya saing tinggi didominasi oleh daerah yang unggul di indikator Perekonomian dan Keuangan Daerah serta Lingkungan Usaha Produktif. Secara keseluruhan Kabupaten di Provinsi Jatim yang termasuk dalam kuadran IV (kemampuan daya saing rendah), Untuk wilayah perkotaan mendominasi sektor SDM & Ketenaga kerjaan, Infrastruktur & sarana-prasarana, serta sektor yang tidak berasal dari alam, seperti sektor produktivitas sekunder dan tersier.
----	--	--	-----	--

2.3 Kerangka Konseptual

Pembangunan merupakan suatu usaha perbaikan dengan melalui suatu proses panjang dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat tercapai apabila di dalamnya terdapat potensi-potensi yang dimiliki baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena apabila prioritas pembangunan sektoral daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka pemanfaatan sumber daya akan menjadi kurang optimal. Disinilah peran penting dari sumberdaya alam maupun manusia yang menjadi ujung tombak kesuksesan suatu pembangunan ekonomi daerah, yang menurut teori pertumbuhan baru dengan melalui investasi pendidikan dan dengan adanya *learning by doing* akan lebih memantapkan kondisi pertumbuhan ekonomi lebih optimal melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Menurut (Subandi, 2011:113) pokok permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan pada daerah (*endogenous*) yang bersangkutan dengan menggunakan potensi SDM, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal/daerah (*endogenous*).

Untuk lebih memantapkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur salah satu cara yang dapat ditempuh melalui usaha analisis sektor potensial di masing-masing daerah satuan wilayah pengembangan Jawa Timur melalui analisa PDRB masing-masing Kabupaten/Kota. Dari data PDRB tersebut akan diketahui peranan sektor-sektor terhadap kontribusi yang diberikannya terhadap pembangunan daerah. Hasil pembangunan tersebut dapat dilihat dari tipologi masing-masing daerah, kemudian sektor-sektor apa saja yang menjadi pendukung ekonomi daerah beserta keunggulan kompetitif maupun spesialisasinya. Yang menurut (Yustika, 2005:35) dengan di ketahuinya prioritas sektor unggulan antar wilayah pengembangan maka akan membuat pertumbuhan ekonomi daerah bisa memengaruhi sektor-sektor lain sehingga menyumbang pemerataan hasil-hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang di hadapi oleh masing-masing daerah sangat bervariasi.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber: Data, diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan daerah (wilayah) secara sistematis dengan bantuan angka-angka yang valid dari sumber terpercaya kemudian langkah selanjutnya di lakukannya suatu analisis data untuk memecahkan persoalan yang ada.

3.1.2 Unit Analisis

Didalam pembahasan ini, unit analisis yang digunakan merupakan data *time series* kontribusi dari 9 sektor PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur.

3.1.3 Objek Penelitian

Pemilihan objek penelitian ini merupakan hal yang sudah direncanakan dan di sengaja. Objek yang menjadi penelitian di sini merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini merupakan provinsi terbesar di Jawa dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami penurunan dari sebelumnya, walaupun masih dalam peringkat tertinggi kedua setelah DKI, dari pertumbuhan tinggi tersebut ternyata masih terdapat beberapa daerah yang masih tertinggal oleh daerah-daerah lainnya, yang diduga belum diketahuinya keberadaan sektor basis akibat belum optimalnya dalam pemanfaatanya. Oleh sebab itu penelitian ini di lakukan berdasarkan kesengajaan atas dasar latar belakang yang telah tertulis di latar belakang.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, dengan alasan kondisi perekonomian setelah tahun 2000 lebih stabil dari tahun sebelumnya yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per

kapita, serta pemilihan Tahun dasar 2000 juga di dukung oleh BPS Negara ASEAN yaitu untuk menggantikan Tahun dasar yang di mutakhirkan secara periodik dengan menggunakan Tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5 atas dasar konstan dari tahun dasar sebelumnya yang di gunakan yaitu 1993 (kompas.com:2014). Untuk sumber data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Untuk data-data referensi seperti buku teks maupun jurnal di dapatkan dari lembaga perpustakaan dan lembaga formal lainnya.

3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam analisis ini terdiri dari beberapa analisis, yaitu: analisis *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yang selanjutnya dioverlay, *Shift-Share* modifikasi Esteban Marquillas, dan *Tipologi Klassen*. Masing-masing metode di uraikan di bawah ini.

3.2.1 Analisis Kuosien Lokasi (*Location Quotient*)

Location quotient (LQ) adalah suatu metode untuk menentukan sektor unggulan atau ekonomi basis daerah. Menurut (Tarigan, 2005) *Location quotient* adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Secara lebih rinci analisis ini membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah/daerah dengan membandingkan lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama secara Provinsi.

LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik ini berbagai peubah (*factor*) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja dan produk domestik regional bruto suatu wilayah (Adisasmita, 2005:29). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. Hal ini bisa membantu dalam melihat kekuatan/kelemahan wilayah yang dibandingkan secara *relative* (daerah) dengan wilayah yang lebih luas (provinsi). Alat ini juga merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperluas analisis *Shift-Share* dan sebagai petunjuk adanya keunggulan

komparatif. Menurut (Stimson, et.al,2006:108) terdapat 3 tipe data untuk membantu dalam penghitungan, yaitu:

1. Mengukur tingkat (tenaga kerja, pendapatan atau PDRB)
2. Mengukur tingkat perubahan (tenaga kerja, pendapatan atau PDRB)
3. Mengukur relatif sektor terpenting (*base sektor*).

Selain itu juga terdapat 4 (empat) metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis dalam perekonomian, yaitu:

1. Suatu sektor dianggap basis apabila, mempunyai kaitan kebelakang (*backward linkage*) dan kedepan (*forward linkage*) yang relatif tinggi.
2. Suatu sektor dianggap sebagai sektor basis apabila menghasilkan output bruto yang relatif tinggi sehingga mampu mempertahankan final demand yang relatif tinggi pula.
3. Suatu sektor dianggap sebagai sektor basis apabila mampu menghasilkan penerimaan bersih devisa yang relatif tinggi.
4. Suatu sektor dianggap basis apabila mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang relatif tinggi.

Teknik kuosien lokasi yang digunakan untuk menentukan sektor basis ada beberapa macam, antara lain sebagai berikut (Nugroho, 2004) yaitu:

1. Kuosien lokasi atas dasar tenaga kerja per sektor.
2. Kuosien lokasi atas dasar PDRB
3. Kuosien lokasi atas dasar komoditi atau produksi suatu wilayah

Untuk kegiatan analisa ini digunakan teknik kuosien lokasi dengan rumus sebagai berikut (Blakely, 2002:123):

$$LQ = \frac{X_i/RV_r}{X_n/RV_n}$$

Keterangan :

X_r = nilai Produksi sektor i di daerah Kabupaten/Kota;

RV_r = total PDRB daerah Kabupaten/Kota;

X_n = nilai produksi sektor i pada wilayah Provinsi;

RV_n = total PDRB Provinsi atau Karisidenan.

Untuk kriteria pengukuran yang digunakan dari hasil LQ adalah sebagai berikut:

1. Jika $LQ > 1$ maka suatu sektor dikatakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasinya di kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi.
2. Jika $LQ = 1$ maka dikatakan suatu sektor mendekati sebagai sektor basis. Berarti tingkat spesialisasinya di kabupaten sama dengan tingkat provinsi.
3. Jika $LQ < 1$ maka suatu sektor bukan merupakan sektor basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat provinsi.

Dari keterangan diatas, jika $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai perekonomian daerah.

3.2.4 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Berbagai alat analisis sering digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota terutama untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial. Metode analisis yang sering digunakan antara lain analisis LQ dan MRP. Pada dasarnya kedua analisis tersebut berbeda, yaitu LQ dengan menggunakan kriteria kontribusi yaitu untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu kegiatan dalam wilayah studi (Kabupaten/Kota) dibandingkan dengan wilayah referensi (Provinsi). Sedangkan rasio pertumbuhan menggunakan kontribusi pertumbuhan yaitu melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan, terutama melihat perbedaan pertumbuhan, baik dalam skala yang lebih luas (*district preference*) maupun dalam skala yang lebih kecil (*district study*), (Yusuf, 1999:220).

Kegunaan model rasio pertumbuhan menurut (Erika dan Mintarti, 2013) tidak jauh beda dari (Yusuf, 1999) yaitu model rasio pertumbuhan merupakan alat untuk melihat deskripsi kegiatan sektor-sektor ekonomi yang potensial dalam suatu wilayah dengan membandingkan pertumbuhan kegiatan dalam wilayah studi dan wilayah referensi. Maka untuk mendukung hasil analisis dari model LQ atas penentuan kegiatan ekonomi yang dominan atau potensial, maka digunakanlah MRP. Kedua metode tersebut sangat dibutuhkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi wilayah yang potensial.

Dalam analisis MRP terdapat dua ukuran pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr). Dari kedua ukuran tersebut kemudian dioverlay bersamaan dengan metode LQ untuk mendapatkan deskripsi kegiatan ekonomi potensial Kabupaten/Kota Jawa Timur. Untuk keterangan analisis tersebut selanjutnya akan dijabarkan yaitu sebagai berikut (Yusuf, M. 1999:222):

a) Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs):

Perbandingan antara laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. Formulasi nya yaitu:

$$RP_s = \frac{\Delta E_{ij}/E_{ij(t)}}{\Delta E_{iR}/E_{iR(t)}}$$

Dimana RP_s = Perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan sektor i wilayah (daerah) dengan laju pertumbuhan kegiatan sektor i wilayah (Provinsi).

$$\Delta E_{ij} = E_{ij(t+n)} - E_{ij(t)}$$

$$\Delta E_{ij} = \text{Perubahan PDRB sektor i di wilayah studi (Kabupaten) pada awal tahun.}$$

$$\Delta E_{iR} = \text{Perubahan PDRB sektor i di wilayah referensi (Provinsi).}$$

$$E_{ij(t)} = \text{PDRB sektor i di wilayah studi (Kabupaten) pada awal tahun penelitian.}$$

$$E_{iR(t)} = \text{PDRB awal tahun di wilayah referensi (Provinsi).}$$

b) Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

Perbandingan laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB di wilayah referensi). Formulasi nya adalah:

$$RP_R = \frac{\Delta E_{ir}/E_{ir(t)}}{\Delta E_R/E_R(t)}$$

Dimana RP_R = Perbandingan antara laju pertumbuhan kegiatan i wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi.

$$\Delta E_{ir} = E_{iR(t+n)} - E_{iR(t)}$$

$$\Delta E_R = E_{R(t+n)} - E_{R(t)}$$

$$\Delta E_{ir} = \text{Perubahan PDRB sektor i di wilayah referensi.}$$

$$\Delta E_R = \text{Perubahan PDRB di wilayah referensi.}$$

$$E_{ir(t)} = \text{PDRB disektor i pada awal tahun}$$

$$E_{R(t)} = \text{PDRB di wilayah referensi pada awal tahun.}$$

Dengan catatan jika nilai RP_R atau $RP_S > 1$, maka di katakan (+) dan jika RP_R atau $RP_S < 1$, maka di katakan negatif (-). Dari analisis MRP ini akan diperoleh suatu keterangan atas kegiatan ekonomi yang potensial pada wilayah studi yang terdiri dari 4 (empat) klasifikasi, (Yusuf, M. 1999:225) yaitu:

1. Klasifikasi 1: $RP_R (+)$ dan $RP_S (+)$ berarti kegiatan tersebut pada tingkat wilayah referensi mempunyai pertumbuhan menonjol demikian pula pada tingkat wilayah studi yang selanjutnya di sebut dominan pertumbuhan.
2. Klasifikasi 2: $RP_R (-)$ dan $RP_S (+)$ Berarti kegiatan tersebut pada tingkat wilayah referensi pertumbuhannya tidak menonjol, akan tetapi pada tingkat wilayah studi pertumbuhannya menonjol.
3. Klasifikasi 3: $RP_R (+)$ dan $RP_S (-)$ berarti kegiatan tersebut pada tingkat wilayah referensi mempunyai pertumbuhan menonjol namun pada tingkat wilayah studi tidak menonjol.
4. Klasifikasi 4: $RP_R (-)$ dan $RP_S (-)$ berarti kegiatan tersebut baik di tingkat wilayah referensi maupun wilayah studi pertumbuhannya tidak menonjol.

3.2.5 Analisis Overlay

Analisis overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ). Metode ini memberikan penilaian kepada sektor-sektor ekonomi dengan melihat nilai (+) dan (-). Sektor dengan nilai (+) paling banyak berarti sektor tersebut adalah sektor unggulan dan begitupun sebaliknya. RP_R bernotasi (+) berarti pertumbuhan sektor i diwilayah referensi lebih tinggi dibanding pertumbuhan di wilayah studi, dan demikian sebaliknya. Dan begitupula untuk penilaian terhadap metode analisis yang lainnya.

Menurut (Yusuf, M. 1999:229) analisis overlay di maksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Terdapat 4 kemungkinan analisis overlay:

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.

2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk di pacu menjadi kegiatan yang dominan.
3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Kegiatan ini sangat memungkinkan merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan.
4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kontribusi.

3.2.2 Analisis *Shift-Share* Modifikasi Esteban Marquillas

Metode *Shift-Share* merupakan analisis pertumbuhan wilayah sejak tahun 1940-an oleh Daniel Creamer dan kemudian di ringkas oleh Dunn Tahun 1960 (Shi & Yang, 2008 dalam Heralth, 2010). Analisis *Shift-Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi sejak 1960an, pada saat itu analisis *Shift-Share* telah digunakan di Amerika Serikat dan di beberapa negara lain oleh para ilmuwan regional untuk menganalisis data sistematis ekonomi regional, seperti Bank Federal Reserve dan Departemen Perdagangan. Beberapa ragam konteks yang mereka masukkan dalam analisis *Shift-Share* yaitu seperti (Stimson,*et.al*, 2006:121):

- a. Dampak pengambilan keputusan publik (Sui 1995).
- b. Perubahan haluan Migrasi (Ishikawa 1992).
- c. Perubahan komposisi pekerjaan (Smith 1991);
- d. Analisis produktivitas daerah (Ledebur and Moomaw 1983; Rigby and Anderson 1993; Haynes and Dinc 1997);
- e. Dampak transportasi pada pertumbuhan regional (Toft and Stough 1986);
- f. Perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dan lapangan kerja (Harrison and Kluver 1989);

Pada dasarnya tujuan analisis *Shift-Share* adalah menentukan kinerja atau produktivitas kinerja perekonomian daerah dengan membandingkan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) dengan daerah yang lebih besar (Provinsi). Yang menurut (Mondal, 2009:42) analisis *Shift-Share* memerlukan data

perbandingan perekonomian baik dari tingkat nasional dan daerah (wilayah). Dengan penggambaran yang sederhana, teknik yang cepat dan relatif murah dalam menganalisis pertumbuhan dan kemunduran wilayah dari waktu ke waktu (Stimson, et.al, 2006:114).

Yang menurut (Mondal, 2009:42) teknik pendekatan *Shift-Share* adalah tergolong relatif baru digunakan dalam analisis pertumbuhan wilayah yang menguraikan pertumbuhan PDB/PDRB, tenaga kerja atau pendapatan menurut karakteristiknya yang telah di tentukan. Kemudian (Dunn, 1960) dalam (Nazara and Hewings, 2003), (Selting A, 1990) serta (Hoppe, 1997) berpendapat sama bahwa analisis *Shift-Share* telah menjadi alat yang populer dalam analisis wilayah/daerah. Atas kegunaannya yang sederhana dan lebih tajam jika dibandingkan dengan metode LQ dalam menangkap perubahan mendasar antara variabel yang dipertimbangkan dalam menggambarkan berbagai perubahan ekonomi di suatu daerah selama periode waktu tertentu.

Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor-faktor penyebab perubahan sedangkan metode *Shift-Share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis *Shift-Share* dapat di jelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri dan keunggulan kompetitif (Bendavid Val, 1983 dan Hoover, 1984).

Kemudian Herath Janaranjana, dkk, (2011:159) dan Arsyad (1999) mengatakan analisis *Shift-Share* ini memberikan data tentang kinerja perekonomian (perubahan ekonomi) dalam 3 bidang yang saling berhubungan:

1. Pertumbuhan ekonomi (*national share*), yaitu menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah.
2. Pergeseran proporsional (*Proportionality shift/industrial mix*) yaitu Mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar. Pengukuran ini memungkinkan perekonomian yang dijadikan acuan. Pergeseran kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang yang tumbuh lebih rendah.

3. Pergeseran diferensial (*Differential Shift*) yaitu menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri pada perekonomian yang dijadikan acuan. Pengukuran ini juga disebut dengan pengaruh keunggulan kompetitif (C).

Selanjutnya jika kita notasikan variabel di atas maka akan menjadi seperti:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

D_{ij} : Perubahan suatu variabel regional sektor i di wilayah j;

N_{ij} : Komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j;

M_{ij} : Bauran industri sektor i di wilayah j;

C_{ij} : Keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j;

$$D_{ij} = E'_{ij} - E_{ij}$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

E'_{ij} : Nilai output sektor i di wilayah j pada tahun akhir analisis;

E_{ij} : Nilai output sektor i di wilayah j pada tahun dasar;

r_n : Laju pertumbuhan nasional;

r_{in} : Laju pertumbuhan sektor i nasional;

$r_{ij} = (E'_{ij} - E_{ij}) / E_{ij}$ mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah j;

$r_{in} = (E'_{in} - E_{in}) / E_{in}$ mengukur laju pertumbuhan sektor i nasional;

$r_n = (E'_n - E_n) / E_n$ mengukur laju pertumbuhan nasional;

Ket: E'_{in} : Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada tahun akhir analisis

E_{in} : Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada suatu tahun dasar

E'_n : Nilai tambah nasional pada tahun akhir analisis

E_n : Nilai tambah nasional/provinsi

Sehingga untuk mengetahui perubahan/kinerja dari variabel-variabel regional suatu sektor, pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif seperti yang telah disebutkan oleh Hoover diatas, maka persamaan *Shift-Share* (SS-K) untuk sektor i di wilayah j adalah :

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Bila tiap komponen pengaruh di jumlahkan maka tanda hasil itu akan menunjukkan arah perubahan dalam pangsa wilayah kesempatan kerja/output nasional. *Proportional shift component* (P) atau *industrial mix* (M) yaitu mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah-daerah yang berspesialisasi terhadap sektor-sektor yang secara nasional tumbuh cepat dan begitupun dengan sebaliknya.

Different shift component (D) yaitu komponen ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional internal. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya melimpah/efisien, akan mempunyai differential shift component yang positif (keunggulan kompetitif - C), begitu pula sebaliknya (Tarigan, 2005:86). Namun dibalik itu semua, analisis *Shift-Share* klasik ini terdapat beberapa keterbatasan, seperti:

1. Tidak mampu menjelaskan pola perilaku data karena persamaan yang ada hanya merupakan persamaan identitas.
2. Daerah di asumsikan harus tumbuh pada laju pertumbuhan ekonomi nasional atau wilayah administratif di atasnya. Asumsi ini dapat menghasilkan bias karena sebab-sebab pertumbuhan ekonomi wilayah tidak dapat dijelaskan.
3. Komponen industri *mix* dan *differential mix* atau *competitiveness* tidak dikembangkan dengan baik.
4. Bahwa seluruh komoditas pada suatu daerah di pasarkan secara nasional.

Setelah beberapa tahun kemudian dilakukan usaha untuk meningkatkan analisis *Shift-Share* klasik dengan memperluas model alternatif-alternatif yang di munculkan oleh (Esteban-Marquillas, 1972) dan (Arcelus, 1984), (Selting A, 1990:23). Yang kemudian dikenal dengan analisis *Shift-Share* dinamis dengan tujuan untuk melengkapai keterbatasan *Shift-Share* kalsik (SS-K) dengan penjabaran lebih luas terhadap komponen pengaruh keunggulan kompetitif. Yang menurut Braff dan Ksatria dalam (Selting Anne; 1990) menyimpulkan bahwa

Shift-Share dinamis lebih akurat, pendekatannya yang dinamis memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengalokasikan pertumbuhan antar komponen.

Komponen *Shift-Share* dinamis ini di jabarkan menjadi dua komponen yaitu komponen spesialisasi dan kompetitif (*competitive*). Kedua komponen ini juga disebut komponen efek alokasi (*allocation effect*) (Herzog dan Olsen,1977 dalam Selting Anne,1990:25). Efek alokasi adalah komponen dalam EM-SS yang dapat menunjukkan apakah suatu daerah memiliki spesialisasi dan keunggulan kompetitif. Persamaan EM-SS memiliki komponen baru dengan mendefinisikan kembali keunggulan kompetitif (C_{ij}) dari *Shift-Share* klasik yang di sebut dengan *homothetic employment* di sektor i diwilayah j, tetapi dalam penelitian ini akan digunakan variabel PDRB sebagai pengganti *variabel employment* yang menurut Tarigan (2005) *Shift-Share* dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah, kemudian apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan dengan tahun dasar yang sama. Homothetic bila di notasikan menjadi (E'_{ij}) dengan notasi keseluruhannya sebagai berikut:

$$E'_{ij} = E_j (E_{in} / E_n)$$

E'_{ij} : Tenaga kerja *homothetic* (*homothetic employment*) sektor i di wilayah j

E_j : Total tenaga kerja (*total employment*) di wilayah j

Tenaga kerja *homothetic* (E'_{ij}) di definisikan sebagai tenaga kerja atau pendapatan atau nilai tambah yang di capai suatu sektor i di wilayah j bila, struktur kesempatan kerja di wilayah itu sama dengan struktur nasional (Provinsi), sehingga komponen keunggulan kompetitif menjadi:

$$C'_{ij} = E'_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

C'_{ij} mengukur keunggulan atau ketidak unggulan kompetitif sektor i di wilayah j. Selanjutnya pengaruh alokasi (*allocation effect*) sektor i di wilayah j (A_{ij}) sebagai bagian yang belum di jelaskan dari perubahan suatu variabel wilayah dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$A_{ij} = (E_{ij} - E'_{ij}) (r_{ij} - r_{in})$$

A_{ij} : Pengaruh alokasi (*allocation effect*) untuk sektor i di wilayah j

Pengaruh Alokasi (A_{ij}) merupakan bagian dari pengaruh kompetitif klasik yang menunjukkan adanya tingkat spesialisasi di sektor i di wilayah j. Persamaan

ini menunjukkan bahwa bila sektor di suatu wilayah mempunyai spesialisasi maka juga akan menikmati keunggulan kompetitif yang lebih baik (Beck dan Herz (1990) dalam Supomo 1993). Menurut (Herzog H.W and Olsen R.J, 1977:10) terdapat 4 kemungkinan yang dapat terbentuk dalam efek alokasi EM-SS, yaitu:

Tabel 3.1 Kemungkinan Efek Alokasi

Kode	Definisi	(Efek Alokasi) (A_{ij})	Komponen	
			Spesialisasi ($E_{ij} - E'_{ij}$)	Competitive Advantage ($r_{ij} - r_{in}$)
1	Competitive disadvantage, Specialized	-	+	-
2	Competitive disadvantage, Not Specialized	+	-	-
3	Competitive advantage, Not Specialized	-	-	+
4	Competitive advantage, Specialized	+	+	+

Sumber: (Herzog H.W and Olsen R.J, 1977:10).

Sehingga hasil dari modifikasi E-M terhadap analisis *Shift-Share* Klasik, yaitu:

$$D_{ij} = E_{ij} (r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_n) + E'_{ij} (r_{ij} - r_{in}) + (E_{ij} - E'_{ij})(r_{ij} - r_{in})$$

Akhirnya dimungkinkan dari adanya efek alokasi dan unsur *homothetic* dapat membantu penyempurnaan analisis *Shift-Share* yang nantinya dapat menentukan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan daya spesialisasi.

3.2.3 Analisis Tipologi Daerah/Wilayah (*Tipologi Klassen*)

Analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita sebagai sumbu horizontal, menurut (Arsyad Lincoln, 1999:323) terdapat empat klasifikasi daerah yang diamati, yaitu:

1. Kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) atau disebut juga sebagai daerah maju dan tumbuh cepat (*rapid*

growth region), merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.

2. Kuadran II yaitu daerah yang berkembang cepat (*high growth but low income*) atau juga disebut sebagai daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*), merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.
3. Kuadran III yaitu daerah maju tetapi tertekan (*low growth but high income*) atau juga disebut sebagai daerah berkembang cepat (*growing region*), merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya lebih rendah tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.
4. Kuadran IV yaitu daerah tertinggal (*low growth and low income*) atau disebut juga sebagai daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.

Klasifikasi diatas kemudian dirangkum dalam Tabel seperti dibawah ini:

Tabel 3.2 Klasifikasi Daerah Menurut Analisis Tipologi Daerah

PDRB perkapita (y) Laju Pertumbuhan (r)	$y^i > y$	$y^i < y$
$r^i > r$	DAERAH MAJU DAN TUMBUH CEPAT Pendapatan tinggi Pertumbuhan tinggi	DAERAH BERKEMBANG Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
$r^i < r$	DAERAH MAJU TAPI TERTEKAN Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	DAERAH RELATIF TERTINGGAL Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Sumber: (Arsyad Lincoln, 1999:323).

Keterangan: r_i : Laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota i
 y_i : PDRB perkapita daerah kabupaten/kota i
 r : Laju pertumbuhan ekonomi daerah referensi/provinsi j
 y : PDRB perkapita daerah referensi/provinsi j

3.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat beberapa penyamaan persepsi dan pengertian terhadap beberapa istilah dan variabel yang digunakan dalam studi ini, pengertian tersebut berupa:

- a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah. PDRB dimaksudkan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang ada dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun.
- b. Kegiatan ekonomi dalam perekonomian regional digolongkan ke dalam dua golongan yaitu kegiatan basis dan nonbasis.
- c. Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan PDRB sejak tahun 2009-2013.
- d. Potensi ekonomi adalah kemampuan ekonomi yang dimiliki daerah yang mungkin atau layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.
- e. *Location Quotient* (LQ), digunakan mengetahui sektor yang menjadi prioritas berdasarkan kriteria kontribusi masing-masing sektor. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sektor-sektor apasaja yang termasuk dalam sektor basis.
- f. Metode Rasio Pertumbuhan (MRP), digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan ekonomi, terutama struktur ekonomi kabupaten/kota maupun provinsi yang lebih menekankan kepada kriteria pertumbuhan. Dimana dari hasil MRP ini dioverlay bersamaan dengan metode LQ untuk mendapatkan deskripsi kegiatan ekonomi basis/potensial kabupaten/kota.
- g. *Shift-Share* Alat analisis ini digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibanding perekonomian provinsi.
- h. *Tiplogi Klassen* digunakan untuk memvisualisasikan kondisi suatu daerah berdasarkan kondisi perekonomiannya.

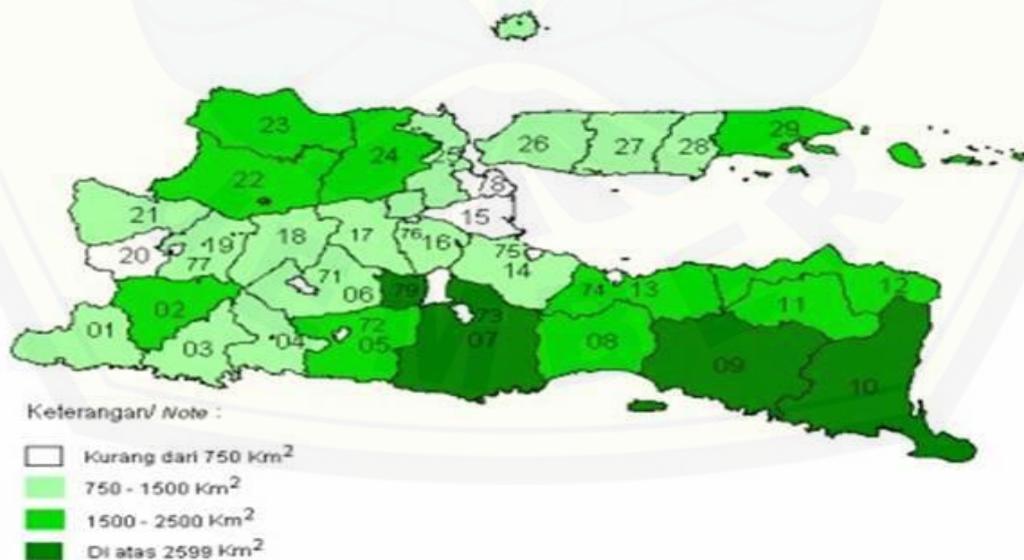
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Aspek Geografis

Provinsi Jawa Timur merupakan satu Provinsi yang terletak di Pulau Jawa selain Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 48.039,14 Km² memiliki batas-batas sebagai berikut: Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Indonesia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat menjadi 2 bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 48.258 km² habis terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota.



Gambar 4.1 Peta Administrasi menurut Kabupaten/Kota dan Luas Area

Tabel 4.1 Jumlah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2015

No.	Kabupaten			Kota	
1	Pacitan	16	Mojokerto	30	Kediri
2	Ponorogo	17	Jombang	31	Blitar
3	Trenggalek	18	Nganjuk	32	Malang
4	Tulungagung	19	Madiun	33	Probolinggo
5	Blitar	20	Magetan	34	Pasuruan
6	Kediri	21	Ngawi	35	Mojokerto
7	Malang	22	Bojonegoro	36	Madiun
8	Lumajang	23	Tuban	37	Surabaya
9	Jember	24	Lamongan	38	Batu
10	Banyuwangi	25	Gresik		
11	Bondowoso	26	Bangkalan		
12	Situbondo	27	Sampang		
13	Probolinggo	28	Pamekasan		
14	Pasuruan	29	Sumenep		
15	Sidoarjo				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

4.1.2 Aspek Demografi

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam usaha meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga beli dan usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Adanya peningkatan jumlah penduduk akan diikuti dengan makin meningkatnya aktifitas perekonomian. Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk Jawa Timur tahun 2009 sebanyak 37.236.149 jiwa dan terus bertambah hingga tahun 2012 menjadi 38.052.950 jiwa, dimana pertumbuhan paling banyak adalah perempuan, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4.2 Struktur Penduduk Jawa Timur menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk:	37.236.149	37.476.757	37.781.599	38.052.950	38.363.2
	Laki-laki	18.378.136	18.503.516	18.599.308	18.740.054	18.925.1
	Perempuan	18.858.013	18.973.241	19.182.291	19.312.896	19.438.1
2	Pertumbuhan	0.75	0.65	0.75	0.72	0,81

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Timur disetiap Kabupaten/Kota sangat bervariasi, dari yang tertinggi Kota Surabaya dengan jumlah penduduk sekitar 2.801.409 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,56 persen dan terendah yaitu Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sebesar 122.550 jiwa.

4.1.3 Aspek Perekonomian

A. Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur

Perekonomian di suatu daerah diperoleh dari adanya berbagai aktivitas ekonomi dengan tolok ukurnya adalah PDRB yang berupa arus barang dan jasa. Hal ini menggambarkan adanya kemampuan suatu daerah di dalam mengelola sumber daya yang ada yang tercermin dalam perkembangan sektor – sektor ekonomi tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Jawa Timur dari sektor pertanian ke sektor lainnya dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap total PDRB-nya. Pada tahun 2013 sumbangan terbesar dihasilkan oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Tabel 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) 2000 JAWA TIMUR Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
1	50,208,896.71	51,329,548.83	52,628,433.15	54,463,942.77	55,330,095.90
2	7,104,816.81	7,757,319.82	8,228,632.48	8,419,507.76	8,697,627.56
3	83,299,893.42	86,900,779.13	92,171,191.46	98,017,056.47	103,497,232.68
4	4,361,515.81	4,642,081.81	4,932,084.36	5,238,431.69	5,486,499.10
5	10,307,883.76	10,992,599.76	11,994,825.72	12,840,565.41	14,006,020.59
6	95,983,867.09	106,229,112.97	116,645,214.35	128,375,498.60	139,431,307.45
7	22,781,527.67	25,076,424.92	27,945,256.13	30,640,913.33	33,837,742.37
8	17,395,393.53	18,659,490.17	20,186,109.19	21,782,339.97	23,455,842.04
9	29,417,374.11	30,693,407.47	32,251,530.62	33,884,591.40	35,686,078.02
PDRB	320,861,168.91	342,280,764.88	366,983,277.46	393,662,847.40	419,428,445.71

Pada Tabel 4.3 Diatas menunjukkan bahwa PDRB Jawa Timur dari Tahun 2009-2013 terus tumbuh meningkat. Pada Tahun 2013 PDRB Jawa Timur sebesar

Rp. 419,428,445.71 jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari total nilai PDRB tersebut sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor terbesar dengan nilai pada Tahun 2013 sebesar Rp. 139,431,307.45 atau 8.61 persen mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan nilai PDRB terkecil berada di sektor listrik, gas dan air bersih sebesar Rp. 5,486,499.10 atau 4.3 persen, menurun dibanding tahun 2012 sebesar 6.21 persen. Dalam struktur PDRB sektor industri tahun 2013 masih didominasi subsektor industri makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 15,25 persen, diikuti subsektor industri kertas & barang cetakan dan subsektor industri pupuk, kimia & barang dari karet masing-masing sebesar 3,43 persen dan 2,28 persen. Sedangkan subsektor industri yang lain kontribusinya di bawah 2 persen.

Sektor perdagangan, hotel & restoran merupakan sektor terbesar dengan nilai Rp. 356,10 triliun atau sebesar 31,34 persen mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 30,41 persen. Sedangkan kontribusi terkecil terjadi pada sektor listrik, gas & air bersih sebesar 1,29 persen, menurun dibanding tahun 2012 dengan kontribusi sebesar 1,35 persen. Sektor industri pengolahan juga memiliki kontribusi cukup besar dalam struktur perekonomian Jawa Timur yaitu sebesar 26,60 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2012 dengan kontribusi sebesar 27,13 persen. Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir peranan sektor industri pengolahan semakin menurun.

Tabel 4.4 Struktur Perekonomian Jawa Timur (persen), 2009-2013

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Sektor Primer</i>	18,56	17,94	17,62	17,46	16,91
1. Pertanian	16,34	15,75	15,38	15,38	14,91
2. Pertambangan dan Penggalian	2,22	2,19	2,24	2,09	2,00
<i>Sektor Sekunder</i>	33,70	33,50	33,22	33,03	32,63
3. Industri Pengolahan	28,14	27,49	27,12	27,13	26,60
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,55	1,51	1,43	1,35	1,29
5. Konstruksi	4,01	4,49	4,67	4,55	4,74
<i>Sektor Tersier</i>	47,74	48,57	49,16	49,51	50,46
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	28,42	29,47	29,99	30,41	31,34
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,50	5,52	5,66	5,70	5,94
8. Keuangan, Persewaan & Js Persh	4,83	4,90	4,97	5,04	5,10
9. Jasa-jasa	9,00	8,68	8,55	8,35	8,09
PDRB Jawa Timur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur

Dari Tabel 4.4 di atas tampak bahwa selama lima tahun terakhir peranan sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan semakin meningkat, sedangkan peranan sektor pertanian, sektor jasa-jasa cenderung menurun.

B. Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur tahun 2013 tumbuh sebesar 6,55 persen, melambat dibanding tahun 2012 yang mencapai 7,27 persen. Perlambatan tersebut diduga terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah antara lain kenaikan Tarif Dasar Listrik dan Bahan Bakar Minyak pada pertengahan tahun 2013. Meskipun demikian masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,78 persen. Secara umum pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan domestik dan luar negeri serta meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa.

Tabel 4.5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Pertanian	3.92	2.23	2.53	3.49	1.59
2.Pertambangan dan Penggalian	6.92	9.18	6.08	2.32	3.30
3.Industri Pengolahan	2.8	4.32	6.06	6.34	5.59
4.Listrik. Gas dan Air Bersih	2.72	6.43	6.25	6.21	4.74
5.Bangunan	4.25	6.64	9.12	7.05	9.08
6.Perdagangan. Hotel & Restoran	5.58	10.67	9.81	10.06	8.61
7.Pengangkutan dan Komunikasi	12.98	10.07	11.44	9.65	10.43
8.Keuangan. P.Sewaan & Js Persh	5.3	7.27	8.18	7.91	7.68
9.Jasa-jasa	5.76	4.34	5.08	5.06	5.32
PDRB Jawa Timur	5.01	6.68	7.22	7.27	6.55

Dari Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,01 persen, berikutnya tahun 2010 tumbuh sebesar 6,68 persen, bahkan tahun 2011 dan 2012 tumbuh diatas 7 persen, tepatnya masing-masing tumbuh 7,22 persen dan 7,27 persen, sedangkan tahun 2013 melambat menjadi 6,55 persen. Seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,43 persen; dan sektor konstruksi sebesar 9,08 persen. Kedua sektor tersebut tumbuh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Sektor perdagangan, hotel & restoran yang memiliki peranan cukup besar dalam perekonomian Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 8,61 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,59 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya. Dari Tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 7,68 persen, juga melambat dibanding tahun sebelumnya. Sektor lain yang masih tumbuh rata-rata di atas lima persen yaitu sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa, masing-masing tumbuh sebesar 5,59 persen dan 5,32 persen.

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Jawa Timur

4.2.1.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Location quotient (LQ) adalah suatu metode untuk menentukan sektor unggulan atau ekonomi basis daerah dan digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*) terutama dari kontribusi. Sektor unggulan daerah, pada dasarnya dapat memberikan kontribusi yang besar pada daerah, bukan hanya untuk daerah itu sendiri tapi juga untuk daerah lain.

Menurut (Tarigan, 2005) *Location quotient* adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Dari keterangan diatas, maka jika nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan di daerah untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ maka sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan untuk dikembangkan sebagai perekonomian daerah.

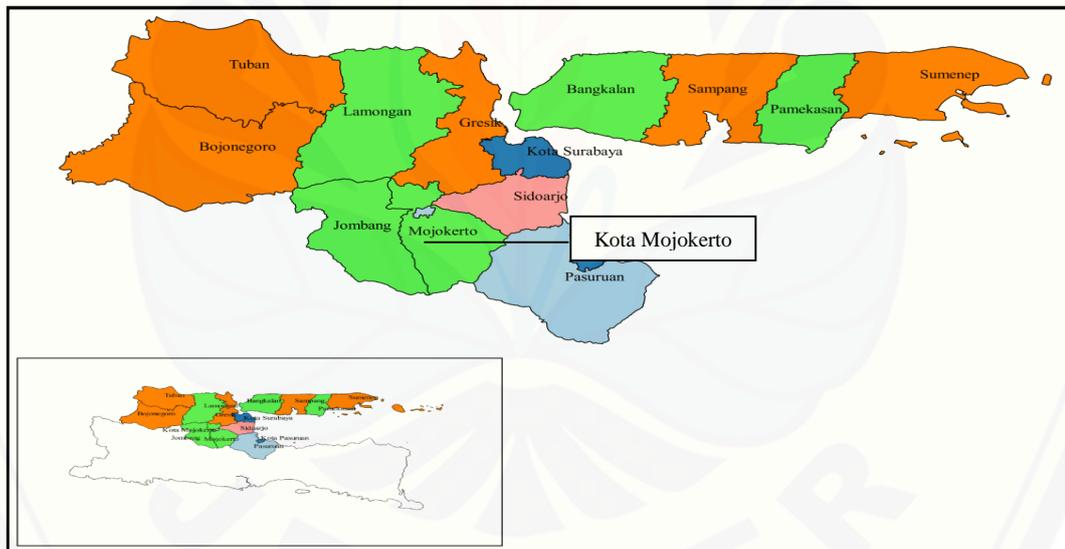
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Provinsi Jawa Timur

No.	SWP 1	Rata-rata LQ Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Surabaya	0.01	0.00	0.85	1.67	2.06	1.35	1.54	1.19	0.97
2	Kab.Tuban	1.89	8.49	0.90	2.25	0.35	0.49	0.26	0.92	0.53
3	Kab.Lamongan	3.40	0.07	0.21	0.83	0.82	0.86	0.23	0.70	0.99
4	Kab.Bojonegoro	1.78	12.85	0.29	0.49	1.06	0.53	0.50	0.88	1.05
5	Kab.Gresik	0.57	2.05	1.99	1.52	0.39	0.69	0.45	0.66	0.55
6	Kab.Sidoarjo	0.22	0.11	1.79	1.02	0.31	0.93	1.71	0.27	0.57
7	Kab.Mojokerto	1.52	0.65	1.45	0.68	0.45	0.80	0.46	0.29	0.83
8	Kota Mojokerto	0.08	0.00	0.60	2.60	0.27	1.16	2.11	1.42	2.14
9	Kab.Jombang	1.96	0.71	0.43	0.77	0.58	1.12	0.61	0.78	1.34
10	Kab.Pasuruan	1.60	0.46	1.27	1.63	0.86	0.71	0.41	0.73	1.07
11	Kota Pasuruan	0.27	0.06	0.65	1.89	2.27	1.14	1.80	1.54	1.33
12	Kab.Bangkalan	2.33	0.71	0.15	0.57	2.12	0.87	0.96	0.84	1.59
13	Kab.Sampang	2.95	4.17	0.04	0.30	0.68	0.84	0.34	0.67	1.34
14	Kab.Pamekasan	3.25	0.54	0.11	0.73	1.43	0.50	0.63	1.27	1.84
15	Kab.Sumenep	3.30	4.50	0.09	0.08	0.53	0.71	0.34	0.87	1.01

Hasil Analisis *location quotient* pada Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa Di Kota Surabaya sektor yang memiliki nilai LQ > 1 adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan indeks rata-rata 1.67; bangunan 2.06; perdagangan, hotel dan restoran 1.35; pengangkutan dan komunikasi 1.54; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.19, hal ini berarti sektor-sektor tersebut merupakan unggulan di Kota Surabaya. Di Kabupaten Tuban adalah sektor pertanian dengan rata-rata 1.89; pertambangan dan penggalian 8.49; listrik, gas dan air bersih 2.25. Di Kabupaten Lamongan adalah hanya sektor pertanian 3.40. Di Kabupaten Bojonegoro adalah pertanian 1,78; pertambangan dan penggalian 12.85; bangunan 1.06; dan jasa-jasa 1.05. Di Kabupaten Gresik adalah sektor pertambangan dan penggalian 2.05; industri pengolahan 1.99; listrik, gas dan air bersih 1.52. Di Kabupaten Sidoarjo adalah industri pengolahan 1.79; listrik, gas dan air bersih 1.02; serta sektor pengangkutan dan komunikasi 1.71. Di Kabupaten Mojokerto adalah pertanian 1.52; dan industri pengolahan 1.45. Di Kabupaten Kota Mojokerto adalah listrik, gas dan air bersih 2.60; perdagangan, hotel dan restoran 1.16; pengangkutan dan komunikasi 2.11; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.42; serta sektor jasa-jasa 2.14. Di Kabupaten Jombang adalah pertanian 1.96; perdagangan, hotel dan restoran 1.12; serta sektor jasa-jasa 1.34. Di Kabupaten Pasuruan adalah pertanian 1.60; industri pengolahan 1.27; listrik, gas dan air bersih 1.63; serta sektor jasa-jasa 1.07. Di Kota Pasuruan adalah listrik, gas dan air bersih 1.89; sektor bangunan 2.27; sektor perdagangan, hotel dan restoran 1.14; pengangkutan dan komunikasi 1.80; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.54; serta sektor jasa 1.33. Di Kabupaten Bangkalan adalah pertanian 2.33; bangunan 2.12; dan sektor jasa 1.59. Di Kabupaten Sampang adalah pertanian 2.95; pertambangan dan penggalian 4.17; dan sektor jasa 1.34. Di Kabupaten Pamekasan adalah pertanian 3.25; bangunan 1.43; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.27; serta sektor jasa 1.84. Hal ini berarti sektor tersebut merupakan unggulan di Kabupaten Pamekasan sebagai penggerak perekonomian daerah. Di Kabupaten Sumenep adalah pertanian 3.30; pertambangan dan penggalian 4.50; dan sektor jasa 1.01.

Semua sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis yang menandakan Kabupaten/Kota di SWP 1 mampu memenuhi sendiri kebutuhannya di sektor ini, dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah. Kegiatan ekonomi pada sektor basis ini menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual keluar daerah yang meningkatkan pendapatan daerah, maka secara berantai akan meningkatkan investasi yang berarti menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara sektor yang mempunyai nilai $LQ < 1$ mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut bukanlah sektor basis. Ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang-barang pada sektor ini di Kabupaten/Kota di SWP 1 belum mampu dicukupi oleh produksi lokal, sehingga dimungkinkan untuk mengimpor dari daerah lain. Meski sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor basis, permintaan akan sektor ini akan naik dengan adanya peningkatan pendapatan pada sektor basis, sehingga sektor ini masih dapat berkembang.



Gambar 4.2 Prioritas Sektor Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Berdasarkan Analisis *Location Quotient*

Keterangan :

- sektor pertanian sebagai sektor unggulan
- sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan
- sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan
- sektor bangunan sebagai sektor unggulan
- sektor listrik gas dan air bersih sebagai sektor unggulan

4.2.1.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Pada analisis *Location Quotient* (LQ) berbeda dengan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dimana LQ menggunakan kriteria kontribusi yaitu untuk melihat seberapa besar kontribusi suatu kegiatan dalam wilayah studi (Kabupaten/Kota) dibandingkan dengan wilayah referensi (Provinsi). Sedangkan model rasio pertumbuhan (MRP) menggunakan kontribusi pertumbuhan yaitu melihat pertumbuhan dari suatu kegiatan, terutama melihat perbedaan pertumbuhan, baik dalam skala yang lebih luas (*district preference*) maupun dalam skala yang lebih kecil (*district study*), (Yusuf, 1999:220). Dalam analisis MRP terdapat dua ukuran pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr). Jika nilai RPr lebih besar dari 1 maka RPr dikatakan (+) dan jika RPr lebih kecil dari 1 dikatakan (-), demikian pula dengan RPs, jika nilai RPs lebih besar dari 1 maka RPs dikatakan (+) dan jika RPs lebih kecil dari 1 dikatakan (-).

Tabel 4.7 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 1 Provinsi Jawa Timur

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74

No.	SWP 1	Rata-rata RPs Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Surabaya	0.18	0.95	0.86	0.65	0.96	0.90	0.90	0.94	1.17
2	Kab.Tuban	1.14	1.88	1.04	1.54	7.57	0.88	0.90	1.09	1.08
3	Kab.Lamongan	1.71	2.10	1.62	1.02	1.05	1.12	0.66	1.28	1.89
4	Kab.Bojonegoro	1.72	1.66	1.73	1.07	1.37	1.03	0.71	1.06	1.05
5	Kab.Gresik	1.29	2.48	1.12	1.66	1.19	1.09	0.70	0.88	1.41
6	Kab.Sidoarjo	0.54	-2.64	0.81	1.42	0.86	0.89	1.17	0.82	1.13
7	Kab.Mojokerto	2.22	1.68	1.20	1.06	1.41	0.85	1.03	1.20	1.31
8	Kota Mojokerto	0.60	0.00	0.78	1.09	0.93	0.81	0.84	0.75	0.99
9	Kab.Jombang	0.96	1.04	0.96	0.88	0.65	1.06	0.99	1.38	0.94
10	Kab.Pasuruan	2.31	0.79	1.24	1.53	0.9	0.86	0.85	0.95	1.18
11	Kota Pasuruan	0.48	-0.24	0.82	0.83	0.95	0.81	0.55	0.78	1.15
12	Kab.Bangkalan	1.46	1.87	1.19	1.04	1.38	0.96	0.53	0.66	1.13
13	Kab.Sampang	1.05	1.49	1.07	1.06	1.18	1.05	0.76	0.97	1.22
14	Kab.Pamekasan	1.90	0.96	1.07	1.02	0.96	1.02	0.88	0.91	1.22
15	Kab.Sumenep	1.40	1.68	1.49	1.02	1.07	1.20	0.80	1.09	1.13

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan hasil analisis MRP pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan sektoral yang dominan pertumbuhan yang artinya tidak ada kegiatan sektoral pada tingkat Provinsi maupun Kota Surabaya mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Namun terdapat satu kegiatan sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Surabaya yakni jasa-jasa dengan tingkat rata-rata pertumbuhannya 1.17. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pertanian; pertambangan dan penggalian, industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kota Surabaya sama-sama memiliki pertumbuhan yang rendah, yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Namun untuk sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pertumbuhannya lebih menonjol di Provinsi.

Di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa sektor bangunan; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan dengan masing-masing tingkat rata-rata pertumbuhannya yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Tuban mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Tuban adalah sektor pertanian dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1.14; pertambangan dan penggalian 1.88; industri pengolahan 1.04; listrik, gas dan air bersih 1.54; dan jasa-jasa 1.08, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran; dan pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Tuban, dan sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten.

Di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Lamongan mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah

Kabupaten Lamongan adalah sektor pertanian 1.71; pertambangan dan penggalian 2.10; industri pengolahan 1.62; listrik, gas dan air bersih 1.02; dan jasa-jasa 1.89, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Lamongan, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Lamongan namun berpotensi untuk Provinsi Jawa Timur.

Di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten memiliki pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan potensial untuk dikembangkan adalah sektor pertanian dengan rata-rata pertumbuhannya 1.72; pertambangan dan penggalian 1.66; industri pengolahan 1.73; listrik, gas dan air bersih 1.07; dan jasa-jasa, kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan Provinsi. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Bojonegoro, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro tersebut namun berpotensi di Provinsi Jawa Timur.

Di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Gresik mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Gresik adalah sektor pertanian 1.29; pertambangan dan penggalian 2.48; industri pengolahan 1.12; listrik, gas dan air bersih 1.66; dan jasa-jasa 1.41, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Gresik,

sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Gresik tersebut namun berpotensi untuk Provinsi Jawa Timur.

Di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa kegiatan sektor Pengangkutan dan komunikasi merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Sidoarjo mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sidoarjo adalah sektor listrik, gas dan air bersih 1.42; dan jasa-jasa 1.13, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan keuangan, persewaan dan jasa pertumbuhannya rendah di Kabupaten Gresik, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sidoarjo namun berpotensi untuk Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya untuk sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan baik di Provinsi maupun Kabupaten memiliki pertumbuhan yang rendah, artinya sektor-sektor tersebut baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten kurang potensial untuk dikembangkan.

Di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Mojokerto mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Mojokerto adalah sektor pertanian 2.22; pertambangan dan penggalian 1.68; industri pengolahan 1.20; listrik, gas dan air bersih 1.06; dan jasa-jasa 1.31, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran pertumbuhannya rendah di Kabupaten Mojokerto dengan rata-rata pertumbuhannya < 1 yakni 0.85, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi > 1 atau 1.40 artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Mojokerto.

Di Kota Mojokerto menunjukkan bahwa tidak terdapat kegiatan sektoral yang dominan pertumbuhan artinya tidak ada kegiatan sektoral pada tingkat Provinsi maupun Kota mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Namun terdapat satu sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota yakni sektor listrik, gas dan air bersih dengan rata-rata pertumbuhannya 1.09 yang mana pertumbuhannya lebih menonjol dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sektor-sektor seperti pertanian; industri pengolahan; jasa-jasa baik di tingkat Provinsi maupun Kota sama-sama memiliki pertumbuhan yang rendah, artinya sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Namun sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pertumbuhannya lebih menonjol di Provinsi dibanding Kota Mojokerto.

Di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa kegiatan sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Jombang mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Jombang adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1.04 yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor seperti bangunan; pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah < 1 di Kabupaten Jombang, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi > 1 artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial dikembangkan di Kabupaten Jombang namun berpotensi untuk Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; serta sektor jasa-jasa baik Provinsi dan Kabupaten Jombang memiliki pertumbuhan yang rendah, artinya sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan.

Di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan sektoral yang dominan pertumbuhan yang artinya tidak ada kegiatan sektoral pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Pasuruan mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Namun terdapat beberapa sektoral yang potensial untuk dikembangkan di

Kabupaten Pasuruan yakni sektor pertanian 2.31; industri pengolahan 1.24; listrik, gas dan air bersih 1.53; dan sektor jasa-jasa 1.18 yang mana pertumbuhannya lebih menonjol dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Pasuruan sama-sama memiliki pertumbuhan yang rendah < 1 , yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Sebaliknya sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pertumbuhannya lebih menonjol di Provinsi dibanding Kabupaten Pasuruan.

Di Kota Pasuruan menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan sektoral yang dominan pertumbuhan yang artinya tidak ada kegiatan sektoral pada tingkat Provinsi maupun Kota Pasuruan mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Namun terdapat satu kegiatan sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Pasuruan yakni sektor jasa-jasa 1.15 yang mana pertumbuhannya lebih menonjol dibandingkan Provinsi. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kota Pasuruan sama-sama memiliki pertumbuhan yang rendah, yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Namun sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pertumbuhannya lebih menonjol di Provinsi.

Di kabupaten Bangkalan menunjukkan kegiatan sektor bangunan merupakan sektor dominan pertumbuhan artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan sektor potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten adalah sektor pertanian 1.46; pertambangan dan penggalian 1.87; industri pengolahan 1.19; listrik, gas dan air bersih 1.04; dan jasa-jasa 1.13, yang mana kegiatannya diharapkan akan memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Mojokerto,

sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Di kabupaten Sampang menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Sampang mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sampang adalah sektor pertanian 1.05; pertambangan dan penggalian 1.49; industri pengolahan 1.07; listrik, gas dan air bersih 1.06; dan jasa-jasa 1.22, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan dan komunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah < 1 di Kabupaten Sampang, sebaliknya tinggi > 1 di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Sampang namun berpotensi untuk Provinsi Jawa Timur.

Di Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Pamekasan mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pamekasan adalah sektor pertanian 1.90; industri pengolahan 1.07; listrik, gas dan air bersih 1.02; dan jasa-jasa 1.22 yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti sektor bangunan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Pamekasan, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Pamekasan namun berpotensi untuk Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya untuk sektor pertambangan dan penggalian baik di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan memiliki pertumbuhan yang rendah, yang artinya sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Pamekasan maupun di tingkat Jawa Timur.

Di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Sumenep mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Sumenep adalah sektor pertanian 1.40; pertambangan dan penggalian 1.68; industri pengolahan 1.49; listrik, gas dan air bersih 1.02; dan jasa-jasa 1.13 yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Sumenep, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Sumenep namun berpotensi untuk Provinsi Jawa Timur.

4.2.1.3 Analisis overlay

Analisis overlay dimaksudkan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Menurut (Yusuf, M. 1999:229) terdapat empat kemungkinan dalam analisis overlay, yakni:

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.
2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk di pacu menjadi kegiatan yang dominan.
3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Kegiatan ini sangat memungkinkan merupakan kegiatan yang sedang mengalami penurunan.
4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kontribusi.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dari pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ) atas Kabupaten/Kota di SWP 1, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 1 Provinsi Jawa Timur

SWP 1		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Surabaya	0.01	-	0.18	-	0.00	-	0.95	-	0.85	-	0.86	-	1.67	+	0.65	-	2.06	+	0.96	-
2	Kab.Tuban	1.89	+	1.14	+	8.49	+	1.88	+	0.90	-	1.04	+	2.25	+	1.54	+	0.35	-	7.57	+
3	Kab.Lamongan	3.40	+	1.71	+	0.07	-	2.10	+	0.21	-	1.62	+	0.83	-	1.02	+	0.82	-	1.05	+
4	Kab.Bojonegoro	1.78	+	1.72	+	12.85	+	1.66	+	0.29	-	1.73	+	0.49	-	1.07	+	1.06	+	1.37	+
5	Kab.Gresik	0.57	-	1.29	+	2.05	+	2.48	+	1.99	+	1.12	+	1.52	+	1.66	+	0.39	-	1.19	+
6	Kab.Sidoarjo	0.22	-	0.54	-	0.11	-	-2.64	-	1.79	+	0.81	-	1.02	+	1.42	+	0.31	-	0.86	-
7	Kab.Mojokerto	1.52	+	2.22	+	0.65	-	1.68	+	1.45	+	1.20	+	0.68	-	1.06	+	0.45	-	1.41	+
8	Kota Mojokerto	0.08	-	0.60	-	0.00	-	0.00	-	0.60	-	0.78	-	2.60	+	1.09	+	0.27	-	0.93	-
9	Kab.Jombang	1.96	+	0.96	-	0.71	-	1.04	+	0.43	-	0.96	-	0.77	-	0.88	-	0.58	-	0.65	-
10	Kab.Pasuruan	1.60	+	2.31	+	0.46	-	0.79	-	1.27	+	1.24	+	1.63	+	1.53	+	0.86	-	0.90	-
11	Kota Pasuruan	0.27	-	0.48	-	0.06	-	-0.24	-	0.65	-	0.82	-	1.89	+	0.83	-	2.27	+	0.95	-
12	Kab.Bangkalan	2.33	+	1.46	+	0.71	-	1.87	+	0.15	-	1.19	+	0.57	-	1.04	+	2.12	+	1.38	+
13	Kab.Sampang	2.95	+	1.05	+	4.17	+	1.49	+	0.04	-	1.07	+	0.30	-	1.06	+	0.68	-	1.18	+
14	Kab.Pamekasan	3.25	+	1.90	+	0.54	-	0.96	-	0.11	-	1.07	+	0.73	-	1.02	+	1.43	+	0.96	-
15	Kab.Sumenep	3.30	+	1.40	+	4.50	+	1.68	+	0.09	-	1.49	+	0.08	-	1.02	+	0.53	-	1.07	+

Sumber: hasil analisis

Lanjutan Tabel 4.8

SWP 1		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n
1	Kota Surabaya	1.35	+	0.90	-	1.54	+	0.90	-	1.19	+	0.94	-	0.97	-	1.17	+
2	Kab.Tuban	0.49	-	0.88	-	0.26	-	0.90	-	0.92	-	1.09	+	0.53	-	1.08	+
3	Kab.Lamongan	0.86	-	1.12	+	0.23	-	0.66	-	0.70	-	1.28	+	0.99	-	1.89	+
4	Kab.Bojonegoro	0.53	-	1.03	+	0.50	-	0.71	-	0.88	-	1.06	+	1.05	+	1.05	+
5	Kab.Gresik	0.69	-	1.09	+	0.45	-	0.70	-	0.66	-	0.88	-	0.55	-	1.41	+
6	Kab.Sidoarjo	0.93	-	0.89	-	1.71	+	1.17	+	0.27	-	0.82	-	0.57	-	1.13	+
7	Kab.Mojokerto	0.80	-	0.85	-	0.46	-	1.03	+	0.29	-	1.20	+	0.83	-	1.31	+
8	Kota Mojokerto	1.16	+	0.81	-	2.11	+	0.84	-	1.42	+	0.75	-	2.14	+	0.99	-
9	Kab.Jombang	1.12	+	1.06	+	0.61	-	0.99	-	0.78	-	1.38	+	1.34	+	0.94	-
10	Kab.Pasuruan	0.71	-	0.86	-	0.41	-	0.85	-	0.73	-	0.95	-	1.07	+	1.18	+
11	Kota Pasuruan	1.14	+	0.81	-	1.80	+	0.55	-	1.54	+	0.78	-	1.33	+	1.15	+
12	Kab.Bangkalan	0.87	-	0.96	-	0.96	-	0.53	-	0.84	-	0.66	-	1.59	+	1.13	+
13	Kab.Sampang	0.84	-	1.05	+	0.34	-	0.76	-	0.67	-	0.97	-	1.34	+	1.22	+
14	Kab.Pamekasan	0.50	-	1.02	+	0.63	-	0.88	-	1.27	+	0.91	-	1.84	+	1.22	+
15	Kab.Sumenep	0.71	-	1.20	+	0.34	-	0.80	-	0.87	-	1.09	+	1.01	+	1.13	+

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa hanya di Kota Surabaya yang tidak terdapat sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya. Sebaliknya untuk sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya ditunjukkan oleh Kabupaten Tuban adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; serta listrik, gas dan air bersih. Di Kabupaten Lamongan adalah pertanian. Di Kabupaten Bojonegoro adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan dan jasa-jasa. Di Kabupaten Gresik adalah penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih. Di Kabupaten Sidoarjo adalah listrik, gas dan air bersih; pengangkutan dan persewaan. Di Kabupaten Mojokerto: pertanian; industri pengolahan. Di Kota Mojokerto adalah listrik, gas dan air bersih. Di Kabupaten Jombang adalah perdagangan. Di Kabupaten Pasurauna adalah pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; jasa-jasa. Di Kabupaten Bangkalan: pertanian; bangunan; jasa-jasa. Di Kabupaten Sampang adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; jasa-jasa. Di Kabupaten Pamekasan adalah pertanian; jasa-jasa. Dan di Kabupaten Sumenep adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; serta jasa-jasa

Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kota Surabaya adalah sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Tuban adalah sektor industri pengolahan; bangunan; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Lamongan adalah pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Di kabupaten Bojonegor adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Gresik adalah sektor pertanian; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Sidoarjo adalah sektor industri pengolahan; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Mojokerto adalah sektor pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Di Kota Mojokerto

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Jombang adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Di Kabupaten Pasuruan adalah tidak terdapat sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan. Di Kota Pasuruan adalah sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Bangkalan adalah sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih. Di Kabupaten Sampang adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran. Di kabupaten Pamekasan adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Sumenep adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Bila dilihat dari sektor yang sedang mengalami penurunan yakni untuk Kota Surabaya terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kabupaten Sidoarjo yakni sektor industri pengolahan. Untuk Kota Mojokerto yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Untuk Kabupaten Jombang yakni sektor pertanian; dan jasa-jasa. Untuk Kota Pasuruan yakni sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Serta di Kabupaten Pamekasan yakni sektor bangunan; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sebaliknya untuk kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep tidak ada sektor yang sedang mengalami penurunan.

Bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya maka di Kota Surabaya adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan. Di Kabupaten Tuban yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Lamongan yakni pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Bojonegoro yakni pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Gresik yakni pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Sidoarjo yakni pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Mojokerto yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran. Di Kota Mojokerto yakni pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; bangunan. Di kabupaten Jombang yakni sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Pasuruan yakni sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kota Pasuruan yakni sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan. Dan di Kabupaten Bangkalan yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran; pangangkutan dan komunikasil dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dan selanjutnya di Kabupaten Sampang yakni sektor pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Pamekasan yakni sektor pertambangan dan penggalian; dan pengangkutan dan komunikasi; serta di Kabupaten Sumenep sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya yakni terdiri dari sektor pengangkutan dan komunikasi.

4.2.1.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

Analisis *Shift-Share* modifikasi *Esteban Marquillas* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi sejak 1960an, analisis ini dapat mendeteksi sektor dan subsektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada suatu wilayah. Sektor ekonomi dikatakan memiliki keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi jika

pertumbuhan dan peranannya disuatu wilayah studi lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan dan peranan sektor yang sama dalam perekonomian preferensi yakni Provinsi Jawa Timur. Maka metode analisis ini ditujukan untuk untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sektor-sektor ekonomi Kabupaten maupun Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Jawa Timur, yang akan dijelaskan pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

5.1.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.9 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	291,968.45	-13,326,547.91	-0.02
2	Kabupaten Tuban	3,994.78	1,145,417.07	0.00
3	Kabupaten Lamongan	34,661.65	2,239,447.08	0.02
4	Kabupaten Bojonegoro	14,653.02	946,408.91	0.02
5	Kabupaten Gresik	-5,601.48	-1,112,142.66	0.00
6	Kabupaten Sidoarjo	29972.367	-3,089,118.79	-0.01
7	Kabupaten Mojokerto	15817.358	611,205.43	0.03
8	Kota Mojokerto	1,569.03	-171,215.06	-0.01
9	Kabupaten Jombang	-991.913	923,301.46	-0.00
10	Kabupaten Pasuruan	17125.173	603,805.14	0.03
11	Kota Pasuruan	1,365.03	-124,194.58	-0.01
12	Kabupaten Bangkalan	3,766.63	688,641.05	0.01
13	Kabupaten Sampang	1,304.78	853,673.60	0.00
14	Kabupaten Pamekasan	14,187.17	727,161.08	0.02
15	Kabupaten Sumenep	13,453.59	1,811,496.99	0.01

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasurua tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompeititf untuk sektor pertanian. Sedangkan untuk Gresik hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif.

5.1.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 4.10 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	31,582.04	-2,018,383.68	-0.02
2	Kabupaten Tuban	57,502.31	1,426,023.10	0.04
3	Kabupaten Lamongan	-3,721.89	-132,633.13	0.02
4	Kabupaten Bojonegoro	109,769.42	2,195,243.00	0.06
5	Kabupaten Gresik	18,041.03	393,292.45	0.05
6	Kabupaten Sidoarjo	98293.106	-530,743.02	-0.19
7	Kabupaten Mojokerto	-1121.519	611,205.43	0.03
8	Kota Mojokerto	-	-28,191.88	-
9	Kabupaten Jombang	124.466	-42,531.54	0.00
10	Kabupaten Pasuruan	1578.698	-83,977.81	-0.02
11	Kota Pasuruan	1,413.86	-24,162.29	-0.06
12	Kabupaten Bangkalan	-355.81	-23,592.64	0.01
13	Kabupaten Sampang	2,169.92	207,281.64	0.01
14	Kabupaten Pamekasan	216.26	-22,826.77	-0.01
15	Kabupaten Sumenep	6,610.86	411,633.43	0.01

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.10 diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pamekasan tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor pertambangan dan penggalian.

5.1.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.11 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Industri Pengolahan di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	25,135.20	-3,305,197.28	-0.01
2	Kabupaten Tuban	-669.68	-229,146.41	0.00
3	Kabupaten Lamongan	-42,450.08	-1,282,531.97	0.03
4	Kabupaten Bojonegoro	-55,680.85	-1,510,312.23	0.04
5	Kabupaten Gresik	23,961.86	4,383,172.98	0.01
6	Kabupaten Sidoarjo	-58768.069	5,498,771.31	-0.01
7	Kabupaten Mojokerto	10278.402	915,383.27	0.01
8	Kota Mojokerto	1,468.06	-128,171.23	-0.01
9	Kabupaten Jombang	1104.044	-943,230.86	0.00
10	Kabupaten Pasuruan	6094.202	473,141.03	0.01
11	Kota Pasuruan	1,062.30	-103,231.02	-0.01
12	Kabupaten Bangkalan	-6,660.65	-765,162.76	0.01
13	Kabupaten Sampang	-2,073.84	-729,449.10	0.00
14	Kabupaten Pamekasan	-2,569.67	-504,435.57	0.00
15	Kabupaten Sumenep	-34,619.26	-1,257,687.72	0.03

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.11 diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor industri pengolahan. Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Dan untuk Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi.

5.1.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.12 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	-18,204.46	841,344.65	-0.02
2	Kabupaten Tuban	4,558.33	144,654.22	0.03
3	Kabupaten Lamongan	-17.18	-14,340.97	0.00
4	Kabupaten Bojonegoro	-211.00	-57,928.32	0.00
5	Kabupaten Gresik	4,491.34	117,057.40	0.04
6	Kabupaten Sidoarjo	181.624	1,791.13	0.02
7	Kabupaten Mojokerto	-104.248	-35,278.48	0.00
8	Kota Mojokerto	165.11	27,535.51	0.01
9	Kabupaten Jombang	139.122	-20,122.32	-0.01
10	Kabupaten Pasuruan	1736.771	57,909.74	0.03
11	Kota Pasuruan	-146.86	13,937.43	-0.01
12	Kabupaten Bangkalan	-33.92	-20,679.35	0.00
13	Kabupaten Sampang	-97.40	-28,468.67	0.00
14	Kabupaten Pamekasan	-6.87	-8,201.17	0.00
15	Kabupaten Sumenep	-50.06	-67,139.12	0.00

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.12 diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya hanya Kabupaten Jombang yang tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor listrik, gas dan air bersih. Sedangkan untuk Kota Surabaya, Kota Pasuruan hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Namun untuk Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi.

5.1.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.13 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Bangunan di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	-12,798.52	3,171,383.07	-0.00
2	Kabupaten Tuban	-119,421.40	-199,181.45	0.54
3	Kabupaten Lamongan	-286.54	-38,794.26	0.01
4	Kabupaten Bojonegoro	390.70	13,872.74	0.03
5	Kabupaten Gresik	-4,736.64	-348,460.74	0.01
6	Kabupaten Sidoarjo	7123.928	-609,063.77	-0.01
7	Kabupaten Mojokerto	-4819.261	-148,074.77	0.03
8	Kota Mojokerto	177.72	-29,924.23	-0.01
9	Kabupaten Jombang	2193.863	-89,143.48	-0.03
10	Kabupaten Pasuruan	139.098	-31,975.07	-0.01
11	Kota Pasuruan	-236.84	47,501.59	-0.00
12	Kabupaten Bangkalan	3,206.49	127,726.47	0.03
13	Kabupaten Sampang	-462.40	-32,203.57	0.01
14	Kabupaten Pamekasan	-94.96	31,158.69	-0.00
15	Kabupaten Sumenep	-333.45	-83,722.62	0.00

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor bangunan. Sedangkan untuk Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif.

5.1.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.14 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	-100,875.01	10,142,071.28	-0.01
2	Kabupaten Tuban	15,806.79	-1,398,084.35	-0.01
3	Kabupaten Lamongan	-3,487.77	-286,458.23	0.01
4	Kabupaten Bojonegoro	-5,711.36	-1,249,439.40	0.00
5	Kabupaten Gresik	-14,708.44	-1,688,358.46	0.01
6	Kabupaten Sidoarjo	4446.980	-569,689.16	-0.01
7	Kabupaten Mojokerto	6745.059	-500,959.61	-0.01
8	Kota Mojokerto	-1,230.53	64,218.91	-0.02
9	Kabupaten Jombang	1436.976	249,664.96	0.01
10	Kabupaten Pasuruan	8338.717	-644,971.55	-0.01
11	Kota Pasuruan	-1,010.57	51,212.26	-0.02
12	Kabupaten Bangkalan	585.78	-152,439.64	0.00
13	Kabupaten Sampang	-666.59	-156,246.24	0.00
14	Kabupaten Pamekasan	-854.81	-357,008.88	0.00
15	Kabupaten Sumenep	-9,964.62	-510,893.70	0.02

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Jombang yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan tidak memiliki keunggulan keduanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan untuk Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Dan untuk Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi.

5.1.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.15 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	-41,363.12	3,777,442.47	-0.01
2	Kabupaten Tuban	4,853.11	-483,286.47	-0.01
3	Kabupaten Lamongan	12,874.82	-366,670.30	-0.04
4	Kabupaten Bojonegoro	8,373.24	-314,251.15	-0.03
5	Kabupaten Gresik	22,797.10	-719,645.38	-0.03
6	Kabupaten Sidoarjo	22948.013	1,429,296.73	0.02
7	Kabupaten Mojokerto	-1093.691	-330,862.77	0.00
8	Kota Mojokerto	-1,692.71	106,637.65	-0.02
9	Kabupaten Jombang	411.653	-193,452.57	0.00
10	Kabupaten Pasuruan	5116.614	-312,428.30	-0.02
11	Kota Pasuruan	-3,350.01	70,992.87	-0.05
12	Kabupaten Bangkalan	336.99	-7,153.93	-0.05
13	Kabupaten Sampang	3,718.14	-148,308.89	-0.03
14	Kabupaten Pamekasan	800.84	-62,778.39	-0.01
15	Kabupaten Sumenep	5,475.75	-266,552.15	-0.02

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.15 diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Sidoarjo Kabupaten yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompeititf untuk sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan untuk Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Dan untuk Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi.

5.1.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.16 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	-4,642.38	956,128.18	0.00
2	Kabupaten Tuban	-308.56	-41,585.72	0.01
3	Kabupaten Lamongan	-2,303.88	-106,761.22	0.02
4	Kabupaten Bojonegoro	-472.88	-56,036.62	0.00
5	Kabupaten Gresik	2,809.69	-325,731.79	-0.01
6	Kabupaten Sidoarjo	15006.970	-1,083,805.13	-0.01
7	Kabupaten Mojokerto	-4985.929	-318,909.37	0.02
8	Kota Mojokerto	-607.78	30,064.89	-0.02
9	Kabupaten Jombang	-2401.212	-82,051.83	0.03
10	Kabupaten Pasuruan	412.876	-103,563.68	0.00
11	Kota Pasuruan	-597.85	34,794.71	-0.02
12	Kabupaten Bangkalan	777.04	-31,009.67	-0.03
13	Kabupaten Sampang	128.37	-54,028.57	0.00
14	Kabupaten Pamekasan	-217.33	32,994.22	-0.01
15	Kabupaten Sumenep	-266.03	-39,712.88	0.01

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.16 diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kota Surabaya yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pamekasan hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Dan untuk Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi.

5.1.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.17 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 1

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kota Surabaya	-2,460.11	-238,240.79	0.01
2	Kabupaten Tuban	-1,667.59	-364,809.97	0.004
3	Kabupaten Lamongan	-831.67	-11,256.99	0.04
4	Kabupaten Bojonegoro	23.43	32,443.06	0.002
5	Kabupaten Gresik	-13,793.02	-699,183.80	0.02
6	Kabupaten Sidoarjo	-5767.310	-1,047,439.30	0.01
7	Kabupaten Mojokerto	-1918.402	-128,070.59	0.01
8	Kota Mojokerto	-101.71	129,045.44	-0.000
9	Kabupaten Jombang	-443.799	197,566.18	-0.002
10	Kabupaten Pasuruan	440.296	42,060.49	0.01
11	Kota Pasuruan	217.29	33,149.03	0.01
12	Kabupaten Bangkalan	1,194.79	183,670.48	0.01
13	Kabupaten Sampang	767.63	87,749.81	0.01
14	Kabupaten Pamekasan	1,730.34	163,936.81	0.01
15	Kabupaten Sumenep	34.06	2,577.79	0.01

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.17 diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya tidak ada Kabupaten/Kota yang tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor jasa-jasa. Sedangkan untuk Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Dan untuk Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi.

4.2.1.5 Analisis Tipologi Klassen

Metode *Klassen Tipology* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di Wilayah Pengembangan 1 Jawa Timur. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah.

Tabel 4.18 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP I Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP I	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kota Surabaya	34.076.381.42	7.03	1
2	Kabupaten Tuban	8.105.861.03	6.55	2
3	Kabupaten Lamongan	5.628.494.40	6.85	2
4	Kabupaten Bojonegoro	7.145.995.80	8.42	2
5	Kabupaten Gresik	15.270.251.88	7.63	1
6	Kabupaten Sidoarjo	14.211.958.71	6.32	3
7	Kabupaten Mojokerto	8.182.523.00	6.63	2
8	Kota Mojokerto	10.242.097.62	6.33	3
9	Kabupaten Jombang	5.602.771.20	6.33	4
10	Kabupaten Pasuruan	4.870.750.60	6.53	4
11	Kota Pasuruan	6.332.848.20	6.00	4
12	Kabupaten Bangkalan	3.979.221.52	5.87	4
13	Kabupaten Sampang	3.482.656.52	5.58	4
14	Kabupaten Pamekasan	2.868.120.82	5.95	4
15	Kabupaten Sumenep	5.358.250.87	5.82	4
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tirmur (diolah)

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan 1 Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa dari lima belas daerah tersebut hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang masuk dalam kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and growth region*), merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan dan perndapatan perkapita Provinsi. Seperti yang terlihat pada Tabel dibawah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

rata-rata Kota Surabaya sebesar 7.03% dan Rp. 34.074.381,42 dan Kabupaten Gresik pertumbuhannya sebesar 7.63% dan pendapatan perkapitanya Rp. 15.270.251,88 yang mana lebih besar dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan ekonomi rata-rata Provinsi yakni sebesar 6.54% dan Rp. 9.733.686,88.

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kuadran II terdiri dari Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto. Dan yang termasuk dalam kuadran III yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto. Dan untuk Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kuadran IV yakni Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pakekasan serta Kabupaten Sumenep. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.33 sebagai berikut:

4.2.1.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 1 Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kemudian sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031 Kabupaten/Kota di SWP 1 memiliki fungsi-fungsi ekonomi seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa. Sehingga untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi disatuan wilayah pengembangan 1 maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Sehingga dengan dilakukannya perbandingan tersebut diharapkan akan diketahui sektor-sektor basis pendukung utama perekonomian didaerah tersebut. Yang menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu

mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut.

Berdasarkan data hasil analisis LQ dan MRP dari tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di SWP 1 memiliki beberapa sektor basis/prioritas dilihat dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya adalah Sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor prioritas ekonomi basis utama yang dominan, yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 1 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya.

Sektor pertanian menjadi sektor prioritas takterlepas dari sektor-sektor pendukungnya misalnya sektor industri pengolahan Kabupaten/Kota yang berada di SWP 1 pada tahun 2009-2013 sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang positif, tentunya pertumbuhan sektor industri tersebut akan berdampak pada permintaan yang tinggi pula terhadap sektor pertanian. Sektor lain yang memiliki kontribusi dan laju pertumbuhan tinggi adalah sektor jasa-jasa, hal ini dimungkinkan naiknya anggaran belanja pemerintah dan perkembangan yang terjadi pada jasa swasta, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan perkapita suatu wilayah tidak terlepas dari adanya transformasi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor industri dan sektor jasa. Adanya perubahan tersebut mengakibatkan terbentuknya spesialisasi. Perubahan pada sektor tersebut mengakibatkan meningkatnya pendapatan perkapita. Meningkatnya pendapatan perkapita akan mengakibatkan permintaan terhadap komoditi yang dihasilkan sektor sekunder dan tersier lebih cepat dibandingkan dengan permintaan dari sektor primer. Daerah yang memiliki basis sektor pertanian diantaranya Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Itu membuktikan bahwa disatuan wilayah pengembangan 1 terdapat daerah-daerah yang memiliki lahan subur untuk sektor pertanian. Namun untuk Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Kota Pasuruan, menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor

non basis, kecuali untuk Kabupaten Jombang sektor pertanian merupakan sektor basis namun berdasarkan rata-rata pertumbuhannya yang negatif.

Sektor pertambangan dan penggalian yang didukung oleh Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang dan Sumenep. Sektor industri pengolahan didukung oleh Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan. Sektor listrik, gas dan air bersih didukung oleh Kabupaten Tuban, Gresik, Sidoarjo, Kota Mojokerto dan Pasuruan. Sektor Bangunan didukung oleh Kabupaten Bojonegoro dan Bangkalan. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran didukung oleh Kabupaten Jombang. Sektor pengangkutan dan komunikasi didukung oleh Kabupaten Sidoarjo. Sektor yang terahir adalah sektor jasa-jasa yang didukung oleh Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Jika hasil analisis tersebut dihubungkan dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan oleh RTRW dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur dimana satuan wilayah pengembangan 1 memiliki fungsi ekonomi seperti pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa maka dapat disimpulkan bahwa disektor pertanian terdapat 9 Kabupaten/Kota yang sudah sesuai dengan kriteria fungsi ekonomi yang telah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur di antaranya Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

Di sektor pertambangan dan penggalian terdapat Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Gresik, Sampang, Sumenep. Di sektor industri terdapat Kabupaten Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Di sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya terdapat Kabupaten Jombang. Di sektor pengangkutan dan komunikasi hanya terdapat Kabupaten Sidoarjo. Kemudian disektor jasa-jasa terdapat Kabupaten Bojonegoro, Pasuruan, Kota Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan kabupaten Sumenep. Sehingga bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan lagi terhadap faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.19 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 1		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 1				Fungsi Wilayah SWP 1				Fungsi Wilayah SWP 1											
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Surabaya	0.01	-	0.18	-	0.00	-	0.95	-	0.85	-	0.86	-	1.67	+	0.65	-	2.06	+	0.96	-
2	Kab.Tuban	1.89	+	1.14	+	8.49	+	1.88	+	0.90	-	1.04	+	2.25	+	1.54	+	0.35	-	7.57	+
3	Kab.Lamongan	3.40	+	1.71	+	0.07	-	2.10	+	0.21	-	1.62	+	0.83	-	1.02	+	0.82	-	1.05	+
4	Kab.Bojonegoro	1.78	+	1.72	+	12.85	+	1.66	+	0.29	-	1.73	+	0.49	-	1.07	+	1.06	+	1.37	+
5	Kab.Gresik	0.57	-	1.29	+	2.05	+	2.48	+	1.99	+	1.12	+	1.52	+	1.66	+	0.39	-	1.19	+
6	Kab.Sidoarjo	0.22	-	0.54	-	0.11	-	-2.64	-	1.79	+	0.81	-	1.02	+	1.42	+	0.31	-	0.86	-
7	Kab.Mojokerto	1.52	+	2.22	+	0.65	-	1.68	+	1.45	+	1.20	+	0.68	-	1.06	+	0.45	-	1.41	+
8	Kota Mojokerto	0.08	-	0.60	-	0.00	-	0.00	-	0.60	-	0.78	-	2.60	+	1.09	+	0.27	-	0.93	-
9	Kab.Jombang	1.96	+	0.96	-	0.71	-	1.04	+	0.43	-	0.96	-	0.77	-	0.88	-	0.58	-	0.65	-
10	Kab.Pasuruan	1.60	+	2.31	+	0.46	-	0.79	-	1.27	+	1.24	+	1.63	+	1.53	+	0.86	-	0.90	-
11	Kota Pasuruan	0.27	-	0.48	-	0.06	-	-0.24	-	0.65	-	0.82	-	1.89	+	0.83	-	2.27	+	0.95	-
12	Kab.Bangkalan	2.33	+	1.46	+	0.71	-	1.87	+	0.15	-	1.19	+	0.57	-	1.04	+	2.12	+	1.38	+
13	Kab.Sampang	2.95	+	1.05	+	4.17	+	1.49	+	0.04	-	1.07	+	0.30	-	1.06	+	0.68	-	1.18	+
14	Kab.Pamekasan	3.25	+	1.90	+	0.54	-	0.96	-	0.11	-	1.07	+	0.73	-	1.02	+	1.43	+	0.96	-
15	Kab.Sumenep	3.30	+	1.40	+	4.50	+	1.68	+	0.09	-	1.49	+	0.08	-	1.02	+	0.53	-	1.07	+

Lanjutan Tabel 4.19 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 1		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		Fungsi Wilayah SWP 1				Fungsi Wilayah SWP 1								Fungsi Wilayah SWP 1			
		LQ	n	RP _s	n	LQ	n	RP _s	n	LQ	n	RP _s	n	LQ	n	RP _s	n
1	Kota Surabaya	1.35	+	0.90	-	1.54	+	0.90	-	1.19	+	0.94	-	0.97	-	1.17	+
2	Kab.Tuban	0.49	-	0.88	-	0.26	-	0.90	-	0.92	-	1.09	+	0.53	-	1.08	+
3	Kab.Lamongan	0.86	-	1.12	+	0.23	-	0.66	-	0.70	-	1.28	+	0.99	-	1.89	+
4	Kab.Bojonegoro	0.53	-	1.03	+	0.50	-	0.71	-	0.88	-	1.06	+	1.05	+	1.05	+
5	Kab.Gresik	0.69	-	1.09	+	0.45	-	0.70	-	0.66	-	0.88	-	0.55	-	1.41	+
6	Kab.Sidoarjo	0.93	-	0.89	-	1.71	+	1.17	+	0.27	-	0.82	-	0.57	-	1.13	+
7	Kab.Mojokerto	0.80	-	0.85	-	0.46	-	1.03	+	0.29	-	1.20	+	0.83	-	1.31	+
8	Kota Mojokerto	1.16	+	0.81	-	2.11	+	0.84	-	1.42	+	0.75	-	2.14	+	0.99	-
9	Kab.Jombang	1.12	+	1.06	+	0.61	-	0.99	-	0.78	-	1.38	+	1.34	+	0.94	-
10	Kab.Pasuruan	0.71	-	0.86	-	0.41	-	0.85	-	0.73	-	0.95	-	1.07	+	1.18	+
11	Kota Pasuruan	1.14	+	0.81	-	1.80	+	0.55	-	1.54	+	0.78	-	1.33	+	1.15	+
12	Kab.Bangkalan	0.87	-	0.96	-	0.96	-	0.53	-	0.84	-	0.66	-	1.59	+	1.13	+
13	Kab.Sampang	0.84	-	1.05	+	0.34	-	0.76	-	0.67	-	0.97	-	1.34	+	1.22	+
14	Kab.Pamekasan	0.50	-	1.02	+	0.63	-	0.88	-	1.27	+	0.91	-	1.84	+	1.22	+
15	Kab.Sumenep	0.71	-	1.20	+	0.34	-	0.80	-	0.87	-	1.09	+	1.01	+	1.13	+

Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* modifikasi Esteban Marquillas menunjukkan bahwa sektor-sektor yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi didominasi 5 sektor diantaranya yakni sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut ditunjukkan oleh efek alokasi, efek alokasi merupakan komponen shift-share yang menunjukkan apakah suatu daerah terspesialisasi dengan sektor perekonomian yang ada dimana akan diperoleh keunggulan kompetitif. Semakin besar nilai efek alokasi semakin baik pendapatan atau kesempatan kerja didistribusikan di antara sektor perekonomian dengan keunggulan masing-masing.

Sektor pertanian di satuan wilayah pengembangan 1 merupakan salah satu sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Keunggulan tersebut didukung oleh beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dimana daerah-daerah tersebut merupakan daerah subur untuk lahan pertanian dan subsektor pertanian. Di Kabupaten Tuban dengan luas panen dan produksi padi sawah dan ladang sebesar 80.655 Ha dengan total produksi 503.395 ton, di Kabupaten Lamongan 144.910 Ha dengan total produksi 846.275 ton, di Kabupaten Bojonegoro 143.302 ha dengan total produksi 806.548 ton, di Kabupaten Mojokerto 51.420 Ha total produksi 316.213 ton, di Kabupaten Jombang 72.117 Ha total produksi 432.173 ton, di Kabupaten Pasuruan 95.594 Ha total produksi 624.198 ton, di Kabupaten Bangkalan 46.539 ha total produksi 295.178 ton, di Kabupaten Sampang 39.883 total produksi 217.955, di Kabupaten Pamekasan 25.656 total produksi 148.663, di Kabupaten Sumenep 31.986 Ha total produksi 205.636 ton.

Jika dilihat dari kontribusi sektor ini terhadap PDRB juga masih menunjukkan dominasinya dibanding dengan sektor-sektor lainnya. Sektor ini juga banyak memberikan sumbangannya berupa produksi makanan pokok misal padi, jagung, yang setiap hektarnya dikonsumsi masyarakat, sehingga hasil yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakatnya sangat diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.20 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 1 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kota Surabaya	Spes	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	NS
	Comp	CD	CD	CD	CD	CA	CD	CD	CA	CA
2. Kabupaten Tuban	Spes	S	S	NS	S	NS	NS	NS	NS	NS
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CD	CA	CA
3. Kabupaten Lamongan	Spes	S	NS							
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA
4. Kabupaten Bojonegoro	Spes	S	S	NS	NS	S	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA
5. Kabupaten Gresik	Spes	NS	S	S	S	NS	NS	NS	NS	NS
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CD	CA
6. Kabupaten Sidoarjo	Spes	NS	NS	S	S	NS	NS	S	NS	NS
	Comp	CD	CD	CD	CA	CD	CD	CA	CD	CA
7. Kabupaten Mojokerto	Spes	S	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CD	CA	CA
8. Kota Mojokerto	Spes	NS	NS	NS	S	NS	S	S	S	S
	Comp	CD	CD	CD	CA	CD	CD	CD	CD	CD
9. Kabupaten Jombang	Spes	S	NS	NS	NS	NS	S	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CD	CD	CA	CA	CA	CD
10. Kabupaten Pasuruan	Spes	S	NS	S	S	NS	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CD	CA	CA	CD	CD	CD	CA	CA
11. Kota Pasuruan	Spes	NS	NS	NS	S	S	S	S	S	S
	Comp	CD	CD	CD	CD	CA	CD	CD	CD	CA
12. Kabupaten Bangkalan	Spes	S	NS	NS	NS	S	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CD	CA
13. Kabupaten Sampang	Spes	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA
14. Kabupaten Pamekasan	Spes	S	NS	NS	NS	S	NS	NS	S	S
	Comp	CA	CD	CA	CA	CA	CA	CD	CD	CA
15. Kabupaten Sumenep	Spes	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA

Sumber: BPS Jawa Timur (diolah)

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

S : Specialized.

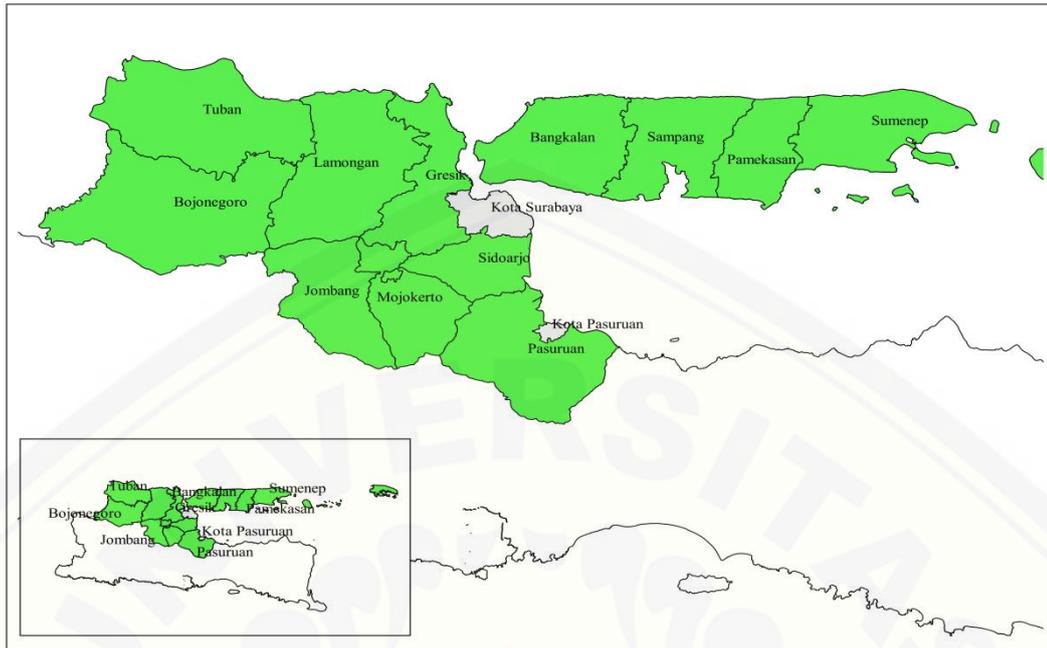
NS : Not Specialized.

Berdasarkan hasil analisis *Tipologi Klassen* menunjukkan bahwa tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 didominasi oleh daerah dengan klasifikasi atau kuadran ke 4 yang diantaranya terdapat 7 daerah dari 15 daerah Kabupaten/Kota, diantaranya yakni Kabupaten Jombang, Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep yang artinya satuan wilayah pengembangan 1 merupakan wilayah yang didominasi oleh daerah tertinggal (low growth and low income) atau disebut juga sebagai daerah relative tertinggal (relatively backward region), yang ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan dan PDRB perkapita Jawa Timur.

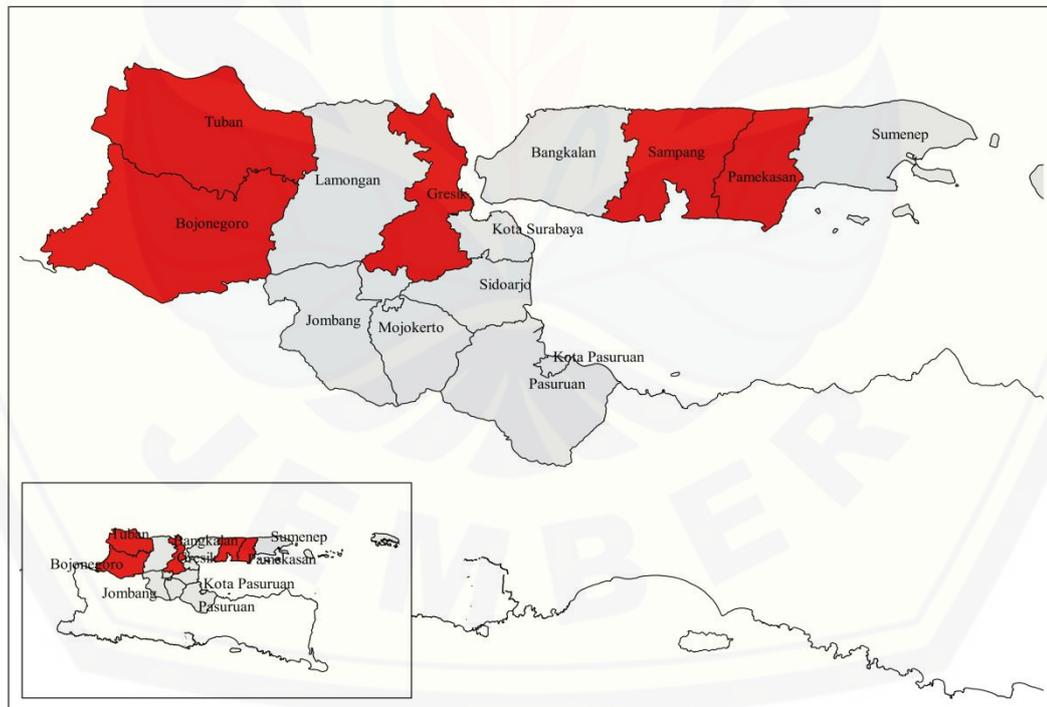
Faktor-faktor yang turut mempengaruhi daerah-daerah tertinggal tersebut seperti terjadi penurunan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang akhirnya mempengaruhi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten/Kota. Kemudian untuk klasifikasi atau kuadran ke 3 hanya terdiri dari 2 daerah yakni Kabupaten Sidoarjo dan Kota Mojokerto. Kemudian daerah yang berada di klasifikasi atau kuadran ke 2 terdiri dari 4 daerah diantaranya Kabupaten Mojokerto, Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Sedangkan di urutan klasifikasi atau kuadran ke 1 hanya terdapat Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.

Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Berkembang
1. Kota Surabaya 2. Kabupaten Gresik	1. Kabupaten Mojokerto 2. Kabupaten Bojonegoro 3. Kabupaten Tuban 4. Kabupaten Lamongan
Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal
1. Kabupaten Sidoarjo 2. Kota Mojokerto	1. Kabupaten Jombang 2. Kabupaten Pasuruan 3. Kota Pasuruan 4. Kabupaten Bangkalan 5. Kabupaten Sampang 6. Kabupaten Pamekasan 7. Kabupaten Sumenep

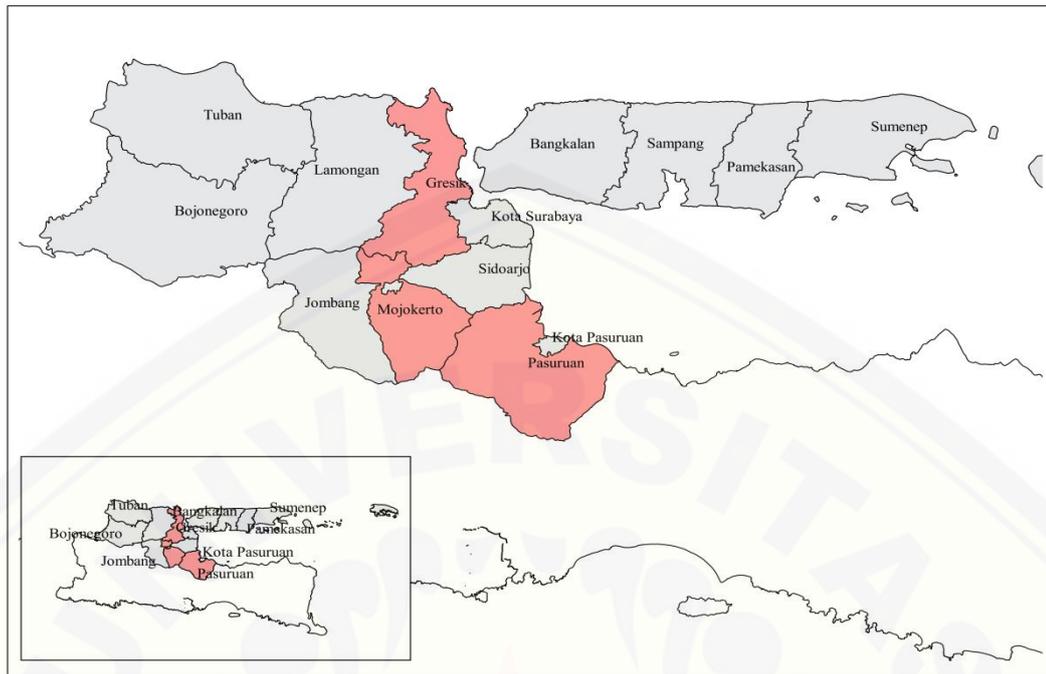
Gambar 4.21 Tipologi Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan I



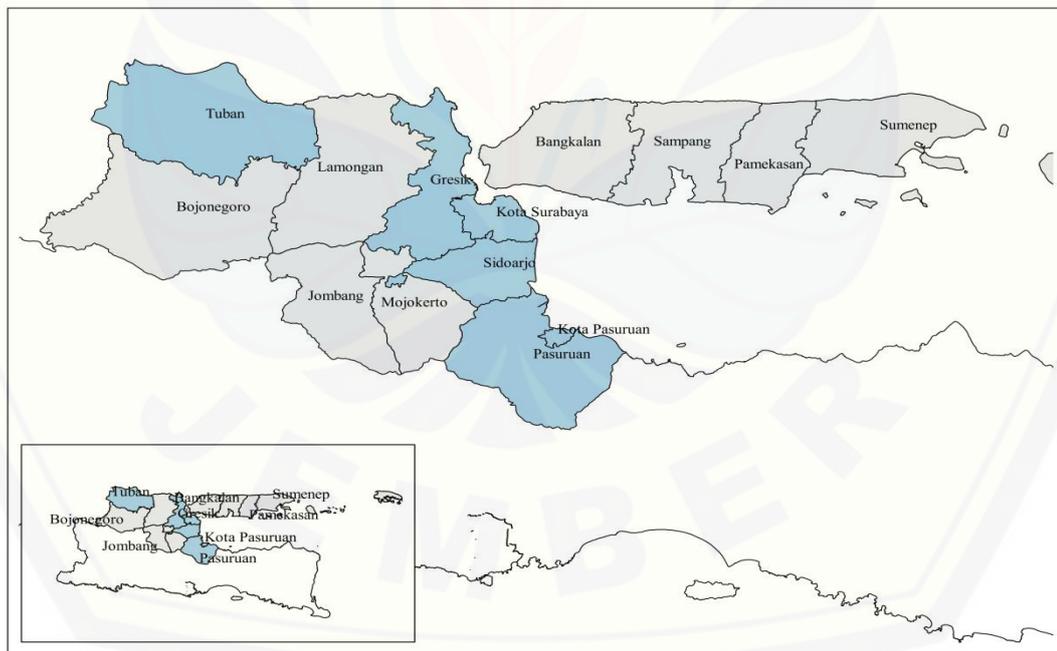
Gambar 4.3 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian



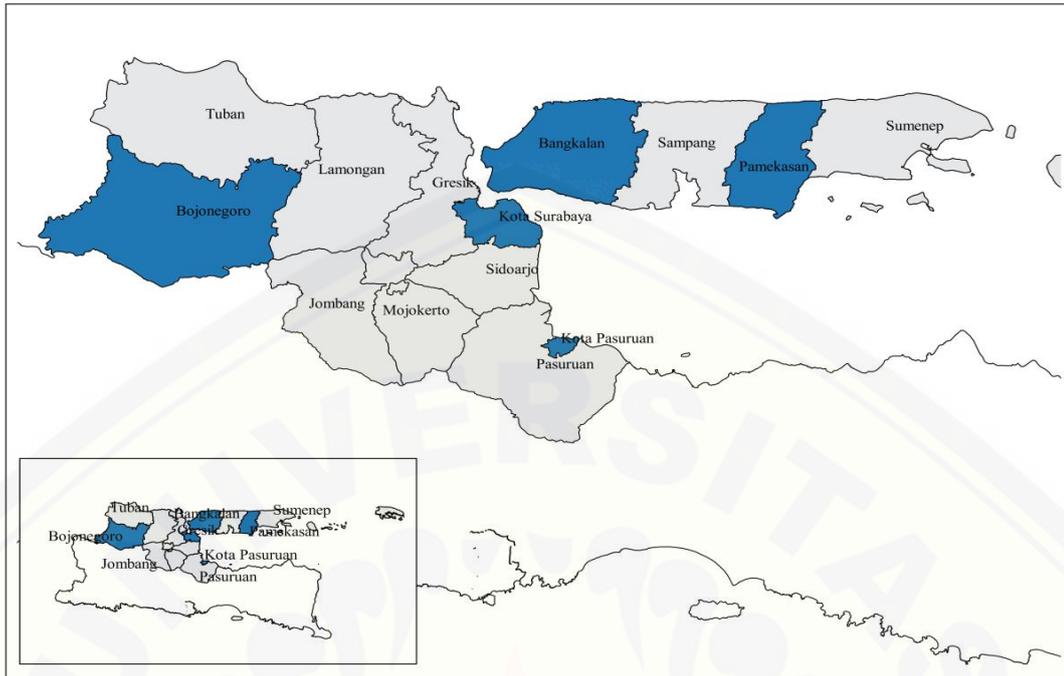
Gambar 4.4 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertambangan dan Penggalian



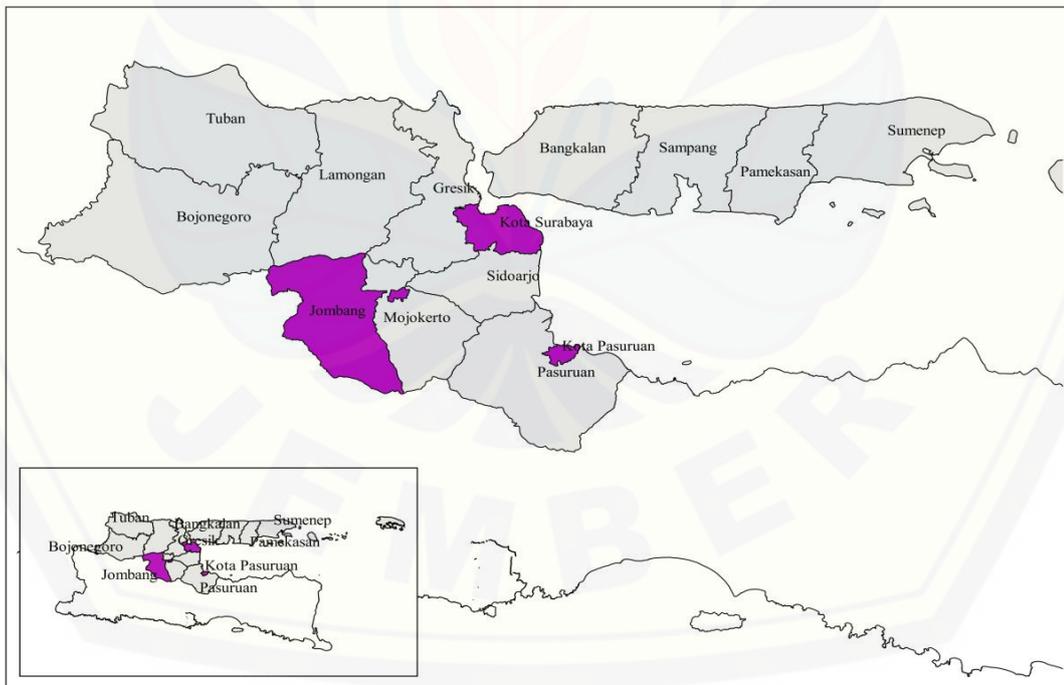
Gambar 4.5 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi di Sektor Industri Pengolahan



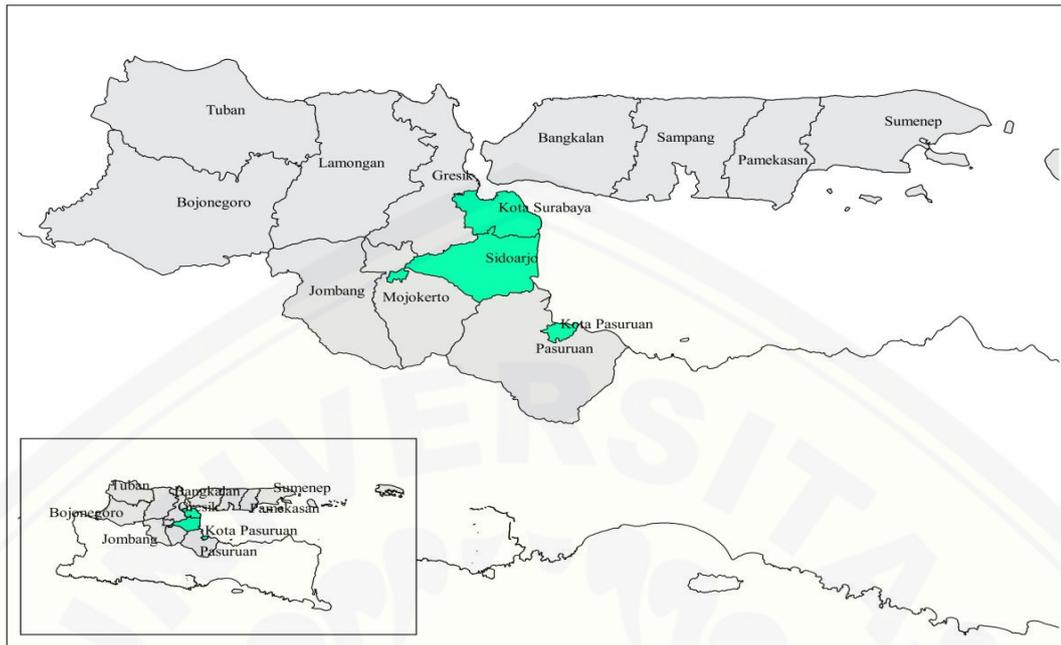
Gambar 4.6 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi di Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih



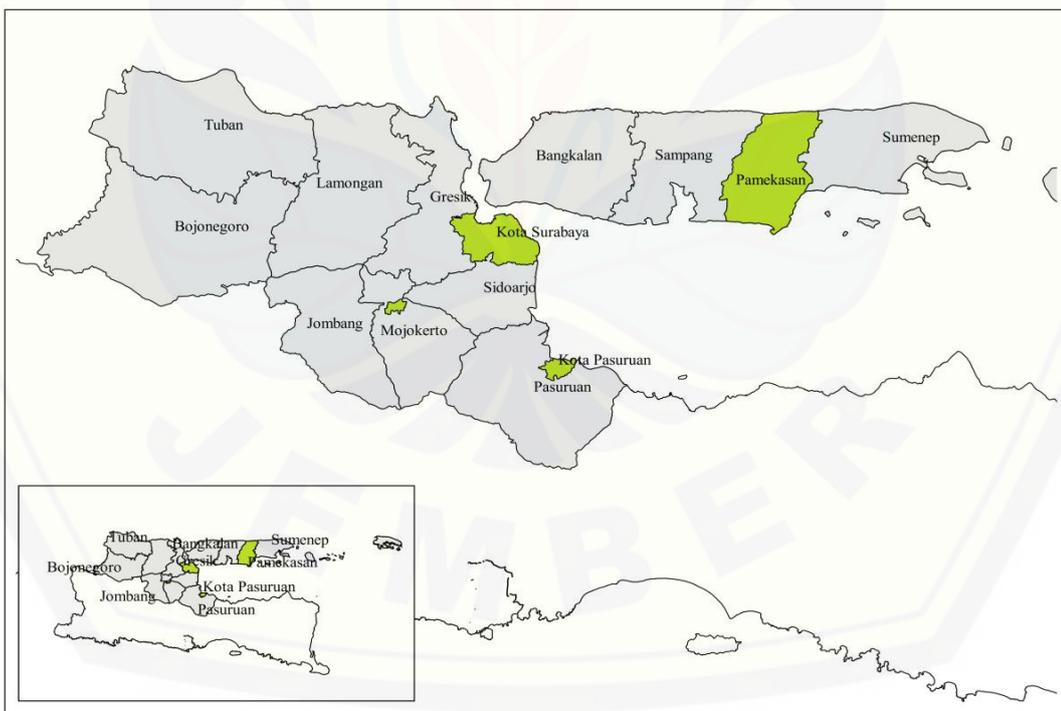
Gambar 4.7 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Bangunan



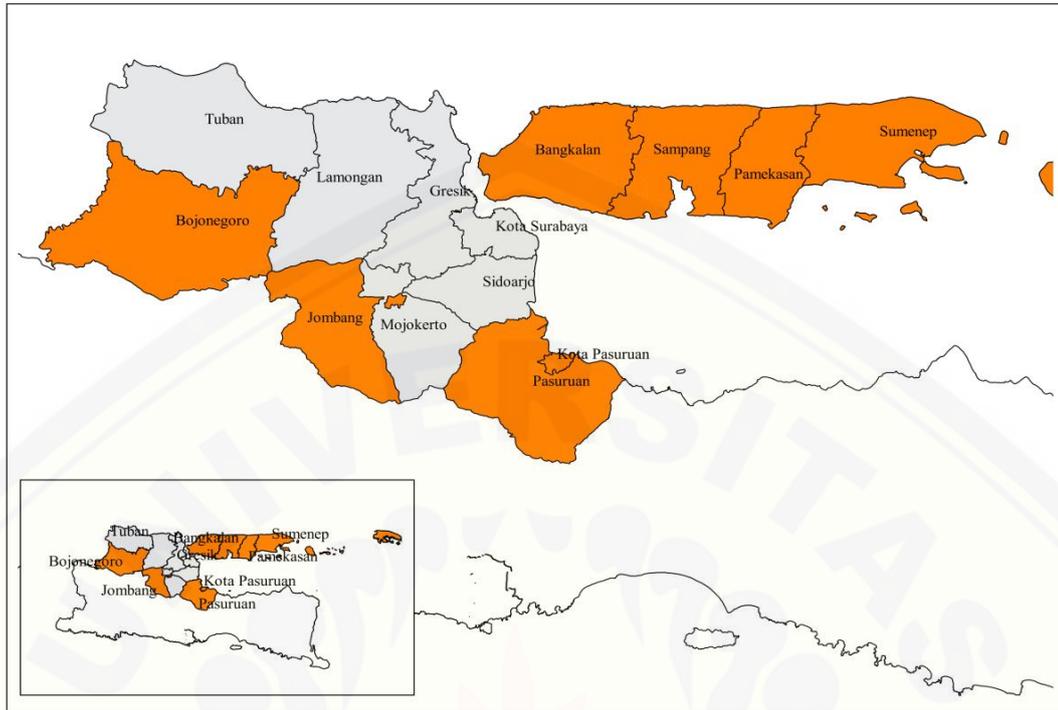
Gambar 4.8 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran



Gambar 4.9 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



Gambar 4.10 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan



Gambar 4.11 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Jasa-jasa

4.2.2 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Jawa Timur

4.2.2.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari Tahun 2009-2013 untuk Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 2 Jawa Timur dapat diketahui pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Jawa Timur

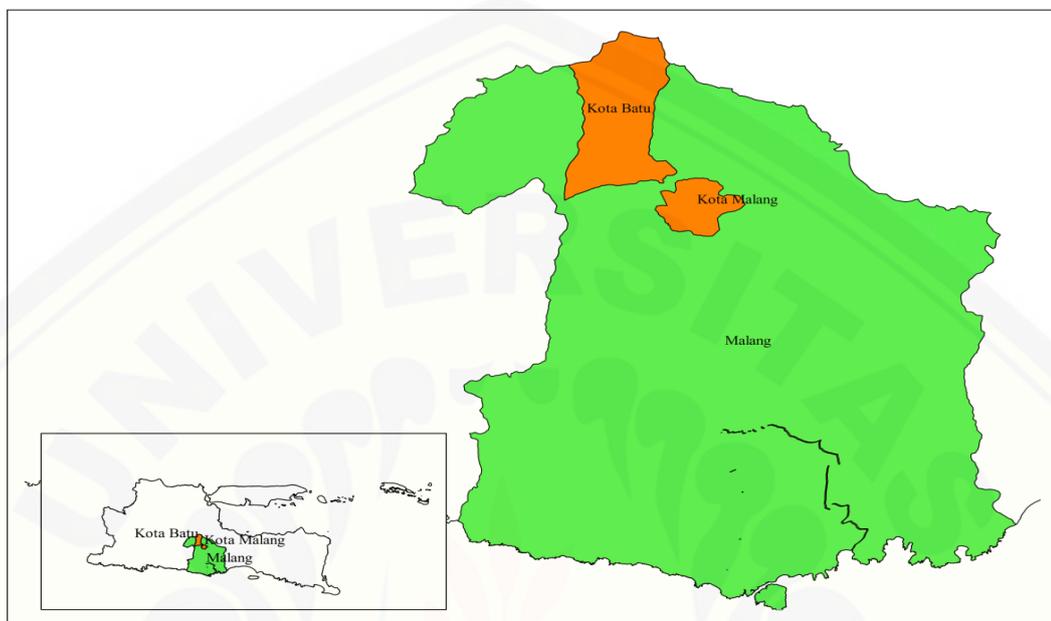
No.	SWP 2	Rata-rata LQ Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Malang	2.04	1.21	0.73	0.54	0.58	0.83	0.43	0.78	1.47
2	Kota Batu	1.37	0.10	0.28	1.16	0.53	1.49	0.48	0.83	1.61
3	Kota Malang	0.02	0.02	1.19	1.26	0.82	1.30	0.43	1.39	1.48

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013 (diolah)

Hasil Analisis *location quotient* menunjukkan bahwa:

Di Kabupaten Malang mempunyai kegiatan potensial yang dapat dikembangkan, dengan pengertian sektor tersebut mempunyai tingkat basis lebih besar dari sektor yang sama di tingkat provinsi, sektor tersebut adalah sektor pertanian 2.04; pertambangan dan penggalian 1.21; dan jasa-jasa 1.47, hal ini berarti sektor-sektor tersebut merupakan unggulan di Kabupaten Malang dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian. Di Kota Malang adalah kegiatan industri pengolahan 1.19; listrik, gas dan air bersih 1.26; perdagangan, hotel dan restoran 1.30; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.39; serta jasa-jasa 1.48. Di Kota Batu adalah pertanian 1.37; listrik, gas dan air bersih 1.16; perdagangan, hotel dan restoran 1.49; serta jasa-jasa 1.61.

Adapun prioritas sektor basis utama yang merupakan unggulan dari Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Jawa Timur dalam bentuk peta tematik:



Gambar 4.12 Prioritas Sektor Basis Berdasarkan Analisis Location Quotient

4.2.2.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel 4.22 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74

		Rata-rata RPs Tiap Sektor								
No.	SWP 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Malang	1.85	1.00	1.53	1.26	1.50	0.91	0.83	1.04	1.22
2	Kota Batu	2.28	1.33	1.21	1.53	1.72	0.94	0.85	1.11	1.62
3	Kota Malang	-0.76	-0.71	0.98	1.00	1.29	0.89	0.73	0.86	1.16

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.22 diatas menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan

pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Malang mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Malang adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran; dan pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Malang, dan tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Malang tersebut.

Di Kota Malang menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kota Malang mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Malang adalah sektor jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran; dan pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kota Malang, dan tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Malang tersebut. Sebaliknya untuk sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kota Malang memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kota Batu menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kota Batu mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Batu adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang

mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kota Batu, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Batu namun berpotensi untuk Provinsi Jatim.

4.2.2.3 Analisis Overlay

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dari pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ) atas Kabupaten/Kota di SWP 2, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.23 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur

SWP 2		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kab.Malang	2.04	+	1.85	+	1.21	+	1.00	+	0.73	-	1.53	+	0.54	-	1.26	+	0.58	-	1.50	+
2	Kota Batu	1.37	+	2.28	+	0.10	-	1.33	+	0.28	-	1.21	+	1.16	+	1.53	+	0.53	-	1.72	+
3	Kota Malang	0.02	-	-0.76	-	0.02	-	-0.71	-	1.19	+	0.98	-	1.26	+	1.00	+	0.82	-	1.29	+

Lanjutan Tabel 4.23 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur

SWP 2		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kab.Malang	0.83	-	0.91	-	0.43	-	0.83	-	0.78	-	1.04	+	1.47	+	1.22	+
2	Kota Batu	1.49	+	0.94	-	0.48	-	0.85	-	0.83	-	1.11	+	1.61	+	1.62	+
3	Kota Malang	1.30	+	0.89	-	0.43	-	0.73	-	1.39	+	0.86	-	1.48	+	1.16	+

Sumber: hasil analisis (diolah)

Dari Tabel 4.23 diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya di tunjukkan oleh Kabupaten Malang adalah pertanian; pertambangan dan penggalian; serta sektor jasa-jasa. Di Kota Malang adalah sektor Jasa-jasa. Di Kota Batu adalah sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; serta sektor jasa-jasa.

Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kabupaten Malang adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; dan keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan. Di Kota Malang yakni sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kota Batu adalah sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Bila dilihat dari sektor yang sedang mengalami penurunan yakni untuk Kota Malang yakni industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kota Batu yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya maka untuk Kota Malang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan pengangkutan dan komunikasi. Di Kota Malang yakni sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; dan pengangkutan dan komunikasi. Selanjutnya untuk Kota Batu hanya sektor pengangkutan dan komunikasi.

4.2.2.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

4.2.2.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.24 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian Di SWP 2

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	39431.350	2,280,452.68	0.02
2	Kota Malang	90,910.33	-2,088,130.51	-0.04
3	Kota Batu	2,066.22	79,345.35	0.03

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang tidak memiliki keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi atas sektor

pertanian yakni Kota Malang, sebaliknya untuk Kabupaten Malang dan Kota Batu justru memiliki kedua-duanya baik keunggulan kompetitif maupun spesialisasi.

4.2.2.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 4.25 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian Di SWP 2

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	-452.288	70,015.43	-0.006
2	Kota Malang	25,078.06	-317,425.64	-0.081
3	Kota Batu	-146.49	-29,804.01	0.003

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa Kabupaten/Kota di SWP 2 tidak ada yang mempunyai keunggulan kedua-duanya baik kompetitif maupun spesialisasi. Kabupaten Malang berspesialisasi untuk sektor pertambangan dan penggalian namun tidak kompetitif. Sedangkan kota Malang tidak berkompetitif maupun spesialisasi. Sedangkan untuk Kota Batu tidak memiliki keunggulan spesialisasi namun kompetitif untuk sektor pertambangan dan penggalian.

4.2.2.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.26 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Industri Pengolahan Di SWP 2

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	-29668.316	-1,044,670.47	0.028
2	Kota Malang	-684.42	716,818.33	-0.001
3	Kota Batu	-2,846.29	-271,270.10	0.010

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor industri pengolahan yakni Kabupaten Malang, dan Kota Batu, namun tidak memiliki keunggulan spesialisasi. Sedangkan Kota Malang hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif untuk sektor industri pengolahan.

4.2.2.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.27 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	-1359.573	-94,965.03	0.014
2	Kota Malang	12.94	51,184.52	0.000
3	Kota Batu	96.29	3,096.48	0.030

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, Kota Malang dan Kota Batu sama-sama memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif. Namun sebaliknya untuk Kabupaten Malang hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor listrik, gas dan air bersih.

4.2.2.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.28 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Bangunan Di SWP 2

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	-8224.226	-211,575.72	0.04
2	Kota Malang	-1,747.41	-84,378.77	0.02
3	Kota Batu	-1,287.12	-23,365.63	0.06

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.28 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor Bangunan yakni Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Sebaliknya di satuan wilayah pengembangan 2 tidak terdapat Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan spesialisasi untuk sektor bangunan.

4.2.2.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.29 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	6127.671	-795,429.76	-0.01
2	Kota Malang	-15,823.51	1,404,970.76	-0.01
3	Kota Batu	-1,405.16	233,491.21	-0.01

Sumber: hasil analisis

Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran pada Tabel 4.29 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif. Sebaliknya untuk keunggulan spesialisasi hanya Kabupaten Malang yang tidak memiliki spesialisasi untuk sektor ini, sedangkan untuk Kota Malang

dan Kota Batu memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor ini walaupun tidak kompetitif. Sehingga hanya Kabupaten Malang yang tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor ini.

4.2.2.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.30 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	11469.818	-641,491.50	-0.02
2	Kota Malang	17,005.82	-614,131.86	-0.03
3	Kota Batu	850.02	-57,512.52	-0.02

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.30 diketahui bahwa Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 2 Jawa Timur tidak ada yang memiliki keunggulan baik kompetitif maupun keunggulan spesialisasi untuk sektor pengangkutan dan komunikasi.

4.2.2.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.31 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Di SWP 2

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	-566.684	-186,704.99	0.003
2	Kota Malang	-3,522.11	315,164.69	-0.011
3	Kota Batu	-105.10	-13,603.73	0.008

Sumber: hasil analisis

Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sedangkan Kabupaten/Kota yang mempunyai spesialisasi hanya Kota Malang. Dan untuk Kabupaten Malang dan Kota Batu tidak memiliki spesialisasi.

4.2.2.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.32 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa Di SWP 2

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Malang	6512.361	624,369.36	0.01
2	Kota Malang	4,601.04	615,928.48	0.01
3	Kota Batu	2,418.14	79,622.98	0.03

Sumber: hasil analisis

4.2.2.5 Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 2 Jawa Timur

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa hanya Kota Malang yang masuk dalam kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and growth region), merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi. Seperti yang terlihat pada Tabel dibawahh, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rata-rata Kota Surabaya sebesar 7.49% dan Rp. 18.273.135.42 yang mana lebih besar dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan ekonomi rata-rata Provinsi yakni sebesar 6.54% dan Rp. 9.733.686,88. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kuadran 2 terdiri dari Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Tabel 4.33 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP 2	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kabupaten Malang	6.366.847.72	6.55	2
2	Kota Malang	18.273.135.42	7.49	1
3	Kota Batu	8.125.174.37	7.80	2
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

Sumber: hasil analisis

4.2.2.6 Pembahasan Kabupaten/Kota Di SWP 2 Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kemudian sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031 Kabupaten/Kota di SWP 2 memiliki fungsi-fungsi ekonomi seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa. Sehingga untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi disatuan wilayah pengembangan 2 maka akan

dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Sehingga dengan dilakukannya perbandingan tersebut diharapkan akan diketahui sektor-sektor basis pendukung utama perekonomian didaerah tersebut. Yang menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Setelah melakukan perhitungan dan analisis masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2009-2013 di Kabupaten/Kota maka akan diketahui sektor ekonomi basis Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 1. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis data LQ dan MRP menunjukkan Kabupaten/Kota di SWP 2 memiliki beberapa prioritas sektor ekonomi basis dilihat dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya adalah Sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; dan sektor jasa-jasa merupakan sektor basis maupun prioritas yang dominan yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 2 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya.

Sektor jasa-jasa merupakan sektor basis dan potensial di Kabupaten/Kota di SWP 2 dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi rerata masing-masing daerah yakni Kabupaten Malang sumbangan kontribusi 1.47 % dan pertumbuhannya 1.22 %. Kota Batu sumbangan kontribusi 1.61 % dan pertumbuhannya 1.62 % dan Kota Malang dengan sumbangan kontribusinya 1.48 dengan pertumbuhannya 1.16 %.

Sektor penting berikutnya yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian karena memiliki kontribusi yang dominan yaitu rerata masing-masing daerah seperti Kabupaten Malang 2.04 %, Kota Batu 1.37 namun untuk Kota Malang sektor pertanian memiliki kontribusi yang kecil yakni 0.02 % terhadap SWP 2. disamping itu sektor pertanian memiliki backward dan

forward linkages, sehingga aktivitas sektor pertanian mampu menumbuhkan sektor yang lainnya, misalnya aktivitas budidaya pertanian secara umum memerlukan pupuk, benih/bibit, tenaga kerja, obat-obatan, alat dan mesin pertanian dan sebagainya; sektor pertanian mampu menggerakkan *multiplier effect* yang sangat berperan dalam menghasilkan *value added* (nilai tambah) pada sektor primer, sekunder maupun tersier, sehingga sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Jika hasil analisis tersebut dihubungkan dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan oleh RTRW dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur dimana satuan wilayah pengembangan 2 memiliki fungsi ekonomi seperti pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor jasa-jasa maka dapat disimpulkan bahwa disektor pertanian terdapat 2 Kabupaten/Kota yang sudah sesuai dengan kriteria fungsi ekonomi yang telah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur di antaranya Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Di sektor pertambangan dan penggalian terdapat Kabupaten Malang. Di sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki kontribusi negative terhadap PDRB namun jika dilihat dari pertumbuhannya, sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif, sedangkan di Kota Malang menunjukkan kontribusi yang positif namun sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang negatif, sehingga lebih lanjut diperlukan analisis untuk menanggulangi factor-faktor yang menjadi kelemahan sektor di daerah tersebut. Di sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan bahwa di Kabupaten Malang berdasarkan analisis LQ dan MRP menunjukkan nilai negative <1 , namun sektor tersebut menunjukkan nilai LQ positif >1 namun MRP yang negative <1 . Kemudian disektor jasa-jasa Kabupaten/Kota menunjukkan kesesuaian fungsi ekonomi yang telah ditetapkan RTRW. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.34 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 2		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 2				Fungsi Wilayah SWP 2				Fungsi Wilayah SWP 2											
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kabupaten Malang	2.04	+	1.85	+	1.21	+	1.00	+	0.73	-	1.53	+	0.54	-	1.26	+	0.58	-	1.50	+
2	Kota Batu	1.37	+	2.28	+	0.10	-	1.33	+	0.28	-	1.21	+	1.16	+	1.53	+	0.53	-	1.72	+
3	Kota Malang	0.02	-	-0.76	-	0.02	-	-0.71	-	1.19	+	0.98	-	1.26	+	1.00	+	0.82	-	1.29	+

Lanjutan Tabel 4.34 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 2		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		Fungsi Wilayah SWP 2												Fungsi Wilayah SWP 2			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kabupaten Malang	0.83	-	0.91	-	0.43	-	0.83	-	0.78	-	1.04	+	1.47	+	1.22	+
2	Kota Batu	1.49	+	0.94	-	0.48	-	0.85	-	0.83	-	1.11	+	1.61	+	1.62	+
3	Kota Malang	1.30	+	0.89	-	0.43	-	0.73	-	1.39	+	0.86	-	1.48	+	1.16	+

Berdasarkan hasil perhitungan shift-share yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota adalah sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; serta sektor jasa-jasa. Secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor di Kabupaten/Kota berspesialisasi maupun berkompetitif secara bersamaan. Sehingga secara keseluruhan efek alokasi di setiap Kabupaten/Kota di SWP 2 menunjukkan nilai yang negatif, yang artinya kurang meratanya distribusi pendapatan atau kesempatan kerja di antara sektor ekonomi dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor.

Jika kita deskripsikan Kabupaten/Kota dengan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif maupun spesialisasi untuk sektor pertanian yakni Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Untuk sektor industri pengolahan yakni hanya Kota Malang. Untuk sektor listrik, gas dan air bersih yakni Kota Malang dan Kota Batu. Untuk sektor jasa-jasa yakni Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Untuk sektor pertambangan dan penggalian; dan bangunan; serta perdagangan, hotel dan restoran tidak ada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan kedua-duanya.

Tabel 4.35 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif per sektor Kabupaten/Kota di SWP 2 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kabupaten Malang	Spes	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CD	CA	CA	CA	CD	CD	CA	CA
2. Kota Malang	Spes	NS	NS	S	S	NS	S	NS	S	S
	Comp	CD	CD	CA	CA	CA	CD	CD	CD	CA
3. Kota Batu	Spes	S	NS	NS	S	NS	S	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CD	CA	CA

Sumber: BPS, Jawa Timur (diolah)

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

S : Specialized.

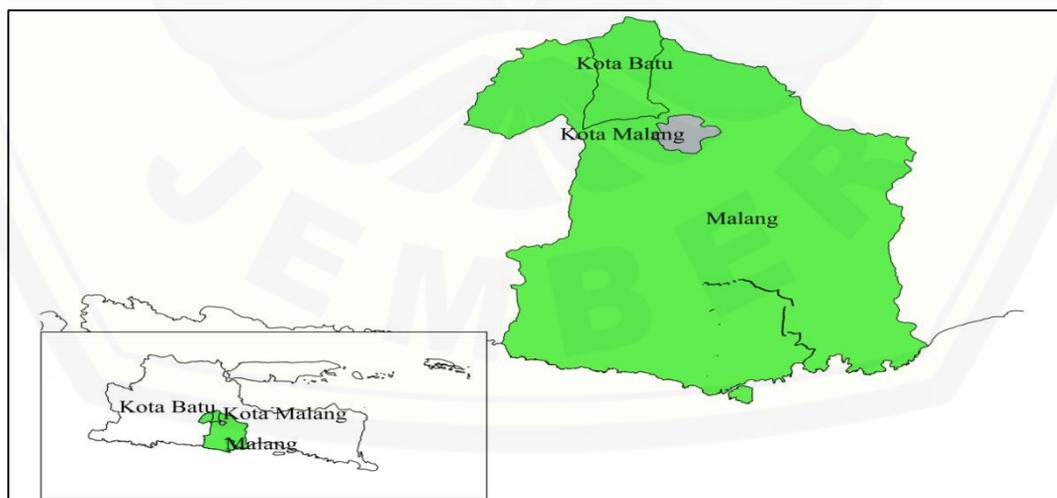
NS : Not Specialized.

Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi *Klassen* yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana tipologi Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan, khususnya di satuan wilayah pengembangan 2 ini, Kabupaten/Kota yang termasuk dalam tipologi daerah cepat maju dan cepat tumbuh serta daerah berkembang cepat. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kota Malang sedangkan untuk daerah berkembang cepat merupakan Kabupaten Malang dan Kota Batu.

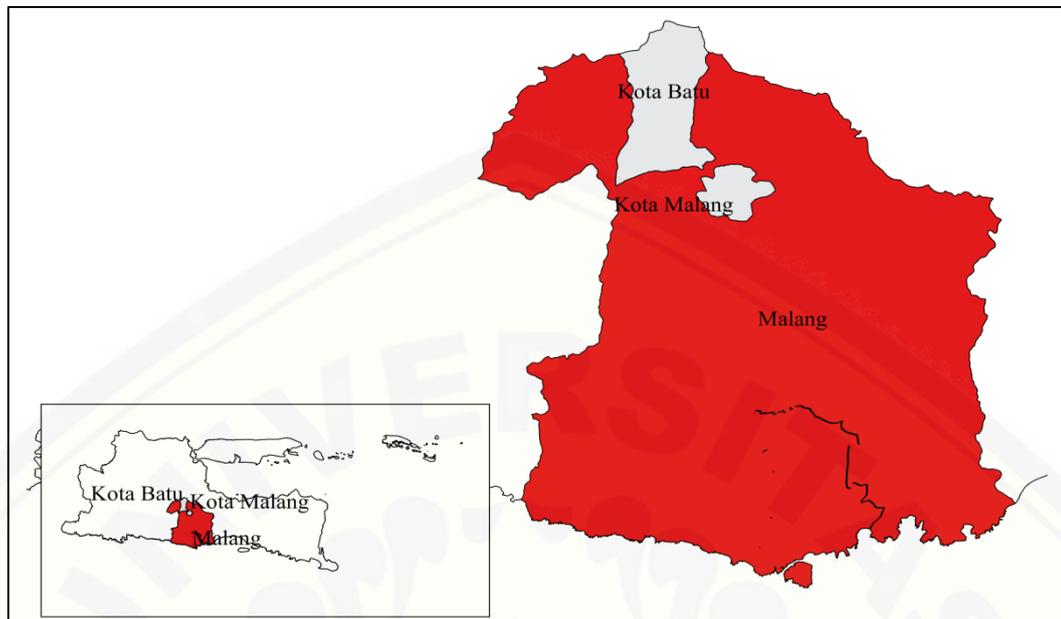
Kota Malang merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh karena daerah tersebut memiliki pertumbuhan dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi namun memiliki PDRB perkapita yang lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Berkembang
1. Kota Malang	1. Kabupaten Malang 2. Kota Batu
Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal

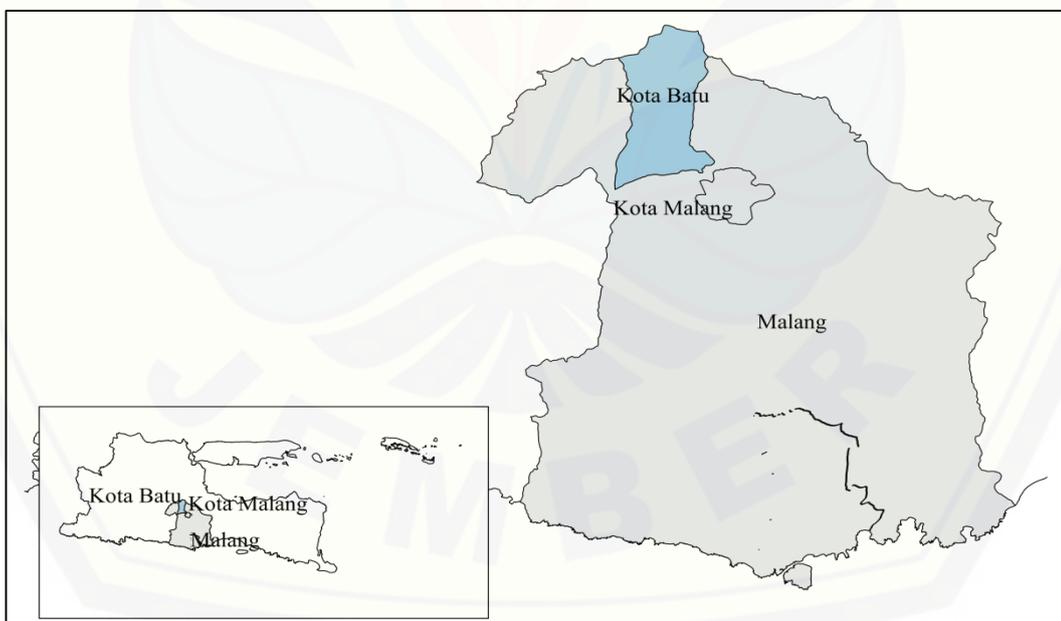
Gambar 4.66 Tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2



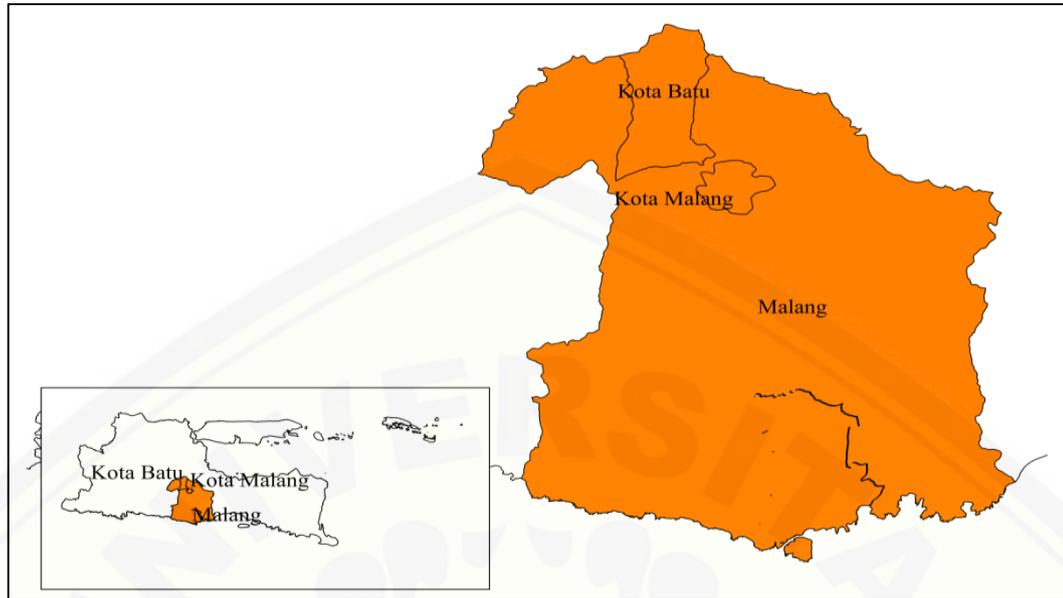
Gambar 4.13 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Pertanian



Gambar 4.14 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Pertambangan dan Penggalian



Gambar 4.15 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi di Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih



Gambar 4.16 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 2 Yang Mempunyai Prioritas Basis Ekonomi Di Sektor Jasa-jasa

4.2.3 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Jawa Timur

4.2.3.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

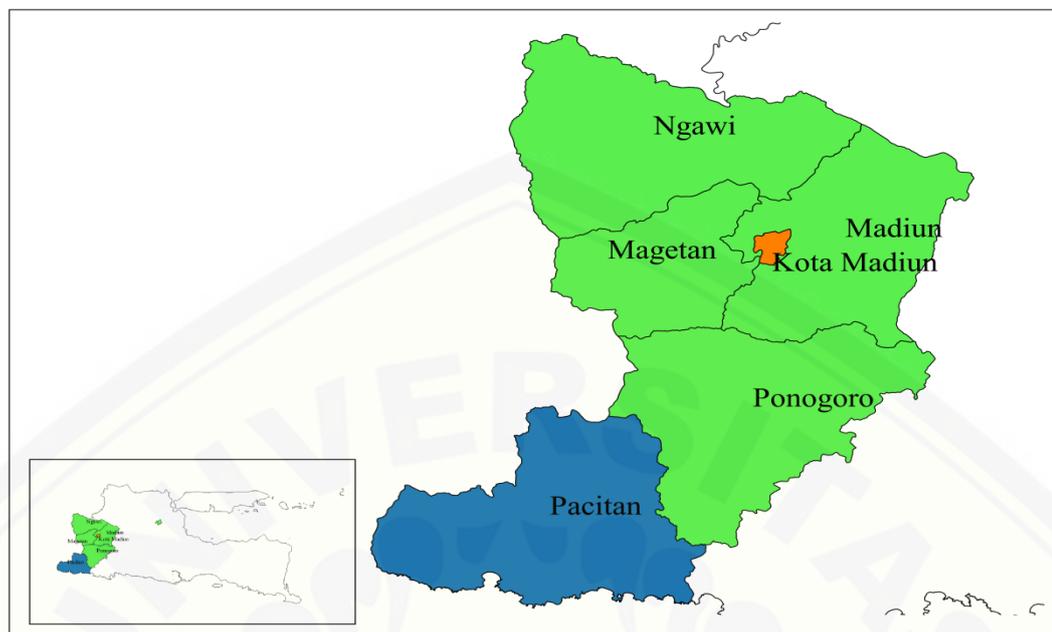
Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari Tahun 2009-2013 untuk Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 3 Jawa Timur dapat diketahui pada Tabel 4.36 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36 Hasil Perhitungan LQ di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Jawa Timur

No.	SWP 3	Rata-rata LQ Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Madiun	0.13	0.01	0.66	0.80	1.28	1.40	1.16	1.45	1.71
2	Kab.Madiun	2.47	0.22	0.13	0.71	1.01	1.05	0.45	0.56	1.89
3	Kab.Ponorogo	2.35	0.99	0.18	1.25	0.68	0.91	0.72	1.34	1.58
4	Kab.Magetan	2.29	0.23	0.34	0.67	1.78	0.86	0.29	0.83	1.94
5	Kab.Pacitan	2.67	1.92	0.14	0.72	2.78	0.39	0.69	1.70	1.90
6	Kab.Ngawi	2.51	0.25	0.25	0.47	1.35	0.96	0.35	1.11	1.48

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013 (diolah)

Di Kota Madiun adalah bangunan 1.28; perdagangan, hotel dan restoran 1.40; pengangkutan dan komunikasi 1.16; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.45; serta jasa-jasa 1.71. Di Kabupaten Madiun yaitu sektor pertanian 2.47; bangunan 1.01; perdagangan, hotel dan restoran 1.05; dan sektor jasa-jasa 1.89. Di Kabupaten Ponorogo adalah sektor pertanian 2.35; listrik, gas dan air bersih 1.25; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.34; serta jasa-jasa 1.58. Di Kabupaten Magetan adalah kegiatan pertanian 2.29; bangunan 1.78; serta jasa-jasa 1.94. Di Kabupaten Pacitan memiliki 5 sektor basis, sektor tersebut yaitu pertanian 2.67; pertambangan dan penggalian 1.92; bangunan 2.78; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.70; dan jasa-jasa 1.90. Di Kabupaten Ngawi adalah pertanian 2.51; bangunan 1.35; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.11; serta jasa-jasa 1.48.



Keterangan:

- sektor pertanian sebagai sektor unggulan
- sektor bangunan sebagai sektor unggulan
- sektor jasa-jasa sebagai sektor unggulan

Gambar 4.17 Prioritas Sektor Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Jawa Timur

4.2.3.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Tabel 4.37 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 1 Provinsi Jawa Timur

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74

No.	SWP 1	Rata-rata RPs Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Madiun	0.16	0.98	0.81	1.08	0.92	0.93	0.89	1.09	1.21
2	Kab.Madiun	1.48	0.33	0.88	1.24	0.88	0.95	0.95	0.74	1.29
3	Kota Ponorogo	0.82	0.85	1.06	1.00	1.04	1.02	0.94	1.06	1.08
4	Kab.Magetan	1.77	0.76	1.19	1.19	0.89	1.00	0.86	0.96	0.85
5	Kab.Pacitan	1.34	1.56	1.10	1.19	1.62	1.21	0.78	1.17	1.01
6	Kab.Ngawi	2.36	0.87	1.17	1.41	0.92	0.92	0.72	0.78	0.86

Sumber: hasil analisis

Di Kota Madiun menunjukkan bahwa kegiatan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kota Madiun mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Madiun adalah sektor listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kota Madiun, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Madiun namun berpotensi untuk Provinsi Jatim. Sebaliknya untuk sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan jasa-jasa baik di tingkat Provinsi maupun Kota Madiun memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan sektoral yang merupakan kegiatan dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Madiun tidak mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Madiun adalah sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran; perdagangan, hotel dan restoran; dan pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Madiun, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Madiun namun berpotensi untuk Provinsi Jatim. Sebaliknya untuk sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Madiun memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kota Ponorogo mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Ponorogo adalah sektor industri pengolahan; dan jasa-jasa yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kota Ponorogo, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Ponorogo tersebut. Sebaliknya untuk sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kota Ponorogo memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa kegiatan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Magetan mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan sektor yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Magetan adalah sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, dimana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Magetan, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Magetan namun berpotensi untuk Provinsi Jatim. Sebaliknya untuk sektor pertambangan dan penggalian; dan jasa-jasa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Magetan memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan

sektor yang dominan pertumbuhan, artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Pacitan mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Pacitan adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Pacitan, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi, artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Pacitan tersebut.

Di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan sektoral yang merupakan kegiatan dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Ngawi tidak mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Ngawi adalah sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Ngawi, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Ngawi namun berpotensi untuk Provinsi Jatim. Sebaliknya untuk sektor pertambangan dan penggalian; dan jasa-jasa baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Ngawi memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

4.2.3.3 Analisis Overlay

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dari pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ) atas Kabupaten/Kota di SWP 3, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.38 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 3 Provinsi Jawa Timur

SWP 3		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Madiun	0.13	-	0.16	-	0.01	-	0.98	-	0.66	-	0.81	-	0.80	-	1.08	+	1.28	+	0.92	-
2	Kab.Madiun	2.47	+	1.48	+	0.22	-	0.33	-	0.13	-	0.88	-	0.71	-	1.24	+	1.01	+	0.88	-
3	Kab.Ponorogo	2.35	+	0.82	-	0.99	-	0.85	-	0.18	-	1.06	+	1.25	+	1.00	+	0.68	-	1.04	+
4	Kab.Magetan	2.29	+	1.77	+	0.23	-	0.76	-	0.34	-	1.19	+	0.67	-	1.19	+	1.78	+	0.89	-
5	Kab.Pacitan	2.67	+	1.34	+	1.92	+	1.56	+	0.14	-	1.10	+	0.72	-	1.19	+	2.78	+	1.62	+
6	Kab.Ngawi	2.51	+	2.36	+	0.25	-	0.87	-	0.25	-	1.17	+	0.47	-	1.41	+	1.35	+	0.92	-

Sumber: hasil analisis

Lanjutan Tabel 4.38 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 3 Provinsi Jawa Timur

SWP 3		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n
1	Kota Madiun	1.40	+	0.93	-	1.16	+	0.89	-	1.45	+	1.09	+	1.71	+	1.21	+
2	Kab.Madiun	1.05	+	0.95	-	0.45	-	0.95	-	0.56	-	0.74	-	1.89	+	1.29	+
3	Kab.Ponorogo	0.91	-	1.02	+	0.72	-	0.94	-	1.34	+	1.06	+	1.58	+	1.08	+
4	Kab.Magetan	0.86	-	1.00	+	0.29	-	0.86	-	0.83	-	0.96	-	1.94	+	0.85	-
5	Kab.Pacitan	0.39	-	1.21	+	0.69	-	0.78	-	1.70	+	1.17	+	1.90	+	1.01	+
6	Kab.Ngawi	0.96	-	0.92	-	0.35	-	0.72	-	1.11	+	0.78	-	1.48	+	0.86	-

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.38 diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya di tunjukkan oleh Kabupaten Pacitan dengan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Di Kota Ponorogo adalah sektor keuangan, persewaan; dan Jasa-jasa. Di Kabupaten Magetan adalah sektor pertanian. Di Kabupaten Ngawi yaitu sektor pertanian. Di Kota Madiun yakni sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.

Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kabupaten Pacitan adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran. Di Kota Ponorogo yakni sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran. Di Kabupaten Madiun adalah sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran. Di Kabupaten Magetan yakni sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa-jasa. Di Kabupaten Ngawi adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa. Di Kota Madiun yakni sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi.

Bila dilihat dari sektor yang sedang mengalami penurunan yakni untuk Kota Ponorogo adalah pertanian; listrik, gas dan air bersih. Kabupaten Madiun yakni sektor bangunan; dan perdagangan, hotel dan restoran. Di Kabupaten Magetan adalah bangunan. Dan untuk Kabupaten Ngawi yakni bangunan; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Serta untuk Kota Madiun adalah bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi.

Bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya maka untuk Kabupaten Pacitan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Di Kota Ponorogo yakni sektor pertambangan dan penggalian; dan pengangkutan dan komunikasi. Untuk Kabupaten Madiun adalah sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kabupaten Magetan yakni sektor pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan

komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kabupaten Ngawi adalah sektor pertambangan dan pengalain; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta untuk Kota Madiun yakni sektor pertanian; pertambangan dan pengalain; dan industri pengolahan.

4.2.3.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

4.2.3.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.39 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	2,961.85	388,588.41	0.01
2	Kabupaten Ponorogo	-2,503.05	679,255.27	0.00
3	Kabupaten Madiun	6,067.99	676,850.80	0.01
4	Kabupaten Magetan	9,863.91	629,724.17	0.02
5	Kabupaten Ngawi	19,199.64	693,519.85	0.03
6	Kota Madiun	4,690.25	-280,350.07	-0.02

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.39, yakni hampir semua Kabupaten/Kota yang berada di SWP 3 mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Sebaliknya hanya Kota madiun yang tidak memiliki keunggulan kompetitif maupun spesialisasi atas sektor pertanian.

4.2.3.4.2 Sektor Pertambangan dan Pengalain

Tabel 4.40 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Pengalain untuk SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	403.57	31,769.44	0.01
2	Kabupaten Ponorogo	-15.76	-688.05	-0.01
3	Kabupaten Madiun	2,206.84	-54,759.76	-0.04
4	Kabupaten Magetan	1,189.96	-57,608.22	-0.02
5	Kabupaten Ngawi	825.37	-53,644.10	-0.02
6	Kota Madiun	153.01	-48,350.71	0.00

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* diatas, Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor pertambangan dan pengalain sebanyak 2 yakni Kabupaten Pacitan, dan Kota Madiun, selebihnya tidak kompetitif untuk

sektor ini. Sedangkan Kabupaten/Kota yang mempunyai spesialisasi untuk sektor pertambangan dan penggalian hanya 1 yakni Kabupaten Pacitan, sisanya tidak memiliki keunggulan spesialisasi. Sebaliknya untuk daerah yang memiliki keunggulan spesialisasi maupun kompetitif hanya 1 yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Mojokerto, Sampang dan Kabupaten Sumenep.

4.2.3.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.41 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Industri Pengolahan Di SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	-1,837.20	-352,122.66	0.01
2	Kabupaten Ponorogo	-1,280.65	-715,942.68	0.00
3	Kabupaten Madiun	4,742.52	-703,217.19	-0.01
4	Kabupaten Magetan	-5,495.68	-564,160.75	0.01
5	Kabupaten Ngawi	-4,857.98	-613,695.59	0.01
6	Kota Madiun	1,486.62	-187,212.50	-0.01

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* diatas, Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor industri pengolahan sebanyak 5 yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan sisanya tidak memiliki keunggulan kompetitif. Sebaliknya tidak terdapat Kabupaten/Kota yang mempunyai spesialisasi untuk sektor Industri pengolahan. Serta pada analisis diatas, tidak ada yang menunjukkan Kabupaten/Kota yang sekaligus memiliki keunggulan kedua-duanya baik kompetitif maupun spesialisasi.

4.2.3.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.42 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	-68.02	-6,242.94	0.01
2	Kabupaten Ponorogo	-7.83	11,269.38	0.00
3	Kabupaten Madiun	-165.10	-12,742.02	0.01
4	Kabupaten Magetan	-145.73	-15,326.82	0.01
5	Kabupaten Ngawi	-575.50	-23,327.53	0.02
6	Kota Madiun	-25.28	-5,995.51	0.00

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.42 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh Kabupaten/Kota mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor listrik, gas dan air bersih, namun sebaliknya tidak ada Kabupaten/Kota yang

berspesialisasi untuk sektor tersebut. Sehingga tidak pada hasil analisis diatas tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik itu keunggulan kompetitif maupun keunggulan spesialisasi.

4.2.3.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.43 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk sektor Bangunan Di SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	4,280.69	89,549.00	0.05
2	Kabupaten Ponorogo	-147.91	-36,655.12	0.00
3	Kabupaten Madiun	-22.05	1,353.08	-0.01
4	Kabupaten Magetan	-850.15	85,922.62	-0.01
5	Kabupaten Ngawi	-275.33	37,298.55	-0.01
6	Kota Madiun	-102.29	20,242.43	0.00

Sumber: hasil analisis

Selanjutnya pada sektor bangunan, Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor Bangunan sebanyak 3 yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun. Sebaliknya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki keunggulan kompetitif untuk sektor bangunan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang mempunyai spesialisasi sebanyak 5 yakni Kabupaten Pacitan, Madiun, Magetan, dan Ngawi serta Kota Madiun, hanya Kabupaten Ponorogo yang tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor ini. Sehingga secara keseluruhan, hanya Kabupaten Pacitan, dan Kota Madiun yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik kompetitif maupun spesialisasi.

4.2.3.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.44 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Di SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	-6,253.13	-309,596.03	0.02
2	Kabupaten Ponorogo	-216.72	-104,830.80	0.00
3	Kabupaten Madiun	-254.43	51,270.83	-0.01
4	Kabupaten Magetan	-9.33	-149,639.44	0.00
5	Kabupaten Ngawi	279.32	-41,130.49	-0.01
6	Kota Madiun	-1,913.36	278,558.70	-0.01

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.44 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Magetan.. Sebaliknya Kabupaten Madiun, Ngawi dan Kota Madiun yang tidak memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan Kabupaten/Kota yang mempunyai spesialisasi yakni Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun. Dan sisanya tidak memiliki keunggulan spesialisasi. Sehingga secara keseluruhan tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif.

4.2.3.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.45 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Di SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	809.27	-37,138.08	-0.02
2	Kabupaten Ponorogo	436.40	-71,034.94	-0.01
3	Kabupaten Madiun	729.32	-130,881.52	-0.01
4	Kabupaten Magetan	2,481.70	-180,570.76	-0.01
5	Kabupaten Ngawi	4,633.47	-156,284.12	-0.03
6	Kota Madiun	-370.60	28,135.78	-0.01

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.45 diatas dapat diketahui bahwa tidak terdapat Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor pengangkutan. Sebaliknya hanya terdapat 1 daerah yang memiliki keunggulan spesialisasi yakni Kota Madiun walaupun tidak kompetitif untuk sektor pengangkutan dan komunikasi. Sehingga secara keseluruhan tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif.

4.2.3.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.46 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Di SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	745.80	59,902.89	0.01
2	Kabupaten Ponorogo	316.04	62,426.68	0.00
3	Kabupaten Madiun	1,509.55	-75,611.91	-0.02
4	Kabupaten Magetan	80.44	-31,146.33	0.00
5	Kabupaten Ngawi	-331.01	19,490.87	-0.02
6	Kota Madiun	348.76	55,254.44	0.01

Sumber: hasil analisis

Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Kota Madiun, sedangkan untuk Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi tidak memiliki keunggulan kompetitif untuk sektor ini. Sebaliknya Kabupaten/Kota yang mempunyai spesialisasi sebanyak 4 yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun, sedangkan Kabupaten Madiun dan Magetan tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sehingga secara keseluruhan Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun.

4.2.3.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.47 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa Di SWP 3

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Pacitan	86.98	126,948.97	0.00
2	Kabupaten Ponorogo	604.15	176,200.26	0.00
3	Kabupaten Madiun	3,263.06	247,737.70	0.01
4	Kabupaten Magetan	-2,253.05	282,805.53	-0.01
5	Kabupaten Ngawi	-937.50	137,772.56	-0.01
6	Kota Madiun	1,174.57	139,717.45	0.01

Sumber: hasil analisis

Untuk Sektor jasa-jasa diketahui bahwa tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai keunggulan kompetitif. Kabupaten yang memiliki Keunggulan kompetitif tersebut adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun, sebaliknya untuk Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi tidak memiliki keunggulan kompetitif untuk sektor jasa-jasa.

Sedangkan untuk sektor Jasa-jasa pada Tabel diatas menunjukkan bahwa semua Kabupaten/Kota mempunyai keunggulan spesialisasi. Sehingga secara keseluruhan daerah yang memiliki keunggulan spesialisasi maupun kompetitif yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kota Madiun

4.2.3.5 Analisis Tipologi Klassen

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa hanya Kota Madiun yang masuk dalam kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and growth region), merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi. Seperti yang terlihat pada Tabel dibawah, rata-rata pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Kota Madiun sebesar 7.21 dan Rp. 13.300.210.35 yang mana lebih besar dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan ekonomi rata-rata Provinsi yakni sebesar 6.54% dan Rp. 9.733.686,88. Sedangkan Kabupaten yang lainnya masuk dalam kuadran ke 4 yang diantaranya adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.88 sebagai berikut:

Tabel 4.48 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 3 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP 3	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kabupaten Pacitan	3.032.721.16	6.40	4
2	Kabupaten Ponorogo	4.134.562.97	5.84	4
3	Kabupaten Madiun	4.801.489.18	6.04	4
4	Kabupaten Magetan	5.624.205.08	6.07	4
5	Kabupaten Ngawi	3.696.544.60	6.32	4
6	Kota Madiun	13.300.210.35	7.21	1
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

Sumber: hasil analisis

4.2.3.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 3 Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kemudian sehubungan dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031 Kabupaten/Kota di SWP 3 memiliki fungsi-fungsi ekonomi seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa. Sehingga untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi disatuan wilayah pengembangan 3 maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Sehingga dengan dilakukannya perbandingan tersebut diharapkan akan diketahui sektor-sektor basis pendukung utama perekonomian didaerah tersebut. Yang menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan data hasil analisis LQ dan MRP dari tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di SWP 3 memiliki beberapa sektor basis/prioritas dilihat dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor prioritas basis utama yang dominan yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 3 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya.

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dibeberapa daerah satuan wilayah pengembangan 3 berdasar kontribusi dan pertumbuhannya, daerah tersebut adalah Kabupaten Madiun dengan sumbangan kontribusinya terhadap sektor pertanian dengan rerata sebesar 2.47 %, Kabupaten Magetan 2.29 %, Kabupaten Pacitan 2.67 %, Kabupaten Ngawi 2.51 %.

Sektor pertambangan dan penggalian yang hanya didukung oleh Kabupaten Pacitan di satuan wilayah pengembangan 2 dengan rerata kontribusinya dan pertumbuhannya terhadap satuan wilayah pengembangan 2 sebesar 1.92% dan

1.56%, sedangkan untuk daerahlainnya menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis dan menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sektor listrik merupakan sektor prioritas basis ekonomi utama disatuan wilayah pengembangan 2 yang didukung oleh Kabupaten Ponorogo dengan rerata kontribusi dan pertumbuhannya sebesar 1.25% dan 1.00%. Kemudian untuk sektor bangunan hanya didukung oleh Kabupaten Pacitan. Sektor prioritas basis selanjutnya adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan didukung oleh Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Kemudian untuk sektor yang terakhir yakni sektor jasa-jasa yang kontribusi dan pertumbuhannya didukung oleh Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan kabupaten Pacitan.

Jika hasil analisis tersebut dihubungkan dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan oleh RTRW dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur dimana satuan wilayah pengembangan 3 memiliki fungsi ekonomi seperti pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa maka dapat disimpulkan bahwa disektor pertanian terdapat 4 Kabupaten/Kota yang sudah sesuai dengan kriteria fungsi ekonomi yang telah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur diataranya Kabupaten Madiun, Magetan, Pacitan, dan Ngawi.

Di sektor pertambangan dan penggalian terdapat Kabupaten Pacitan, Bojonegoro, Gresik, Sampang, Sumenep. Di sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi tidak terdapat Kabupaten/Kota yang berspesialisasi disektor tersebut. Kemudian disektor jasa-jasa terdapat Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Sehingga bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan lagi terhadap faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.49 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 3		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 3				Fungsi Wilayah SWP 3				Fungsi Wilayah SWP 3											
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Madiun	0.13	-	0.16	-	0.01	-	0.98	-	0.66	-	0.81	-	0.80	-	1.08	+	1.28	+	0.92	-
2	Kab.Madiun	2.47	+	1.48	+	0.22	-	0.33	-	0.13	-	0.88	-	0.71	-	1.24	+	1.01	+	0.88	-
3	Kab.Ponorogo	2.35	+	0.82	-	0.99	-	0.85	-	0.18	-	1.06	+	1.25	+	1.00	+	0.68	-	1.04	+
4	Kab.Magetan	2.29	+	1.77	+	0.23	-	0.76	-	0.34	-	1.19	+	0.67	-	1.19	+	1.78	+	0.89	-
5	Kab.Pacitan	2.67	+	1.34	+	1.92	+	1.56	+	0.14	-	1.10	+	0.72	-	1.19	+	2.78	+	1.62	+
6	Kab.Ngawi	2.51	+	2.36	+	0.25	-	0.87	-	0.25	-	1.17	+	0.47	-	1.41	+	1.35	+	0.92	-

Lanjutan Tabel 4.49 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 3

SWP 3		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		Fungsi Wilayah SWP 3				Fungsi Wilayah SWP 3								Fungsi Wilayah SWP 3			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Madiun	1.40	+	0.93	-	1.16	+	0.89	-	1.45	+	1.09	+	1.71	+	1.21	+
2	Kab.Madiun	1.05	+	0.95	-	0.45	-	0.95	-	0.56	-	0.74	-	1.89	+	1.29	+
3	Kab.Ponorogo	0.91	-	1.02	+	0.72	-	0.94	-	1.34	+	1.06	+	1.58	+	1.08	+
4	Kab.Magetan	0.86	-	1.00	+	0.29	-	0.86	-	0.83	-	0.96	-	1.94	+	0.85	-
5	Kab.Pacitan	0.39	-	1.21	+	0.69	-	0.78	-	1.70	+	1.17	+	1.90	+	1.01	+
6	Kab.Ngawi	0.96	-	0.92	-	0.35	-	0.72	-	1.11	+	0.78	-	1.48	+	0.86	-

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share* yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih; bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota berspesialisasi maupun berkompetitif secara bersamaan. Sehingga secara keseluruhan efek alokasi di setiap Kabupaten/Kota di SWP 2 menunjukkan nilai yang negatif, yang artinya kurang meratanya distribusi pendapatan atau kesempatan kerja di antara sektor ekonomi dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor.

Jika kita deskripsikan Kabupaten/Kota dengan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif maupun spesialisasi untuk sektor pertanian yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan. Untuk sektor pertambangan dan penggalian hanya Kabupaten Pacitan. Untuk sektor listrik, gas dan air bersih terdapat Kabupaten Ponorogo. Untuk sektor bangunan Kabupaten Pacitan dan Kota Madiun. Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terdapat Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan Kota Madiun. Untuk sektor jasa-jasa yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Kabupaten dan Kota Madiun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.50 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 3 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kabupaten Pacitan	Spes	S	S	NS	NS	S	NS	NS	S	S
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA
2. Kabupaten Ponorogo	Spes	S	NS	NS	S	NS	NS	NS	S	S
	Comp	CA	CD	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA
3. Kabupaten Madiun	Spes	S	NS	NS	NS	S	S	NS	NS	S
	Comp	CA	CD	CD	CA	CD	CD	CD	CD	CA
4. Kabupaten Magetan	Spes	S	NS	NS	NS	S	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CD	CA	CA	CD	CA	CD	CA	CD
5. Kabupaten Ngawi	Spes	S	NS	NS	NS	S	NS	NS	S	S
	Comp	CA	CD	CA	CA	CD	CD	CD	CD	CD
6. Kota Madiun	Spes	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S	S
	Comp	CD	CA	CD	CA	CA	CD	ND	CA	CA

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur (diolah)

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

S : Specialized.

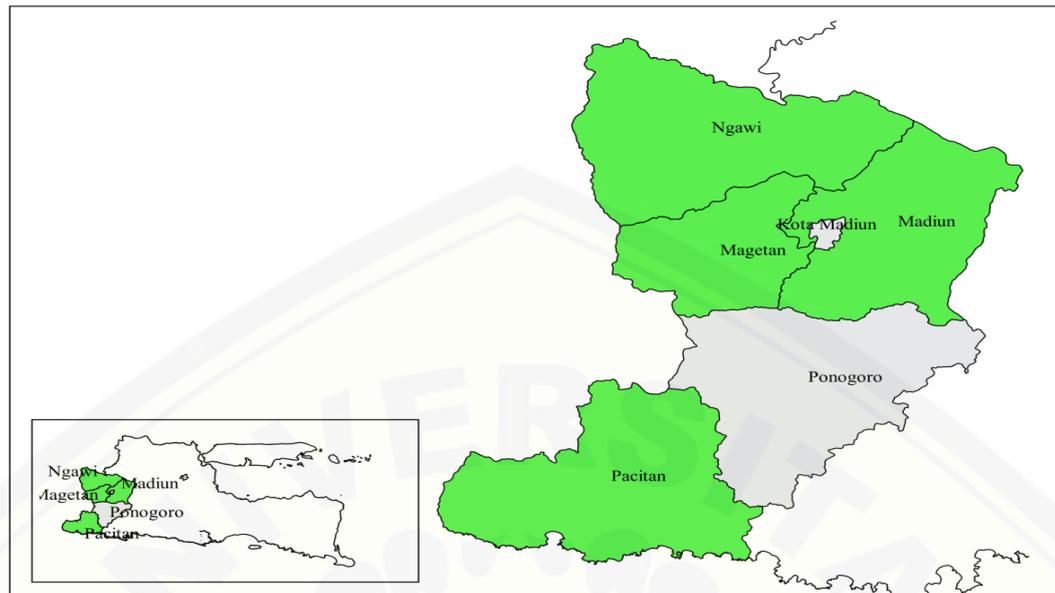
NS : Not Specialized.

Berdasarkan hasil analisis tipologi klasen bahwa Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 3 merupakan daerah yang bertipologi daerah cepat maju dan cepat tumbuh serta daerah relative tertinggal, untuk daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh yakni Kota Madiun, sedangkan daerah relative tertinggal yakni Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan dan Kabupaten Ngawi.

Kota Madiun merupakan kota yang memiliki pertumbuhan dan PDRB perkapita yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur. sedangkan daerah lainnya yang berada di satuan wilayah pengembangan 3 memiliki pertumbuhan dan PDRB perkapita lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur.

<p>Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh 1. Kota Madiun</p>	<p>Klasifikasi II Daerah Berkembang</p>
<p>Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan</p>	<p>Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal 1. Kabupaten Pacitan 2. Kabupaten Ponorogo 3. Kabupaten Madiun 4. Kabupaten Magetan 5. Kabupaten Ngawi</p>

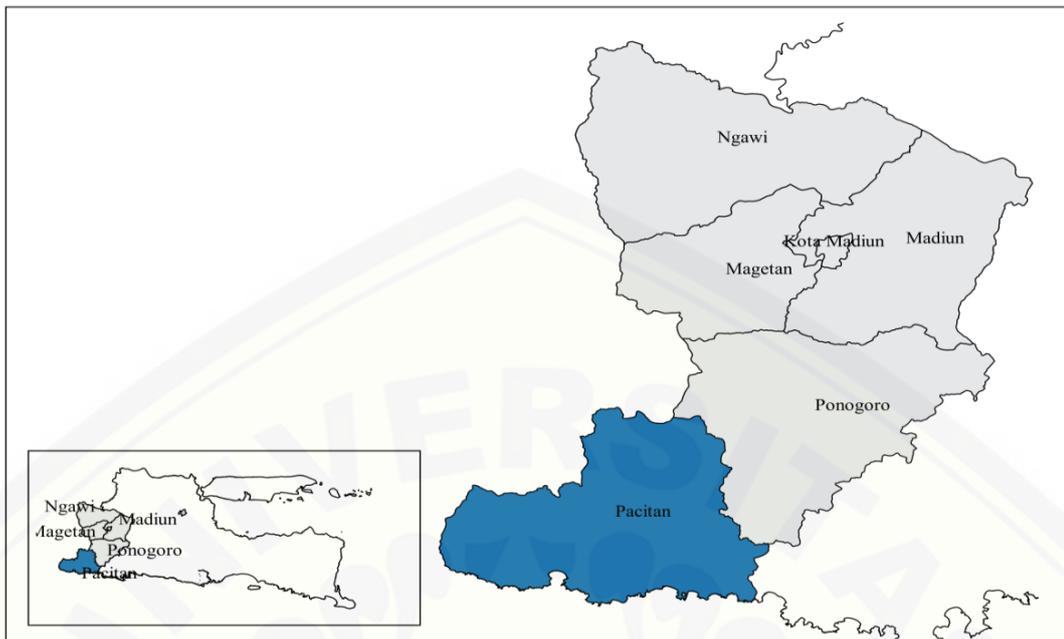
Gambar 4.89 Tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3



Gambar 4.18 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Yang Mempunyai Ekonomi Basis di Sektor Pertanian



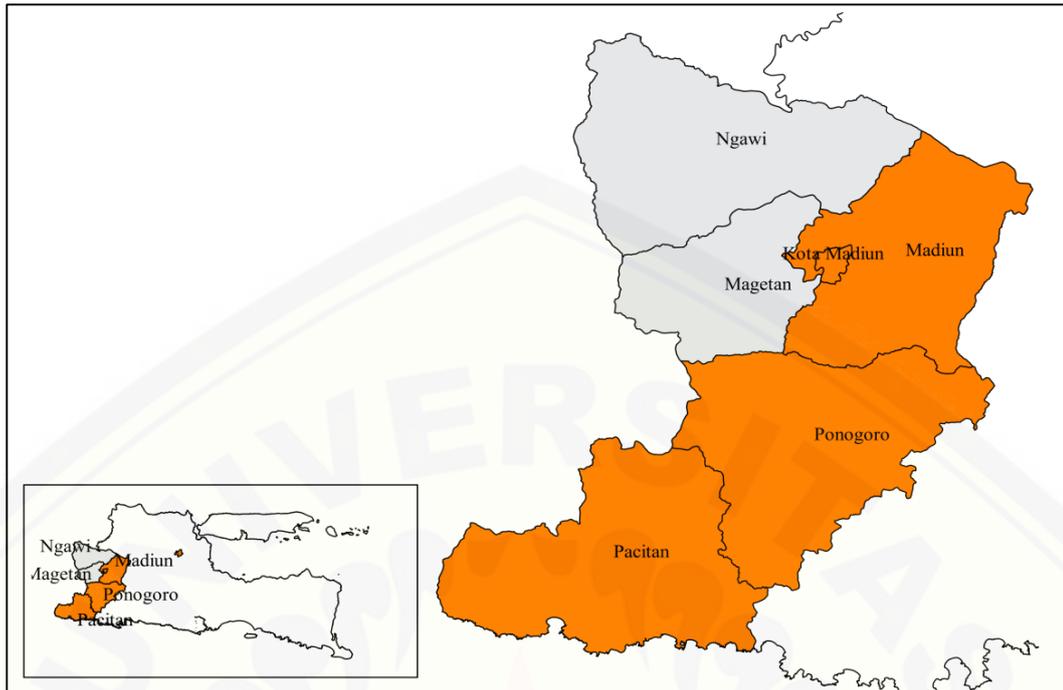
Gambar 4.19 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Yang Mempunyai Ekonomi Basis di Sektor Pertambangan dan Peggalian



Gambar 4.20 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Yang Mempunyai Ekonomi Basis di Sektor Bangunan



Gambar 4.21 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Yang Mempunyai Ekonomi Basis di Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan



Gambar 4.22 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 3 Yang Mempunyai Ekonomi Basis di Sektor Jasa-jasa

4.2.4 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Jawa Timur

4.2.4.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari Tahun 2009-2013 untuk Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 4 Jawa Timur dapat diketahui pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.51 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Jawa Timur

No.	SWP 4	Rata-rata LQ Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Kediri	0.01	0.00	2.84	0.19	0.06	0.65	0.13	0.82	0.17
2	Kab.Kediri	2.02	1.07	0.85	0.42	0.28	0.87	0.33	0.40	1.53
3	Kab.Nganjuk	2.36	0.59	0.32	0.40	0.19	1.02	0.27	0.70	1.95
4	Kab.Trenggalek	2.59	0.75	0.22	0.42	0.70	0.93	0.42	0.73	1.83
5	Kab.Tulungagung	1.26	0.83	0.70	0.97	0.52	1.03	0.69	1.95	1.23

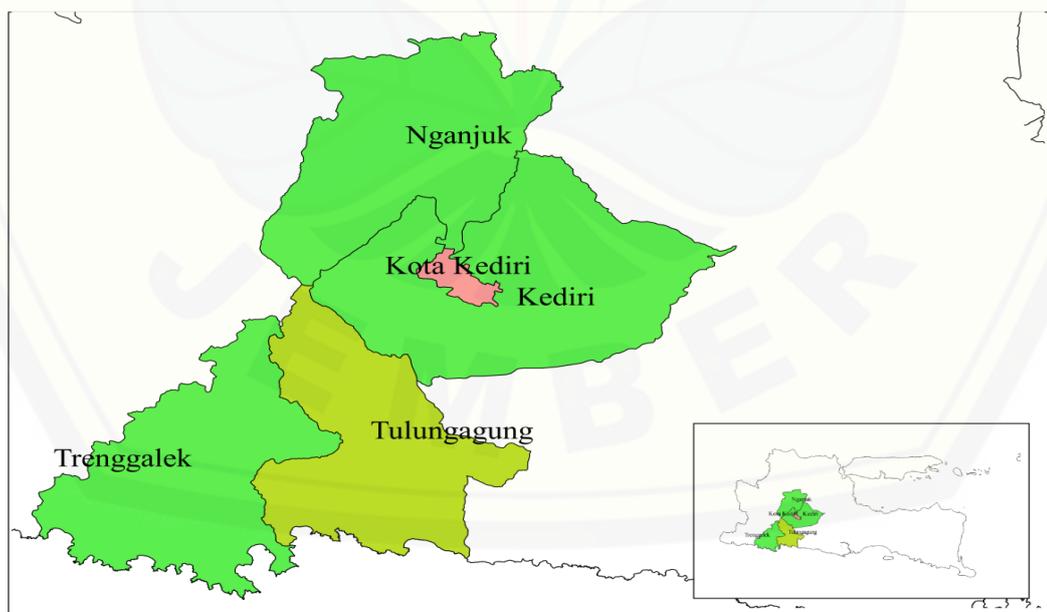
Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.51 maka dapat teridentifikasi sektor-sektor basis maupun non basis mana saja yang terdapat di Kabupaten/Kota di SWP 4 Jawa Timur. Di Kabupaten Trenggalek mempunyai 2 sektor basis, yaitu sektor pertanian dengan indeks rata-rata sebesar 1.36 dan sektor jasa-jasa 1.83, sehingga sektor ini merupakan sektor basis dengan indeks rata-rata terbesar.

Kabupaten Tulungagung mempunyai 4 sektor basis yaitu pertanian 1.26; perdagangan 1.03, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.95; dan jasa-jasa 1.23. Untuk Kabupaten Kediri terdiri dari 3 sektor basis yakni sektor pertanian 2.02; pertambangan dan penggalian 1.07; dan jasa-jasa 1.53. Untuk Kota Kediri yaitu hanya sektor industri pengolahan 2.84. Untuk Kabupaten Nganjuk terdiri dari 3 sektor basis yakni pertanian 2.36; perdagangan 1.02, hotel dan restoran; dan jasa-jasa 1.95. Di Kota Kediri hanya memiliki 1 sektor basis yakni sektor industri pengolahan dengan indeks rata-rata 2.84. Di Kabupaten Nganjuk terdapat 3 sektor basis diantaranya adalah sektor pertanian dengan indeks rata-rata 2.36; perdagangan, hotel dan restoran 1.02; dan sektor jasa-jasa 1.95. Hal ini menunjukkan sektor tersebut merupakan sektor basis yang menggambarkan

bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota SWP 4. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sektor yang merupakan sektor non basis untuk Kabupaten Trenggalek terdapat 8 sektor yaitu sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Untuk Kabupaten Tulungagung yaitu Pertambangan, dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, air bersih; bangunan; dan pengangkutan dan komunikasi. Untuk Kabupaten Kediri yaitu industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kota Kediri yaitu pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik gas, dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Untuk Kabupaten Nganjuk yaitu pertambangan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.



Gambar 4.23 Prioritas Sektor Ekonomi Basisi Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Jawa Timur

Keterangan:

- sektor pertanian sebagai sektor unggulan
- sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan
- sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

4.2.4.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel 4.52 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di SWP 4

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74

		Rata-rata RPs Tiap Sektor								
No.	SWP 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Kediri	1.14	-9.72	1.07	1.12	1.03	1.12	0.90	0.89	1.40
2	Kab.Kediri	1.58	1.18	1.35	0.98	0.98	0.86	0.78	0.90	1.35
3	Kab.Nganjuk	1.21	2.00	1.00	0.97	1.09	1.06	0.69	1.05	1.44
4	Kab.Trenggalek	1.61	0.94	1.12	1.15	1.00	1.01	0.79	1.06	1.14
5	Kab.Tulungagung	1.18	1.01	1.21	0.95	0.81	0.96	0.94	0.84	1.05

Di Kota Kediri sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kota Kediri memiliki pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Kediri adalah sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kota Kediri, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Kediri namun berpotensi untuk Provinsi Jatim. Sebaliknya sektor pertambangan dan penggalian baik di tingkat Provinsi maupun Kota Pacitan pertumbuhannya rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Kediri tidak terdapat kegiatan sektoral yang merupakan kegiatan dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten tidak mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan

kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Kediri adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan; perdagangan, hotel dan restoran; dan pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Kediri, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Kediri namun berpotensi untuk Provinsi Jatim. Sebaliknya untuk sektor listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kediri memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Nganjuk sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Nganjuk mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan jasa-jasa yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan Provinsi.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Nganjuk, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten namun berpotensi untuk Provinsi. Sebaliknya untuk sektor listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Nganjuk memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Trenggalek kegiatan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten

Trenggalek adalah sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan, pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Trenggalek, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, pertumbuhannya sama-sama rendah.

Di Kabupaten Tulungagung tidak terdapat sektor yang merupakan kegiatan dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten tidak mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Tulungagung adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan jasa-jasa yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Tulungagung, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten tersebut. Sebaliknya untuk sektor listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Tulungagung memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

4.2.4.3 Analisis overlay

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dari pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ) Kabupaten/Kota di SWP 4, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.53 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 4 Provinsi Jawa Timur

SWP 4		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Kediri	0.01	-	1.14	+	0	-	-9.72	-	2.84	+	1.07	+	0.19	-	1.12	+	0.06	-	1.03	+
2	Kab.Kediri	2.02	+	1.58	+	1.07	+	1.18	+	0.85	-	1.35	+	0.42	-	0.98	-	0.28	-	0.98	-
3	Kab.Nganjuk	2.36	+	1.21	+	0.59	-	2	+	0.32	-	1	+	0.4	-	0.97	-	0.19	-	1.09	+
4	Kab.Trenggalek	2.59	+	1.61	+	0.75	-	0.94	-	0.22	-	1.12	+	0.42	-	1.15	+	0.7	-	1	+
5	Kab.Tulungagung	1.26	+	1.18	+	0.83	-	1.01	+	0.7	-	1.21	+	0.97	-	0.95	-	0.52	-	0.81	-

Sumber: hasil analisis

Lanjutan Tabel 4.53 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 4 Provinsi Jawa Timur

SWP 4		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n
1	Kota Kediri	0.65	-	1.12	+	0.13	-	0.9	-	0.82	-	0.89	-	0.17	-	1.4	+
2	Kab.Kediri	0.87	-	0.86	-	0.33	-	0.78	-	0.4	-	0.9	-	1.53	+	1.35	+
3	Kab.Nganjuk	1.02	+	1.06	+	0.27	-	0.69	-	0.7	-	1.05	+	1.95	+	1.44	+
4	Kab.Trenggalek	0.93	-	1.01	+	0.42	-	0.79	-	0.73	-	1.06	+	1.83	+	1.14	+
5	Kab.Tulungagung	1.03	+	0.96	-	0.69	-	0.94	-	1.95	+	0.84	-	1.23	+	1.05	+

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.53 diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya di tunjukkan oleh Kabupaten Trenggalek dengan sektor pertanian; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Tulungagung adalah sektor pertanian; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Kediri adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; dan jasa-jasa. Di Kota Kediri yakni hanya sektor industri pengolahan. Di Kabupaten Nganjuk yakni pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa-jasa.

Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kabupaten Trenggalek adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Tulungagung yakni sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Kediri adalah sektor industri pengolahan. Di Kota Kediri yakni sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; bangunan; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Bila dilihat dari sektor yang mengalami penurunan yakni di Kabupaten Tulungagung adalah perdagangan, hotel dan restoran; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya yakni di Kabupaten Trenggalek yakni sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Tulungagung yakni sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Kediri yakni sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

4.2.4.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

4.2.4.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.54 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	8,547.35	730,947.29	0.012
2	Kabupaten Tulungagung	909.30	301,368.57	0.003
3	Kabupaten Kediri	14951.160	1,160,484.45	0.013
4	Kota Kediri	-4,268.53	-3,321,354.55	0.001
5	Kabupaten Nganjuk	3443.397	1,080,995.24	0.003

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, hampir semua Kabupaten/Kota yang berada di SWP 4 mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Sebaliknya hanya Kota Kediri saja yang hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak memiliki keunggulan spesialisasi atas sektor pertanian.

4.2.4.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 4.55 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	163.70	-17,499.98	-0.012
2	Kabupaten Tulungagung	198.69	-30,542.77	-0.009
3	Kabupaten Kediri	-22.575	12,029.22	-0.001
4	Kota Kediri	#DIV/0!	-508,245.25	#DIV/0!
5	Kabupaten Nganjuk	-1127.816	-51,132.87	0.019

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, dan Kota Kediri tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor pertambangan dan penggalian. Namun sebaliknya untuk Kabupaten Kediri hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif, serta untuk Kabupaten Nganjuk hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi untuk sektor pertambangan dan penggalian.

4.2.4.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.56 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Industri Pengolahan di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	-4,317.95	-631,278.10	0.007
2	Kabupaten Tulungagung	-6,596.80	-618,682.03	0.011
3	Kabupaten Kediri	-5607.586	-307,545.79	0.018
4	Kota Kediri	25,206.17	10,692,649.26	0.003
5	Kabupaten Nganjuk	285.195	-936,923.65	0.000

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa untuk sektor industri pengolahan hanya Kota Kediri yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif. Selanjutnya untuk Kabupaten lainnya hanya memiliki keunggulan kompetitif saja dan tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor industri pengolahan.

4.2.4.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.57 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	-233.49	-25,034.19	0.010
2	Kabupaten Tulungagung	8.15	-2,861.71	-0.003
3	Kabupaten Kediri	88.663	-61,755.44	-0.001
4	Kota Kediri	-1,543.10	-250,659.92	0.005
5	Kabupaten Nganjuk	99.540	-44,457.68	-0.003

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Trenggalek dan Kota Kediri yang memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi. Sedangkan Kabupaten lainnya tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor listrik, gas dan air bersih.

4.2.4.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.58 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Bangunan di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	7.79	-31,174.55	0.000
2	Kabupaten Tulungagung	1,922.16	-124,452.87	-0.016
3	Kabupaten Kediri	595.095	-185,139.40	-0.003
4	Kota Kediri	-2,622.50	-697,838.40	0.003
5	Kabupaten Nganjuk	-283.512	-144,587.69	0.003

Sumber: hasil analisis

Selanjutnya pada sektor bangunan, hanya Kabupaten Trenggalek, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk yang memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi, namun untuk Kabupaten lainnya tidak memiliki kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor bangunan.

4.2.4.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.59 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	-73.77	-71,016.54	0.001
2	Kabupaten Tulungagung	-348.64	69,658.49	-0.005
3	Kabupaten Kediri	3965.120	-331,242.67	-0.014
4	Kota Kediri	-33,590.91	-2,510,188.44	0.012
5	Kabupaten Nganjuk	203.049	28,460.72	0.005

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.59 diatas menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Nganjuk yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif. Untuk Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Kediri hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi. Dan untuk kabupaten Tulungagung hanya memiliki keunggulan spesiaslisasi namun tidak kompetitif. Dan sebaliknya hanya Kabupaten Kediri yang tidak memiliki keunggualn kedua-duanya baik keunggulan spesialisasi maupun kompetitif.

4.2.4.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.60 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	2,862.64	-138,129.24	-0.022
2	Kabupaten Tulungagung	1,332.53	-185,462.56	-0.006
3	Kabupaten Kediri	9178.962	-392,587.46	-0.023
4	Kota Kediri	13,654.02	-1,486,626.26	-0.011
5	Kabupaten Nganjuk	9493.758	-297,026.52	-0.033

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.60 diatas dapat diketahui bahwa tidak terdapat Kabupaten/ Kota yang mempunyai keunggulan spesialisasi maupun keunggulan kompetitif untuk sektor pengangkutan.

4.2.4.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.61 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	-238.54	-47,705.76	0.005
2	Kabupaten Tulungagung	-5,297.52	424,555.07	-0.013
3	Kabupaten Kediri	1949.051	-258,870.24	-0.008
4	Kota Kediri	1,663.75	-218,028.88	-0.008
5	Kabupaten Nganjuk	-493.475	-91,245.54	0.005

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.61 diatas menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk yang memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi. Sebaliknya hanya Kabupaten Tulungagung, yang memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Sementara untuk Kabupaten Kediri, Kota Kediri tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun keunggulan kompetitif untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

4.2.4.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.62 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 4

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Trenggalek	1,435.88	230,891.06	0.007
2	Kabupaten Tulungagung	318.69	166,419.81	0.002
3	Kabupaten Kediri	6007.274	364,627.34	0.017
4	Kota Kediri	-35,085.84	-1,699,707.54	0.020
5	Kabupaten Nganjuk	9286.958	455,917.98	0.021

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.62 diatas, dapat diketahui bahwa Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk sama-sama memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuuk sektor jasa-jasa. Sebaliknya untuk Kota Kediri hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor tersebut.

4.2.4.5 Analisis Tipologi Klassen

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa hanya Kota Kediri yang masuk dalam kuadran I yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and growth region), merupakan daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kuadran II terdiri dari Kabupaten Tulungagung. Dan untuk Kabupaten yang termasuk dalam kuadran IV yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.63 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.63 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 4 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP 4	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kabupaten Trenggalek	4.826.254.40	6.21	4
2	Kabupaten Tulungagung	8.412.372.04	6.57	2
3	Kabupaten Kediri	5.399.449.80	6.14	4
4	Kota Kediri	87.605.583.72	6.57	1
5	Kabupaten Nganjuk	5.553.643.04	6.43	4
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

Sumber: hasil analisis

4.2.4.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 4 Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Kemudian sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031 Kabupaten/Kota di SWP 4 memiliki fungsi-fungsi ekonomi seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Sehingga untuk mengetahui

lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Timur. Menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis data LQ dan MRP menunjukkan Kabupaten/Kota di SWP 4 memiliki beberapa sektor basis/prioritas dilihat dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor prioritas basis utama yang dominan selama tahun analisis yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB daerah di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 4 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya.

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi di satuan wilayah 4 dengan subsektornya yakni tanaman bahan pangan dan perkebunan. Sektor ini ini didukung Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Kemudian berdasarkan kontribusinya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan rerata kontribusi masing-masing daerah pada tahun analisis sebesar 2.02 %, 2.36%, 2.59%, 1.26%. Sektor prioritas basis selanjutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian, namun untuk sektor ini hanya didukung oleh Kabupaten Kediri, sedangkan untuk daerah lainnya belum menunjukkan prioritas basis yang dilihat dari kontribusi dan pertumbuhannya. Sedangkan Kabupaten Kediri merupakan daerah yang memiliki potensi pertambangan yang kurang bervariasi. Untuk Kabupaten Kediri potensi produksi hasil tambangnya merupakan jenis bahan tambang galian 'C' yang meliputi pasir, batu, tanah urug, dan pasir urug. Potensi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tidak mengabaikan aspek

kelestarian lingkungan. Untuk penggalian pasir, kerikil, dan batuan yang terdapat di sepanjang sungai.

Sektor selanjutnya merupakan sektor industri, dimana untuk sektor industri ini hanya didukung Kota Kediri sebagai penyumbang bagi daerah yang berada di satuan wilayah pengembangan 4, dengan rerata kontribusinya sebesar 2.84 dan pertumbuhannya 1.07 dari tahun 2009-2013. Sektor selanjutnya merupakan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang didukung oleh Kabupaten Nganjuk terhadap pengembangan satuan wilayah pengembangan 4, bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran ini menunjukkan perkembangan sektor prioritas disatuan wilayah pengembangan 4 karena menunjukkan trend yang positif dan cenderung mengalami kenaikan yang menyatakan bahwa perkembangan sektor ini cukup prospektif dari tahun ke tahun. Sektor yang terakhir dan merupakan sektor yang sangat penting selain sektor pertanian, yakni sektor jasa, sektor ini didukung oleh Kabupaten Kediri, Nganjuk, Trenggalek, dan Tulungagung. Namun untuk Kota Kediri berdasarkan analisis LQ, sektor ini bukanlah sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai negatif namun sektor jasa ini memiliki pertumbuhan yang positif di Kota tersebut.

Jika hasil analisis tersebut dihubungkan dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan oleh RTRW dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur dimana satuan wilayah pengembangan 4 memiliki fungsi ekonomi seperti pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa maka dapat disimpulkan bahwa disektor pertanian dan sektor jasa-jasa terdapat 4 Kabupaten yang sudah sesuai dengan kriteria fungsi ekonomi yang telah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur di antaranya Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung.

Di sektor pertambangan dan penggalian terdapat Kabupaten Kediri. Di sektor industri terdapat Kota Kediri. Sehingga bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan lagi terhadap faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.64 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 4		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 4				Fungsi Wilayah SWP 4				Fungsi Wilayah SWP 4											
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Kediri	0.01	-	1.14	+	0.00	-	-9.72	-	2.84	+	1.07	+	0.19	-	1.12	+	0.06	-	1.03	+
2	Kab.Kediri	2.02	+	1.58	+	1.07	+	1.18	+	0.85	-	1.35	+	0.42	-	0.98	-	0.28	-	0.98	-
3	Kab.Nganjuk	2.36	+	1.21	+	0.59	-	2.00	+	0.32	-	1.00	+	0.40	-	0.97	-	0.19	-	1.09	+
4	Kab.Trenggalek	2.59	+	1.61	+	0.75	-	0.94	-	0.22	-	1.12	+	0.42	-	1.15	+	0.70	-	1.00	+
5	Kab.Tulungagung	1.26	+	1.18	+	0.83	-	1.01	+	0.70	-	1.21	+	0.97	-	0.95	-	0.52	-	0.81	-

Lanjutan Tabel. 4.64 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 4		Sektor ke															
		6				7				8				9			
														Fungsi Wilayah SWP 4			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Kediri	0.65	-	1.12	+	0.13	-	0.90	-	0.82	-	0.89	-	0.17	-	1.40	+
2	Kab.Kediri	0.87	-	0.86	-	0.33	-	0.78	-	0.40	-	0.90	-	1.53	+	1.35	+
3	Kab.Nganjuk	1.02	+	1.06	+	0.27	-	0.69	-	0.70	-	1.05	+	1.95	+	1.44	+
4	Kab.Trenggalek	0.93	-	1.01	+	0.42	-	0.79	-	0.73	-	1.06	+	1.83	+	1.14	+
5	Kab.Tulungagung	1.03	+	0.96	-	0.69	-	0.94	-	1.95	+	0.84	-	1.23	+	1.05	+

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share* yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota adalah sektor pertanian; industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa. Secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota berspesialisasi maupun berkompetitif secara bersamaan. Sehingga secara keseluruhan efek alokasi di setiap Kabupaten/Kota di SWP 4 menunjukkan nilai yang negatif, yang artinya kurang meratanya distribusi pendapatan atau kesempatan kerja di antara sektor ekonomi dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor.

Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi menurut sektoral Kabupaten/Kota, secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor di Kabupaten/Kota SWP 4 Jawa Timur memiliki keunggulan kedua-duanya baik kompetitif dan spesialisasi. Jika kita deskripsikan Kabupaten/Kota dengan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor pertanian yakni Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ngajuk. Untuk sektor pertambangan dan penggalian tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif. Untuk sektor industri pengolahan yakni hanya Kota Kediri. Untuk sektor listrik, gas dan air bersih tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif. Untuk sektor bangunan tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran hanya Kabupaten Nganjuk. Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif. Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tidak terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif. Untuk sektor jasa-jasa yakni Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.65 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 4 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kabupaten Trenggalek	Spes	S	NS	S						
	Comp	CA	CD	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA
2. Kabupaten Tulungagung	Spes	S	NS	NS	NS	NS	S	NS	S	S
	Comp	CA	CD	CA	CD	CD	CD	CD	CD	CA
3. Kabupaten Kediri	Spes	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CD	CA	CD	CD	CD	CD	CD	CA
4. Kota Kediri	Spes	NS	NS	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS
	Comp	CA	CD	CA	CA	CA	CA	CD	CD	CA
5. Kabupaten Nganjuk	Spes	S	NS	NS	NS	NS	S	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CD	CA	CA	CD	CA	CA

Sumber: hasil analisis

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

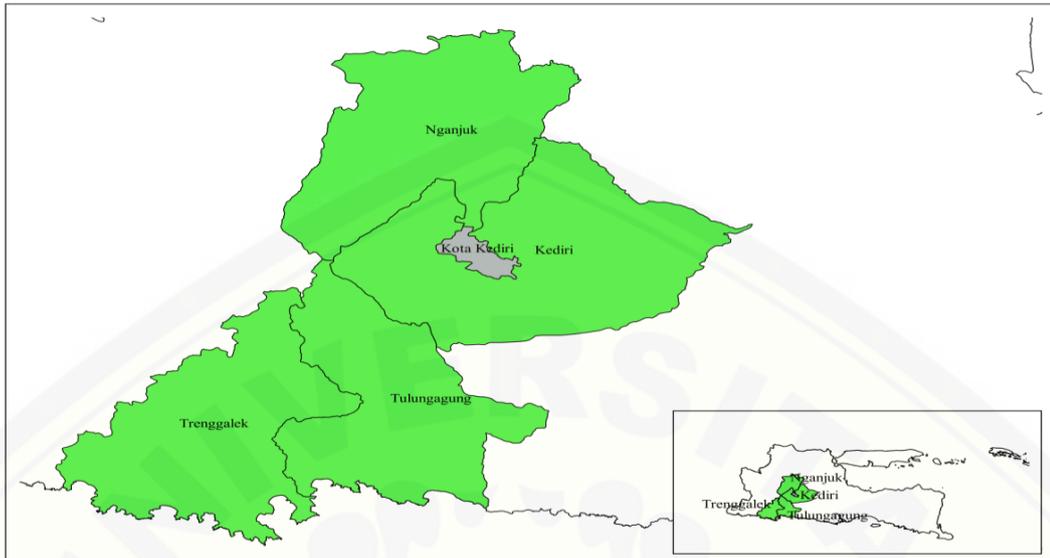
S : Specialized.

NS : Not Specialized.

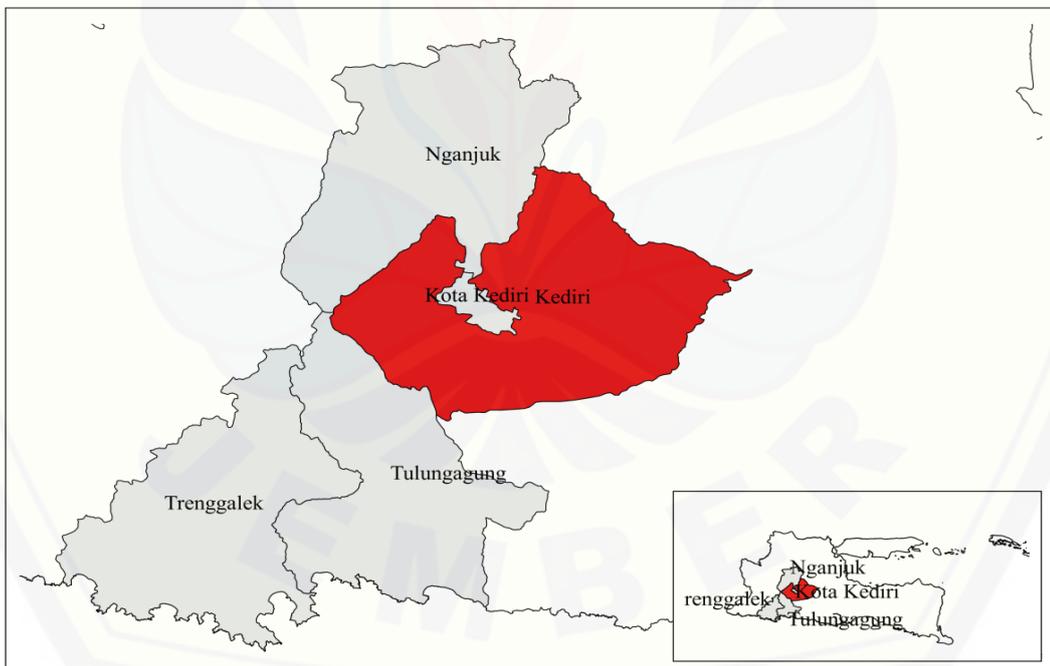
Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 4 terdiri dari beberapa tipologi, yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Kota Kediri, daerah berkembang adalah Kabupaten Tulungagung, sedangkan daerah relative tertinggal adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Berkembang
1. Kota Kediri	1. Kabupaten Tulungagung
Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal
	1. Kabupaten Trenggalek 2. Kabupaten Kediri 3. Kabupaten Nganjuk

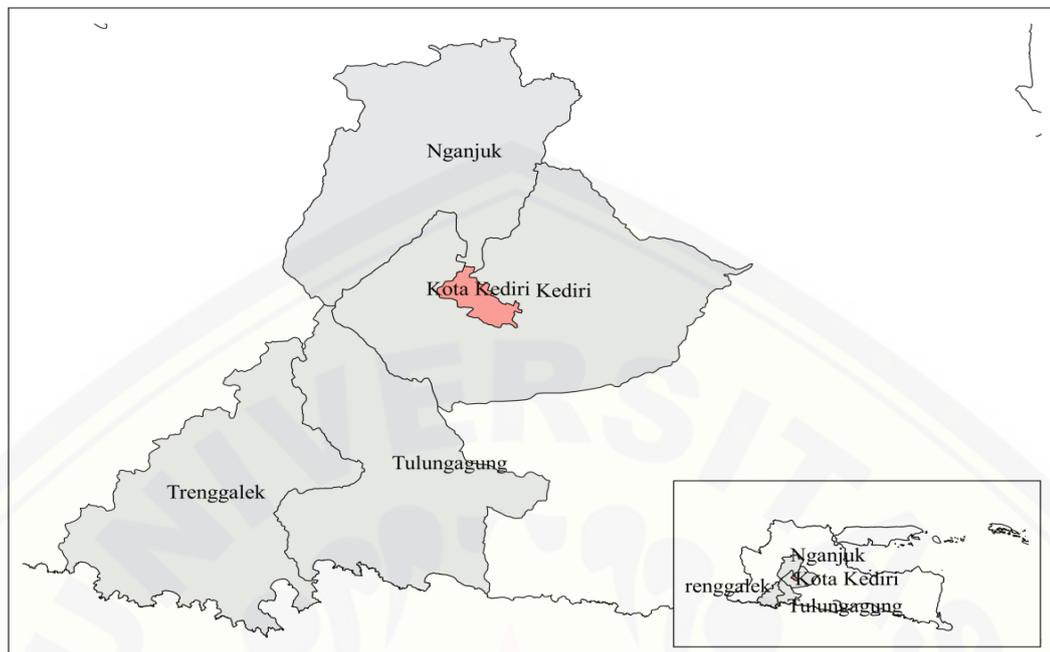
Gambar 4.114 Tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4



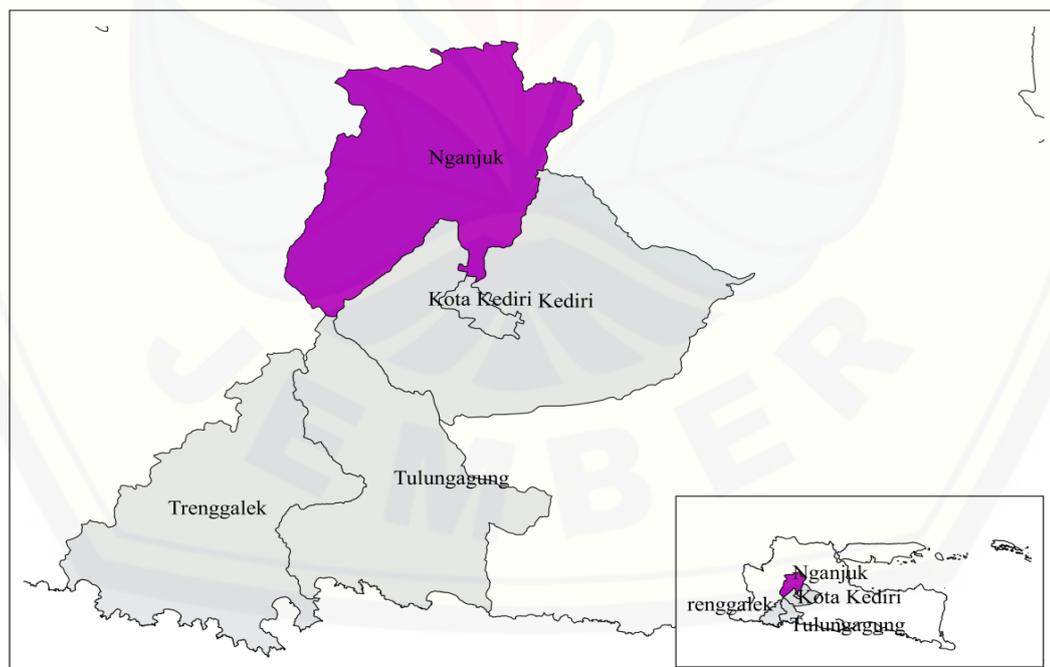
Gambar 4.24 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 yang mempunyai keunggulan di Sektor Pertanian



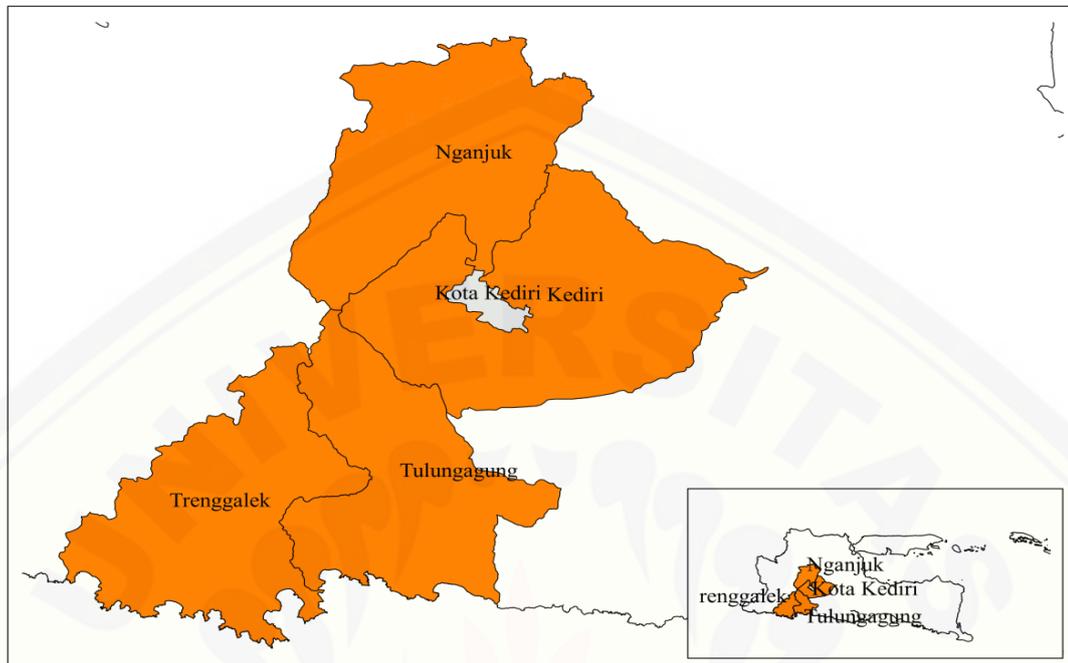
Gambar 4.25 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Yang Memiliki Ekonomi Basis di Sektor Pertambangan dan Penggalian



Gambar 4.26 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Yang Memiliki Ekonomi Basis di Sektor Industri Pengolahan



Gambar 4.27 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Yang Memiliki Ekonomi Basis di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran



Gambar 4.28 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 4 Yang Memiliki Ekonomi Basis di Sektor Jasa-jasa

4.2.5 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Jawa Timur

4.2.5.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari Tahun 2009-2013 untuk Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Jawa Timur dapat diketahui pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.66 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Provinsi Jawa Timur

Lapangan Usaha	Kab. Lumajang		Kab. Probolinggo		Kota Probolinggo	
	Value	Sign	Value	Sign	Value	Sign
1. Pertanian	2.41	+	2.34	+	0.51	-
2. Pertambangan dan Penggalian	0.84	-	0.56	-	0.00	-
3. Industri Pengolahan	0.53	-	0.72	-	0.54	-
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0.43	-	0.56	-	0.98	-
5. Bangunan	0.90	-	0.51	-	0.28	-
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0.79	-	0.77	-	1.44	+
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0.59	-	0.93	-	1.79	+
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.79	-	0.89	-	1.35	+
9. Jasa-jasa	1.44	+	0.91	-	1.17	+

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.66 maka dapat teridentifikasi sektor-sektor basis maupun non basis mana saja yang terdapat di Kabupaten/Kota di SWP 5 Jawa Timur. Di Kabupaten Lumajang terdapat 2 sektor basis, yaitu sektor pertanian dengan indeks rata-rata sebesar 1.36, sektor jasa-jasa 1.44. Di Kabupaten Probolinggo hanya terdapat 1 sektor basis yaitu sektor pertanian 2.34. Di Kota Probolinggo terdapat 4 sektor basis yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran 1.44; pengangkutan dan komunikasi 1.79; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1.35; dan sektor jasa-jasa 1.17.

Hal tersebut merupakan sektor basis yang menggambarkan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di SWP 5. Atas

dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sektor yang merupakan sektor non basis untuk Kabupaten Lumajang adalah sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kabupaten Probolinggo yaitu sektor sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Untuk Kota Probolinggo yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan.



Keterangan :

- sektor pertanian sebagai sektor unggulan
- sektor pengangkutan dan komunikasi

Gambar 4.29 Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Jawa Timur

4.2.5.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel 4.67 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan Kabupaten/Kota Di SWP 4

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74

No. SWP 5		Rata-rata RPs Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Probolinggo	-0.54	-1.09	1.41	1.04	1.44	0.95	0.61	1.06	0.66
2	Kab.Probolinggo	1.15	0.88	1.12	1.06	0.92	1.03	1.12	1.08	1.26
3	Lumajang	1.46	0.95	1.24	0.96	0.91	1.02	0.66	0.95	1.30

Sumber: hasil analisis

Di Kabupaten Probolinggo sektor perdagangan, hotel dan restoran; pangangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Probolinggo mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Probolinggo adalah sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor bangunan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Probolinggo, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Probolinggo. Sebaliknya untuk sektor pertambangan dan penggalian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Probolinggo tingkat pertumbuhannya rendah. Sehingga sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kota Probolinggo sektor bangunan; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kota Probolinggo mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di Kota Probolinggo adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih.

Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan pangangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kota Probolinggo,

sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kota Probolinggo. Sebaliknya untuk sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; serta jasa-jasa baik di tingkat Provinsi maupun Kota Probolinggo tingkat pertumbuhannya rendah. Sehingga sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa kegiatan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Lumajang mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Lumajang adalah sektor pertanian; industri pengolahan; dan jasa-jasa yang kegiatan ini diharapkan akan potensial perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Lumajang, sebaliknya, tinggi di Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya untuk sektor pertambangan dan penggalian; serta jasa-jasa, baik di tingkat Kabupaten Lumajang maupun Provinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan yang rendah.

4.2.5.3 Analisis overlay

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dari pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ) atas Kabupaten/Kota di SWP 5, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.68 Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 5 Provinsi Jawa Timur

SWP 5		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		LQ	n	RPs	n	LQ	n	RPs	n	LQ	n	RPs	n	LQ	n	RPs	n	LQ	n	RPs	n
1	Kota Probolinggo	0.51	-	-0.54	-	0	-	-1.09	-	0.54	-	1.41	+	0.98	-	1.04	+	0.28	-	1.44	+
2	Kab.Probolinggo	2.34	+	1.15	+	0.56	-	0.88	-	0.72	-	1.12	+	0.56	-	1.06	+	0.51	-	0.92	-
3	Kab.Lumajang	2.41	+	1.46	+	0.84	-	0.95	-	0.53	-	1.24	+	0.43	-	0.96	-	0.9	-	0.91	-

Sumber: hasil analisis

Lanjutan Tabel 4.68 Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 5 Provinsi Jawa Timur

SWP 5		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n
1	Kota Probolinggo	1.44	+	0.95	-	1.79	+	0.61	-	1.35	+	1.06	+	1.17	+	0.66	-
2	Kab.Probolinggo	0.77	-	1.03	+	0.93	-	1.12	+	0.89	-	1.08	+	0.91	-	1.26	+
3	Kab.Lumajang	0.79	-	1.02	+	0.59	-	0.66	-	0.79	-	0.95	-	1.44	+	1.3	+

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.68 diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya di tunjukkan oleh Kabupaten Lumajang dengan sektor pertanian; jasa-jasa. Di Kabupaten Probolinggo adalah sektor pertanian. Di Kota Probolinggo adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kabupaten Lumajang adalah sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran. Di Kabupaten Probolinggo yakni sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Sedangkan di Kota Probolinggo yakni industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; jasa-jasa.

Bila dilihat dari sektor yang sedang mengalami penurunan yakni untuk Kota Probolinggo adalah perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa. Bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya maka untuk Kabupaten Lumajang dengan sektor pertambangan dan penggalian; dan listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Probolinggo yakni sektor pertambangan dan penggalian; bangunan. Untuk Kota Probolinggo yakni sektor pertanian; pertambangan dan penggalian.

4.2.5.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

4.2.5.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.69 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 5

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	8,946.18	1,343,227.68	0.008
2	Kabupaten Probolinggo	1970.940	1,369,124.41	0.001
3	Kota Probolinggo	11548.150	-147,044.76	-0.063

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* diketahui bahwa Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo sama-sama memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor pertanian. Sebaliknya Kota Probolinggo tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif.

4.2.5.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 4.70 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	2,834.68	-24,277.44	-0.01
2	Kabupaten Probolinggo	932.124	-68,544.68	-0.02
3	Kota Probolinggo	247.221	-46,374.06	-0.06

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* diketahui bahwa Kabupaten/Kota di SWP 5 tidak ada yang memiliki keunggulan spesialisasi maupun keunggulan kompetitif untuk sektor pertambangan dan penggalian.

4.2.5.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.71 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Industri Pengolahan di SWP 5

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	643.50	-784,218.39	0.012
2	Kabupaten Probolinggo	-3544.970	-505,013.60	0.006
3	Kota Probolinggo	-9447.235	-245,398.59	-0.003

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, Kabupaten/Kota yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor industri pengolahan yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo. Namun sebaliknya Kota Probolinggo tidak memiliki Keunggulan kompetitif maupun spesialisasi, begitupun dengan Kabupaten Lumajang dan Probolinggo.

4.2.5.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.72 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	0.16	-50,750.95	-0.003
2	Kabupaten Probolinggo	-129.781	-41,480.14	0.002
3	Kota Probolinggo	137.290	-426.09	-0.003

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* dapat diketahui bahwa Kabupaten Probolinggo yang memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi. Sebaliknya Kabupaten Lumajang dan Kota Probolinggo tidak mempunyai keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor listrik, gas dan air bersih.

4.2.5.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.73 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Bangunan di SWP 5

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	-506.85	-20,778.24	-0.01
2	Kabupaten Probolinggo	486.563	-110,970.14	-0.01
3	Kota Probolinggo	161.089	-49,061.76	0.01

Sumber: hasil analisis

Selanjutnya pada sektor bangunan hanya Kota Problonggo yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor Bangunan namun tidak spesialisasi. Sebaliknya Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor bangunan.

4.2.5.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.74 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel, dan Rest

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	-1,824.60	-434,751.39	0.001
2	Kabupaten Probolinggo	-1608.891	-502,190.55	0.002
3	Kota Probolinggo	-870.226	288,814.10	-0.006

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.74 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo memiliki keunggulan kompetitif untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun tidak spesialisasi. Sebaliknya untuk Kota Probolinggo memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran.

4.2.5.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.75 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Komunika

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	-5,406.65	-201,558.80	-0.04
2	Kabupaten Probolinggo	-489.162	-38,383.07	0.01
3	Kota Probolinggo	6957.300	127,654.08	-0.04

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.75 diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi untuk sektor pengangkutan dan komunikasi. Sebaliknya, untuk Kota Probolinggo memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif. Dan selanjutnya untuk

Kabupaten Lumajang tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun keunggulan kompetitif.

4.2.5.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.76 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 5

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	82.62	-74,840.95	-0.004
2	Kabupaten Probolinggo	-264.953	-42,483.92	0.006
3	Kota Probolinggo	296.792	40,054.91	0.002

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.77 diatas menunjukkan bahwa hanya Kota Probolinggo yang memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif unntuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sebaliknya untuk Kabupaten Lumajang tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi dan kompetitif. Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi untuk sekto keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

4.2.5.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.78 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Lumajang	-52.00	247,948.48	0.015
2	Kabupaten Probolinggo	-801.386	-60,058.31	0.012
3	Kota Probolinggo	3774.016	31,782.16	0.0007

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel diatas diketahui bahwa hanya Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang yang memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor jasa-jasa. Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak berspesialiasi untuk sektor jasa-jasa.

4.2.5.5 Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 5

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa hanya Kota Probolinggo yang masuk dalam kuadran 3 yaitu daerah maju tetapi tertekan (*low growth but high income*) atau juga disebut sebagai daerah berkembang cepat (*growing region*), merupakan

daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah tetapi pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur.

Seperti yang terlihat pada Tabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rata-rata Kota Probolinggo sebesar 6.35% dengan pendapatan rata-rata Rp. 9.860.709.08, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo lebih kecil dari pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 6.54%, namun pendapatan rata-rata Kota Probolinggo lebih besar dibandingkan Provinsi yakni Rp. 9.733.686,88. Sebaliknya Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo termasuk dalam kuadran ke 4 yang artinya merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi.

Tabel 4.79 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 5 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP 5	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kabupaten Lumajang	6.726.060.01	6.12	4
2	Kabupaten Probolinggo	6.511.592.72	6.25	4
3	Kota Probolinggo	9.860.709.08	6.35	3
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

Sumber: hasil analisis

4.2.5.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 5 Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan atas dasar pemilihan sektor-sektor ekonomi daerah yang bersangkutan. Analisis potensi setiap sektor berguna untuk mengetahui keunggulan komparatif dan kompetitif suatu sektor. Setelah diketahui potensi masing-masing sektor, yaitu kekuatan dan kelemahan maka dapat ditentukan sektor mana yang patut menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan.

Kemudian sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031 yang di setiap satuan wilayah pengembangan dibentuk dan dikembangkan yang salah satunya berdasarkan potensi dan fungsi ekonominya. Yang mana setiap SWP memiliki fungsi-fungsi ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi disetiap satuan wilayah pengembangan maka akan dilakukan perbandingan berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Sehingga dengan dilakukannya perbandingan tersebut diharapkan akan diketahui sektor-sektor basis pendukung utama perekonomian didaerah tersebut. Yang menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis data LQ dan MRP menunjukkan Kabupaten/Kota di SWP 5 memiliki beberapa sektor basis/prioritas dilihat dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya adalah sektor pertanian; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa merupakan sektor basis maupun prioritas yang dominan yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 5 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya.

Sektor pertanian merupakan sektor basis daerah di satuan wilayah pengembangan 5, sektor pertanian tersebut merupakan hasil sumbangan dari Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, sedangkan untuk Kota Probolinggo selama tahun analisis menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor nonbasis dan pertumbuhannya mengalami penurunan. Untuk Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang sektor pertanian ini merupakan lumbung pangan. Misalnya di Kabupaten Probolinggo, daerah ini terkenal sebagai

sentra tanaman bawang merah. Luas panen dan produktivitas tertinggi berada di Kecamatan Tegalsiwalan dan Leces, yaitu masing-masing sebesar 1.722 hektar dan 11,23 ton/hektar serta 941 hektar dan 9,57 ton/hektar. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, produksi padi pada tahun 2011 mencapai 308.371 ton, dengan luas panen 60.107 hektar dan produktivitasnya 51,30 kwintal/hektar.

Sedangkan untuk Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Jatim yang dikenal sebagai lumbung pangan dan mampu menyuplai beras untuk daerah lain. Pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor unggulan Kabupaten Lumajang dan menyumbangkan persentase terbesar bagi PDRB Kabupaten Lumajang. Sektor pertanian menyumbang sebanyak 33,60 persen pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 menyumbang PDRB Kab. Lumajang sebanyak 33,77 persen. Selain mampu menyumbangkan persentase yang besar bagi PDRB, sektor pertanian juga mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Ini menandakan bahwa sektor pertanian memiliki potensi yang cukup besar bagi satuan wilayah pengembangan 5. Jadi kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang paling signifikan yakni melalui sektor pertanian.

Jika hasil analisis tersebut dihubungkan dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan oleh RTRW dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur dimana satuan wilayah pengembangan 5 memiliki fungsi ekonomi seperti pertanian; pertambangan dan penggalian; dan sektor jasa-jasa maka dapat disimpulkan bahwa disektor pertanian terdapat 2 Kabupaten/Kota yang sudah sesuai dengan kriteria fungsi ekonomi yang telah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur diantaranya Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Di sektor pertambangan dan penggalian tidak terdapat Kabupaten/Kota yang berspesialisasi di sektor tersebut. Kemudian disektor jasa-jasa terdapat Kabupaten Lumajang.

Tabel 4.80 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 5		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 5				Fungsi Wilayah SWP 5															
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Probolinggo	0.51	-	-0.54	-	0.00	-	-1.09	-	0.54	-	1.41	+	0.98	-	1.04	+	0.28	-	1.44	+
2	Kab.Probolinggo	2.34	+	1.15	+	0.56	-	0.88	-	0.72	-	1.12	+	0.56	-	1.06	+	0.51	-	0.92	-
3	Kab.Lumajang	2.41	+	1.46	+	0.84	-	0.95	-	0.53	-	1.24	+	0.43	-	0.96	-	0.9	-	0.91	-

Lanjutan Tabel 4.80 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 1 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 5		Sektor ke															
		6				7				8				9			
														Fungsi Wilayah SWP 5			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Probolinggo	1.44	+	0.95	-	1.79	+	0.61	-	1.35	+	1.06	+	1.17	+	0.66	-
2	Kab.Probolinggo	0.77	-	1.03	+	0.93	-	1.12	+	0.89	-	1.08	+	0.91	-	1.26	+
3	Kab.Lumajang	0.79	-	1.02	+	0.59	-	0.66	-	0.79	-	0.95	-	1.44	+	1.30	+

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share* yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota adalah sektor pertanian; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota berspesialisasi maupun berkompetitif secara bersamaan. Sehingga secara keseluruhan efek alokasi di setiap Kabupaten/Kota di SWP 5 menunjukkan nilai yang negatif, yang artinya kurang meratanya distribusi pendapatan atau kesempatan kerja di antara sektor ekonomi dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor.

Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi menurut sektoral Kabupaten/Kota di SWP 5, secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota memiliki keunggulan keduanya baik kompetitif dan spesialisasi. Jika kita deskripsikan bahwa Kabupaten/Kota dengan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk sektor pertanian yakni Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo. Untuk sektor keuangan, persewaan, persewaan dan jasa perusahaan adalah Kota Probolinggo. Untuk sektor jasa-jasa adalah kabupaten Lumajang dan Kota Probolinggo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.81 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 5 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kabupaten Lumajang	Spes	S	NS	S						
	Comp	CA	CD	CA	CA	CD	CA	CD	CA	CA
2. Kabupaten Probolinggo	Spes	S	NS							
	Comp	CA	CD	CA	CA	CD	CA	CA	CA	CA
3. Kota Probolinggo	Spes	NS	NS	NS	NS	NS	S	S	S	S
	Comp	CD	CD	CD	CA	CA	CD	CD	CA	CA

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur (diolah)

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

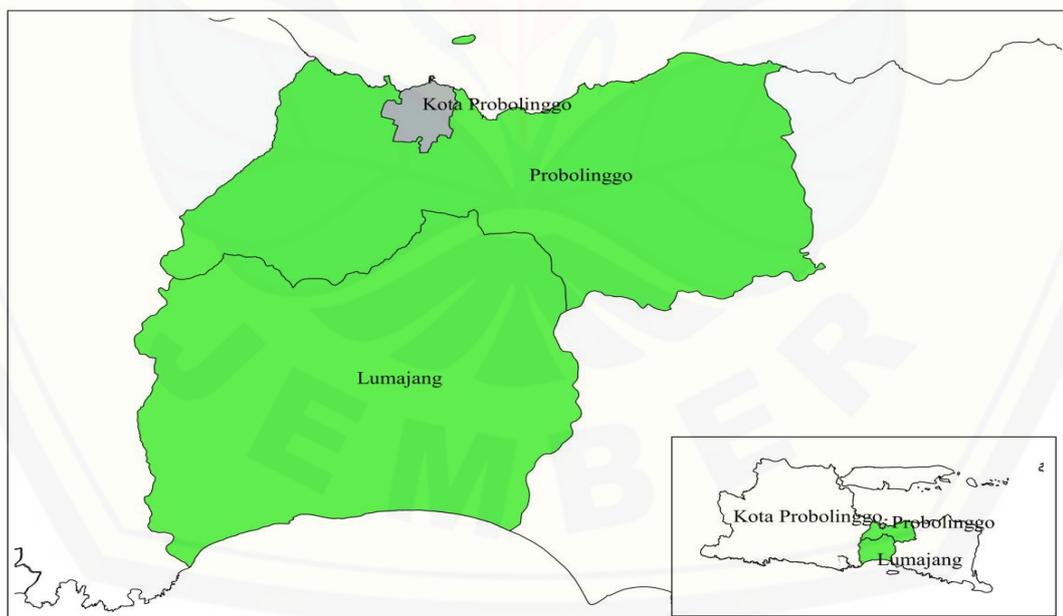
S : Specialized.

NS : Not Specialized.

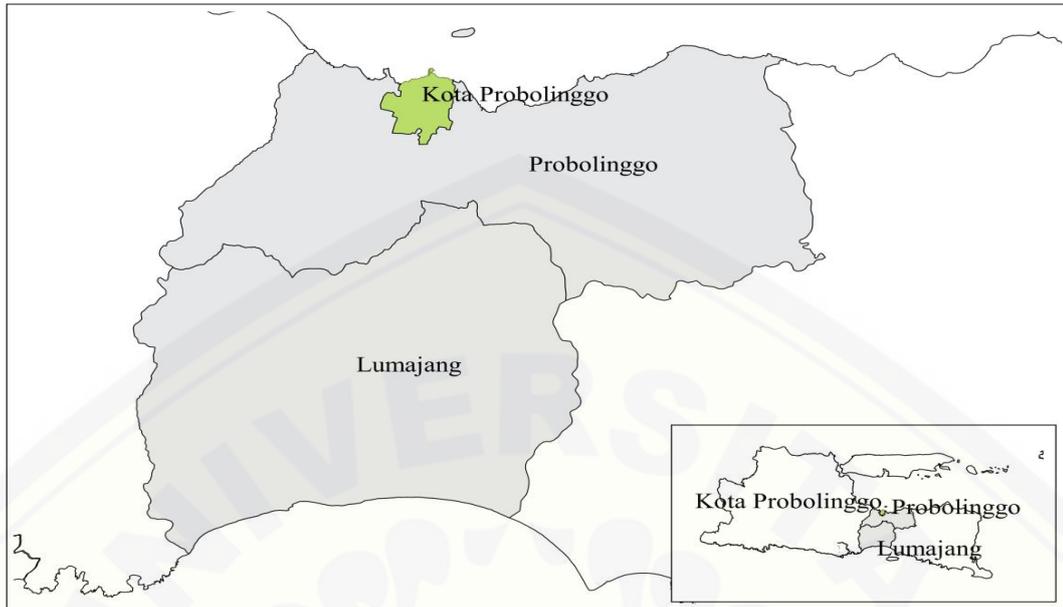
Berdasarkan hasil analisis Tipologi *Klassen* menerangkan bahwa Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 5 merupakan daerah yang bertipologi daerah maju tapi tertekan yakni Kota Probolinggo, sedangkan daerah bertipologi daerah relative tertinggal yakni Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan dan PDRB perkapita lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Timur. sedangkan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan dan PDRB perkapita yang lebih kecil dari pertumbuhan dan PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur.

Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Berkembang
Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal
1. Kota Probolinggo	1. Kabupaten Probolinggo 2. Kabupaten Lumajang

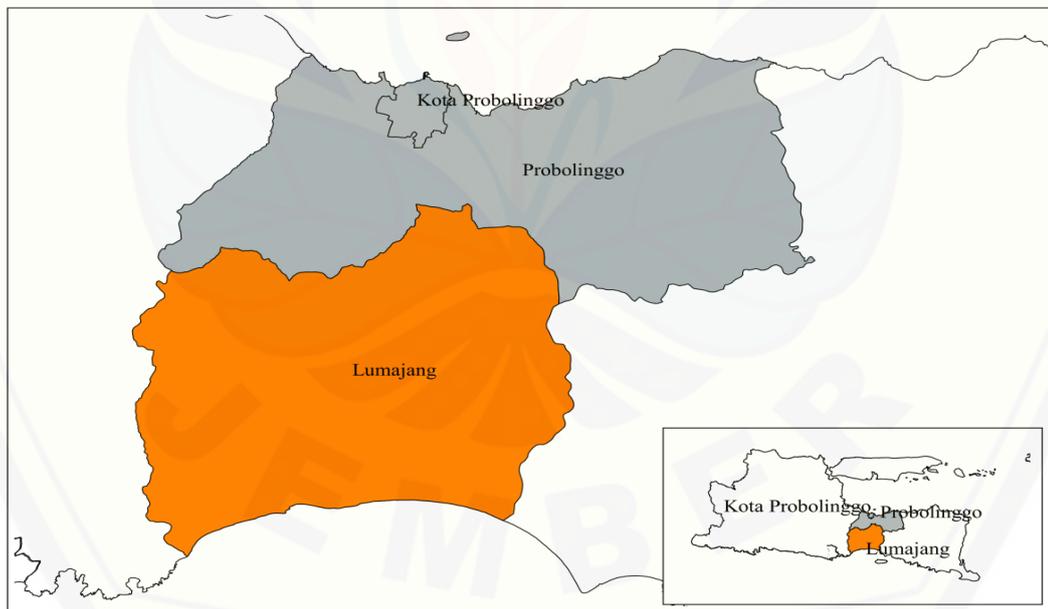
Gambar 4.136 Tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5



Gambar 4.30 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Yang Mempunyai Ekonomi Basis di Sektor Pertanian



Gambar 4.31 Kab./Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Yang Mempunyai Ekonomi Basis Di Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan



Gambar 4.32 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 5 Yang Mempunyai Ekonomi Di Sektor Jasa-jasa

4.2.6 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Jawa Timur

4.2.6.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari Tahun 2009-2013 untuk Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Jawa Timur dapat diketahui pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.82 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Provinsi Jawa Timur

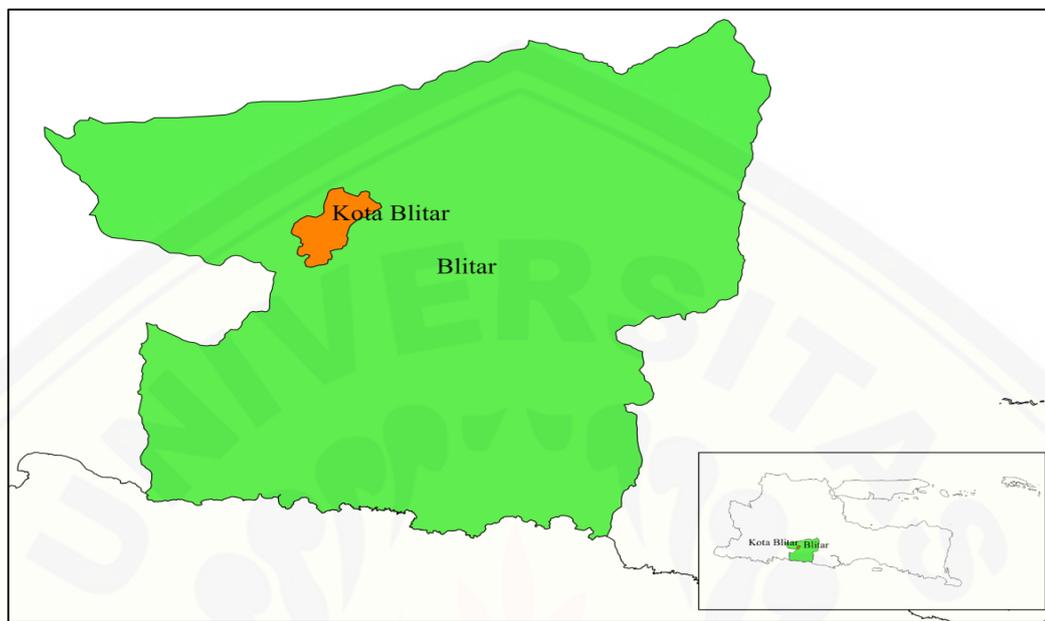
Lapangan Usaha	Kabupaten Blitar		Kota Blitar	
1. Pertanian	3.23	+	0.46	-
2. Pertambangan dan Penggalian	1.17	+	0.01	-
3. Industri Pengolahan	0.13	-	0.45	-
4. Listrik, Gas, Air Bersih	0.28	-	1.15	+
5. Bangunan	0.62	-	1.37	+
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.85	-	0.98	-
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0.31	-	1.77	+
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.03	+	2.02	+
9. Jasa-jasa	1.18	+	2.32	+

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.82 maka dapat teridentifikasi sektor-sektor basis maupun non basis mana saja yang terdapat di Kabupaten/Kota di SWP 6 Jawa Timur. Di Kabupaten Blitar terdapat 4 sektor basis adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Sehingga sektor tersebut merupakan unggulan di Kabupaten Blitar dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Di Kota Blitar terdapat 5 sektor basis adalah sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Hal ini menunjukkan sektor tersebut merupakan sektor basis yang menggambarkan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota SWP 6 serta sektor ini sudah mampu memenuhi kebutuhan di

daerahnya. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.



Keterangan :

■ sektor pertanian sebagai sektor unggulan

■ sektor jasa-jasa sebagai sektor unggulan

Gambar 4.33 Sektor-sektor Basis Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Jawa Timur

4.2.6.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel 4.83 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di SWP 6 Provinsi Jawa Timur

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74

No.	SWP 6	Rata-rata RPs Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Blitar	1.08	-2.25	1.05	0.77	0.94	0.89	0.63	0.91	1.01
2	Kab.Blitar	1.60	1.87	0.83	1.17	1.21	1.04	0.66	0.96	1.31

Pada Tabel 4.83 diatas menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Blitar

mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan sektor potensial di Kabupaten Blitar adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Blitar, dan sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Blitar.

Di Kota Blitar menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan sektoral yang merupakan kegiatan dominan pertumbuhan yang artinya tidak ada kegiatan pada tingkat Provinsi dan Kota Blitar mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan sektor potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Blitar adalah sektor pertanian; industri pengolahan; dan jasa-jasa yang kegiatan ini diharapkan potensial perannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan Provinsi.

Sedangkan sektor-sektor seperti bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kota Blitar, dan sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya untuk sektor pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kota Blitar memiliki pertumbuhan yang rendah, sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

4.2.6.3 Analisis overlay

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dari pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ) atas Kabupaten/Kota di SWP 6, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.84 Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 6 Provinsi Jawa Timur

SWP 4		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Blitar	0.46	-	1.08	+	0.01	-	-2.25	-	0.45	-	1.05	+	1.15	+	0.77	-	1.37	+	0.94	-
2	Kab.Blitar	3.23	+	1.60	+	1.17	+	1.87	+	0.13	-	0.83	-	0.28	-	1.17	+	0.62	-	1.21	+

Sumber: hasil analisis

Lanjutan Tabel 4.84 Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 6 Provinsi Jawa Timur

SWP 4		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n
1	Kota Blitar	0.98	-	0.89	-	1.77	+	0.63	-	2.02	+	0.91	-	2.32	+	1.01	+
2	Kab.Blitar	0.85	-	1.04	+	0.31	-	0.66	-	1.03	+	0.96	-	1.18	+	1.31	+

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.84 diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya di tunjukkan oleh Kabupaten Pacitan dengan sektor pertanian; pertambangan dan sektor jasa-jasa. Sedangkan di Kota Blitar adalah hanya terdapat sektor jasa-jasa.

Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kabupaten Blitar adalah sektor listrik; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kota Blitar yakni sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Bila dilihat dari sektor yang sedang mengalami penurunan yakni untuk Kabupaten Blitar adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kota Blitar yakni sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya maka untuk Kabupaten Blitar adalah sektor industri pengolahan; pengangkutan dan komunikasi. Untuk Kota Blitar yakni pertambangan dan penggalian; dan perdagangan, hotel dan restoran.

4.2.6.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

4.2.6.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.85 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 6

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	24153.956	1,907,985.76	0.01
2	Kota Blitar	141.49	-80,659.82	0.00

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.85 diatas menunjukkan bahwa untuk sektor pertanian hanya Kabuapten Blitar yang memiliki keunggulan kedua-duanya baik keunggulan kompetitif maupun spesialisasi. Sebaliknya hanya Kota Blitar yang tidak memiliki keunggulan spesialisasi namun sektor pertanian tersebut kompetitif di Kabupaten Blitar.

4.2.6.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 4.86 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 6

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	707.455	19,210.45	0.03
2	Kota Blitar	3,180.59	-22,462.20	-0.14

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa hanya Kabupaten Blitar yang mempunyai keunggulan kompetitif maupun spesialisasi untuk sektor pertambangan dan penggalian. Sebaliknya di Kota Blitar tidak terdapat keunggulan spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor tersebut.

4.2.6.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.87 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Industri Pengolahan di SWP 6

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	13270.368	-1,304,939.10	-0.01
2	Kota Blitar	-681.98	-143,503.78	0.00

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* diatas diketahui bahwa Kabupaten Blitar tidak memiliki keunggulan kompetitif maupun spesialisasi untuk sektor industri pengolahan, namun sebaliknya Kota Blitar memiliki keunggulan kompetitif untuk sektor industri dan pengolahan walaupun tidak berspesialisai.

4.2.6.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.88 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	-568.286	-57,358.00	0.01
2	Kota Blitar	-30.92	2,180.35	-0.01

Sumber: hasil analisis

Selanjutnya untuk sektor listrik, gas dan air bersih diketahui bahwa Kabupaten Blitar memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi. Sedangkan Kota Blitar memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif untuk sektor listrik, gas dan air bersih.

4.2.6.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.89 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Bangunan di SWP 6

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	-1095.201	-74,122.87	0.01
2	Kota Blitar	-107.22	12,419.60	-0.01

Sumber: hasil analisis

Kemudian untuk sektor bangunan, dari Kabupaten Blitar hanya memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi. Sebaliknya Kota Blitar berspesialisasi namun tidak kompetitif untuk sektor bangunan.

4.2.6.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.90 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Rest

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	-1008.919	-285,294.75	0.00
2	Kota Blitar	36.82	-4,832.21	-0.01

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.91 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar dan Kota Blitar sama-sama tidak memiliki keunggulan spesialisasi, sebaliknya untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran ini hanya Kabupaten Blitar yang kompetitif.

4.2.6.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.92 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Komunisi

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	10820.702	-303,531.80	-0.04
2	Kota Blitar	-2,306.45	60,327.30	-0.04

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.92 diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Blirt maupun Kota Blitar sama-sama tidak memiliki keunggulan kompetitif, namun hanya Kota Blitar yang memiliki keunggulan spesialisasi daripada.

4.2.6.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.93 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuang, Sewa dan Js Perush

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	-36.535	9,565.24	0.00
2	Kota Blitar	-385.56	57,063.91	-0.01

Sumber: hasil analisis

Menurut data Pada Tabel 4.93 diatas diketahui bahwa Kabupaten dan Kota Blitar sama-sama memiliki keunggulan kompetitif, namun untuk keunggulan kompetitif hanya Kabupaten Blitar yang berkompetitif untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

4.2.6.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.94 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 6

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Blitar	1028.540	88,485.07	0.01
2	Kota Blitar	-11.82	119,466.85	0.00

Sumber: hasil analisis

Untuk Sektor jasa-jasa diketahui bahwa di Kabupaten Blitar maupun di Kota Blitar sama-sama memiliki keunggulan kompetitif maupun spesialisasi untuk sektor jasa-jasa.

4.2.6.5 Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 6 Jawa Timur

Metode *Klassen Tipology* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di SWP 6 Jawa Timur. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah.

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa Kabupaten Blitar maupun Kota Blitar termasuk dalam kuadran ke 4 yaitu daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) atau disebut juga sebagai daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur.

Seperti yang terlihat pada Tabel dibawahh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rata-rata Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya masing-masing sebesar 6.02% dengan pendapatan rata-rata Rp. 5.426.441.16 dan 6.49% dengan pendapatan rata-rata Rp. 7.940.603.81 yang mana lebih kecil dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan ekonomi rata-rata Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 6.54% dengan pendapatan rata-rata Rp. 9.733.686,88.

Tabel 4.95 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 6 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP 6	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kabupaten Blitar	5.426.441.16	6.02	4
2	Kota Blitar	7.940.603.81	6.49	4
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

4.2.6.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 6 Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kemudian sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031 Kabupaten/Kota di SWP 6 memiliki fungsi-fungsi ekonomi seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa. Sehingga untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi disatuan wilayah pengembangan 6 maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.

Sehingga dengan dilakukannya perbandingan tersebut diharapkan akan diketahui sektor-sektor basis pendukung utama perekonomian didaerah tersebut. Yang menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis data LQ dan MRP menunjukkan Kabupaten/Kota di SWP 6 memiliki beberapa sektor basis/prioritas dilihat dari

kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya, oleh karena itu dalam analisis overlay dapat menunjukkan sektor prioritas tersebut dari kedua kriteria tersebut. Sektor basis tersebut adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; dan sektor jasa-jasa merupakan sektor basis maupun prioritas yang dominan yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 6 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya.

Sektor pertanian yang berada di daerah satuan wilayah pengembangan merupakan salah satu sektor prioritas. Sektor pertanian di daerah ini meliputi : tanaman pangan dan hortikultura, peternakan kehutanan dan perkebunan, dan perikanan. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah ini untuk sektor pertanian lebih unggul dibandingkan sektor industri, hal ini dikarenakan struktur ekonomi masih sangat tergantung pada sektor pertanian. Ketergantungan pada sektor pertanian jelas sangat bergantung pada alam akan sangat rentan dengan gejolak alam. Struktur perekonomian dominan bertumpu pada sektor primer yaitu sektor pertanian dan pertambangan/Galian. Besaran sektor primer dalam menopang perekonomian daerah mencapai 47,90 persen. Pada sektor ini tentu saja sektor pertanian memberikan peran yang dominan yaitu mencapai 54,54 persen. Berkaitan dengan hal tersebut yang perlu di pikirkan dan di carikan terobosan inovasi adalah bagaimana hasil-hasil pertanian tersebut tidak hanya di pasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu kedepan diperlukan stimulasi terhadap sektor industri pengolahan sehingga dapat mengisi kekosongan ruang usaha antara produksi bahan mentah yang dihasilkan sektor pertanian dengan pemasaran. Sektor prioritas ekonomi basis selanjutnya adalah sektor jasa-jasa, sektor ini merupakan sektor yang memiliki kontribusi dan pertumbuhannya tinggi setelah sektor pertanian, seperti yang tertera pada Tabel dibawah, bahwa untuk Kota Blitar sektor jasa merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar, disamping itu juga terdapat sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Jika hasil analisis tersebut dihubungkan dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan oleh RTRW dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur dimana

satuan wilayah pengembangan 6 memiliki fungsi ekonomi seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; dan sektor jasa-jasa maka dapat disimpulkan bahwa disektor pertanian terdapat Kabupaten Blitar yang sudah sesuai dengan kriteria fungsi ekonomi yang telah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur. Di sektor pertambangan dan penggalian terdapat Kabupaten Blitar. Kemudian disektor jasa-jasa terdapat Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Sehingga bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan lagi terhadap faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:



Tabel 4.96 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 6		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 6				Fungsi Wilayah SWP 6															
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Blitar	0.46	-	1.08	+	0.01	-	-2.25	-	0.45	-	1.05	+	1.15	+	0.77	-	1.37	+	0.94	-
2	Kab.Blitar	3.23	+	1.60	+	1.17	+	1.87	+	0.13	-	0.83	-	0.28	-	1.17	+	0.62	-	1.21	+

Lanjutan Tabel 4.96 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 6		Sektor ke															
		6				7				8				9			
														Fungsi Wilayah SWP 6			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kota Blitar	0.98	-	0.89	-	1.77	+	0.63	-	2.02	+	0.91	-	2.32	+	1.01	+
2	Kab.Blitar	0.85	-	1.04	+	0.31	-	0.66	-	1.03	+	0.96	-	1.18	+	1.31	+

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share* yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota berspesialisasi maupun berkompetitif secara bersamaan. Sehingga secara keseluruhan efek alokasi di setiap Kabupaten/Kota di SWP 6 menunjukkan nilai yang negatif, yang artinya kurang meratanya distribusi pendapatan atau kesempatan kerja di antara sektor ekonomi dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor.

Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* tentang keunggulan kompetitif dan spesialisasi menurut sektoral Kabupaten/Kota di SWP 6 secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota memiliki keunggulan baik kompetitif dan spesialisasi. Jika kita deskripsikan Kabupaten/Kota dengan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi diantaranya yaitu untuk sektor pertanian dimiliki Kabupaten Blitar. Untuk sektor pertambangan dan penggalian yakni Kabupaten Blitar. Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yakni Kabupaten Blitar. sektor jasa-jasa yakni Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Sebaliknya Kabupaten maupun Kota Blitar tidak memiliki keunggulan untuk kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor-sektor seperti sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.97 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 6 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kab. Blitar	Spes	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	S	S
	Comp	CA	CA	CD	CA	CA	CA	CD	CA	CA
2. Kota Blitar	Spes	NS	NS	NS	S	S	NS	S	S	S
	Comp	CA	CD	CA	CD	CD	CD	CD	CD	CA

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur (diolah).

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

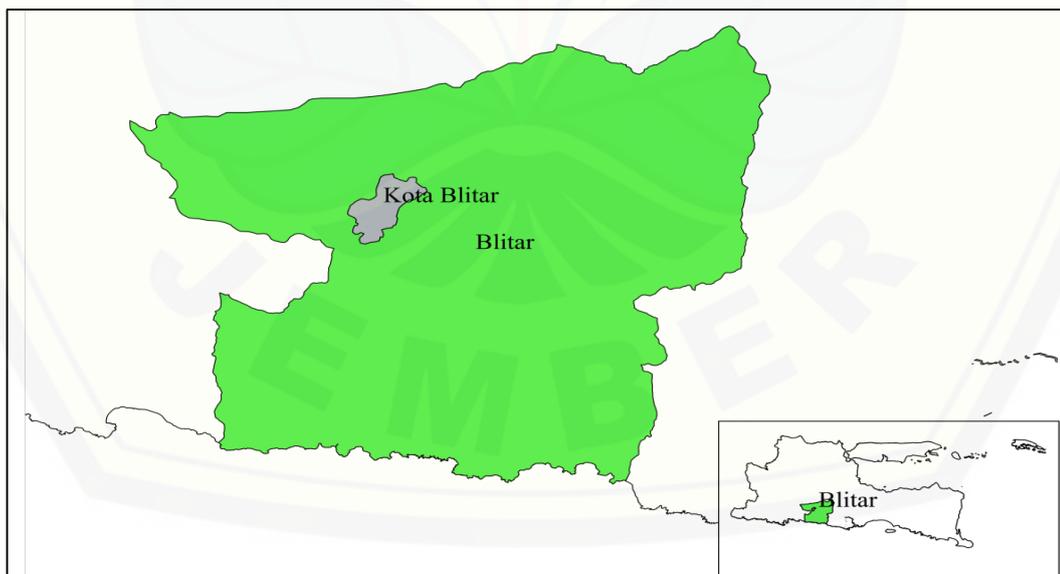
S : Specialized.

NS : Not Specialized.

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen menerangkan bahwa Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 6 merupakan daerah yang bertipologi relative tertinggal diantaranya terdapat Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan dan PDRB perkapita yang relative lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur.

Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Berkembang
Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal
	1. Kabupaten Blitar 2. Kota Blitar

Gambar 4.155 Tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6



Gambar 4.34 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Yang Mempunyai Basis Ekonomi di Sektor Pertanian



Gambar 4.35 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Yang Mempunyai Basis Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian



Gambar 4.36 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 6 Yang Mempunyai Basis Ekonomi di Sektor Jasa-jasa

4.2.7 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Jawa Timur

4.2.7.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari Tahun 2009-2013 untuk Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Jawa Timur dapat diketahui pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.98 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Jawa Timur

Lapangan Usaha	Kabupaten Jember		Kabupaten Bondowoso		Kabupaten Situbondo	
	Value	Sign	Value	Sign	Value	Sign
1. Pertanian	2.70	+	3.13	+	2.18	+
2. Pertambangan dan Penggalian	1.53	+	0.34	-	0.90	-
3. Industri Pengolahan	0.42	-	0.65	-	0.40	-
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0.63	-	0.50	-	0.66	-
5. Bangunan	0.66	-	0.38	-	0.89	-
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0.77	-	0.76	-	1.12	+
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0.60	-	0.20	-	0.68	-
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.98	-	0.45	-	0.65	-
9. Jasa-jasa	1.14	+	0.91	-	0.98	-

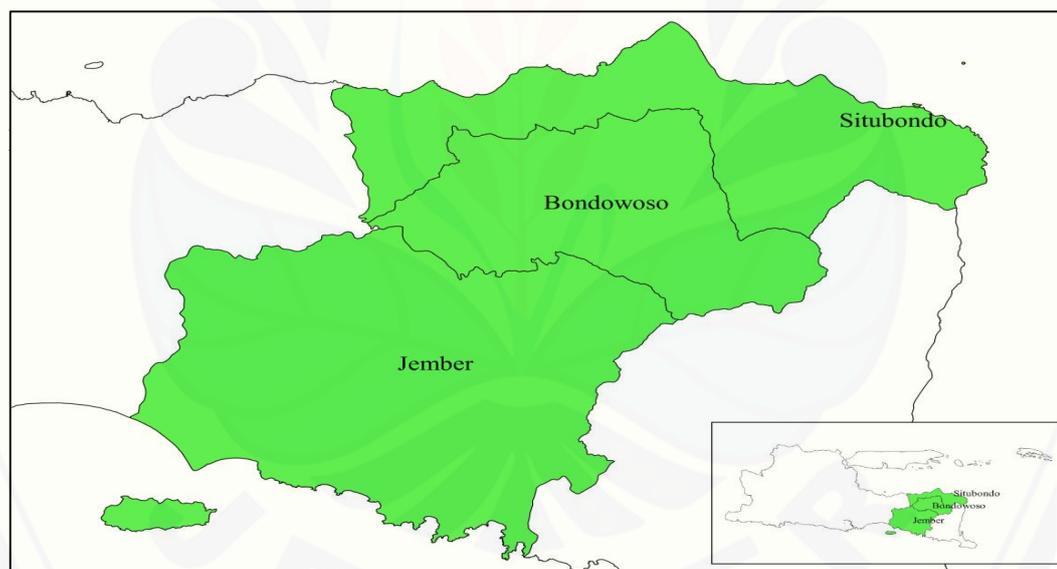
Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.98 maka dapat teridentifikasi sektor-sektor basis maupun non basis mana saja yang terdapat di Kabupaten/Kota di SWP 7 Jawa Timur. Di Kabupaten Jember terdapat 3 sektor basis, yaitu sektor pertanian dengan indeks rata-rata sebesar 2.70, sektor pertambangan sebesar 1.53, sektor jasa-jasa sebesar 1.14. Di Kabupaten Bondowoso mempunyai 1 sektor basis yaitu pertanian 3.13. Dengan subsektor unggulannya yakni tanaman bahan makanan 3.47; tanaman perkebunan 4.29; peternakan 3.06; kehutanan 1.91; kayu dan barang dari kayu 1.11; kertas dan barang dari kertas 2.43; jasa pemerintahan umum 1.56; dan jasa hiburan dan kebudayaan 1.04.

Di Kabupaten Situbondo terdiri dari 2 sektor basis yakni sektor pertanian 2.18; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1.12. Hal ini menunjukkan sektor di atas merupakan sektor basis yang menggambarkan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap

peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di SWP 7. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Sektor yang merupakan sektor non basis di Kabupaten Jember yakni sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kabupaten Bondowoso yaitu sektor Pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa. Di Kabupaten Situbondo yaitu pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.



Gambar 4.37 Sektor-sektor Unggulan Utama Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Jawa Timur

4.2.7.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel 4.99 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Provinsi Jawa Timur

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74
No.	SWP 1	Rata-rata RPs Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Jember	1.80	1.32	1.32	1.11	1.12	1.05	0.82	1.02	1.49
2	Kab.Bondowoso	1.79	0.94	1.15	1.02	1.09	0.99	0.77	0.99	1.24
3	Kab.Situbondo	1.70	0.80	1.19	0.94	0.75	0.92	0.64	0.90	1.27

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.99 diatas menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Jember mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Jember adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk sektor pengangkutan dan komunikasi pertumbuhannya rendah di Kabupaten Jember, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Bondowoso menunjukkan bahwa kegiatan sektor bangunan merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Bondowoso mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Bondowoso adalah sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan jasa-jasa yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, perswaan dan jasa perusahaan

pertumbuhannya rendah di Kabupaten Bondowoso, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Sebaliknya untuk sektor pertambangan dan penggalian baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Bondowoso memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan sektoral yang merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan, artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Situbondo tidak mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Situbondo adalah sektor pertanian; industri pengolahan; dan jasa-jasa yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Situbondo, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Situbondo. Sebaliknya untuk sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Situbondo memiliki pertumbuhan yang rendah. Sehingga sektor-sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah tersebut.

4.2.7.3 Analisis overlay

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dari pertumbuhan (MRP) dan kriteria kontribusi (LQ) atas Kabupaten/Kota di SWP 7, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.100 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 7 Provinsi Jawa Timur

SWP 4		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		LQ	n	RP _s	n	LQ	n	RP _s	n	LQ	n	RP _s	n	LQ	n	RP _s	n	LQ	n	RP _s	n
1	Kab.Jember	2.7	+	1.8	+	1.53	+	1.32	+	0.42	-	1.32	+	0.63	-	1.11	+	0.66	-	1.12	+
2	Kab.Bondowoso	3.13	+	1.79	+	0.34	-	0.94	-	0.65	-	1.15	+	0.5	-	1.02	+	0.38	-	1.09	+
3	Kab.Situbondo	2.18	+	1.7	+	0.9	-	0.8	-	0.4	-	1.19	+	0.66	-	0.94	-	0.89	-	0.75	-

Sumber: hasil analisis

Lanjutan Tabel 4.100 Analisis Overlay Kabupaten/Kota Di SWP 7 Provinsi Jawa Timur

SWP 4		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n	LQ	n	RPr	n
1	Kab.Jember	0.77	-	1.05	+	0.6	-	0.82	-	0.98	-	1.02	+	1.14	+	1.49	+
2	Kab.Bondowoso	0.76	-	0.99	-	0.2	-	0.77	-	0.45	-	0.99	-	0.91	-	1.24	+
3	Kab.Situbondo	1.12	+	0.92	-	0.68	-	0.64	-	0.65	-	0.9	-	0.98	-	1.27	+

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.100 diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya di tunjukkan oleh Kabupaten Jember dengan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Bondowoso adalah sektor pertanian. Sedangkan untuk Kabupaten Situbondo adalah dengan ditunjukkannya sektor pertanian.

Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kabupaten Jember adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Di Kabupaten Bondowoso yakni sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; dan jasa-jasa. Di Kabupaten Situbondo adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa. Bila dilihat dari sektor yang sedang mengalami penurunan yakni hanya di Kabupaten Situbondo yang menunjukkan adanya kegiatan yang mengalami penurunan yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya maka untuk Kabupaten Jember adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Di Kabupaten Bondowoso yakni sektor pertambangan dan penggalian; perdagangan, hotel dan restoran; dan pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Untuk Kabupaten Situbondo adalah sektor pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

4.2.7.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

4.2.7.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.101 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	49076.738	2,949,529.78	0.017
2	Kabupaten Bondowoso	16151.209	1,003,297.70	0.016
3	Kabupaten Situbondo	7020.355	623,431.95	0.011

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, semua Kabupaten yang berada di SWP 7 mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi. Namun tingkat keunggulan

tertinggi berada di Kabupaten Jember, dengan keunggulan spesialisasinya sebesar Rp. 2.949.529.78 dan 0.017 untuk keunggulan kompetitif.

4.2.7.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 4.102 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	594.823	136,915.87	0.003
2	Kabupaten Bondowoso	549.813	-47,692.32	-0.013
3	Kabupaten Situbondo	105.450	-7,859.26	-0.022

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share* pada Tabel 4.164 diatas, dapat diketahui bahwa hanya Kabupaten Jember yang mempunyai keunggulan baik kompetitif maupun spesialisasi. Sedangkan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo tidak memiliki keunggulan kedua-duanya baik spesialisasi dan kompetitif untuk sektor pertambangan dan penggalian.

4.2.7.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.103 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	-29019.402	-1,780,322.19	0.016
2	Kabupaten Bondowoso	-2390.406	-293,376.59	0.008
3	Kabupaten Situbondo	-5224.787	-554,879.50	0.009

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo sama-sama mempunyai keunggulan kompetitif untuk sektor industri pengolahan. Namun sebaliknya Kabupaten-Kabupaten tersebut tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor Industri pengolahan.

4.2.7.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.104 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	-347.698	-59,887.68	0.006
2	Kabupaten Bondowoso	-17.226	-21,884.50	0.0001
3	Kabupaten Situbondo	68.122	-16,687.50	-0.005

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, dapat diketahui bahwa Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan kompetitif namun tidak spesialisasi untuk sektor listrik, gas dan air bersih, namun sebaliknya untuk Kabupaten Situbondo tidak memiliki kedua-duanya baik keunggulan spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor listrik, gas dan air bersih.

4.2.7.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.105 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Bangunan di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	-1406.477	-132,532.93	0.010
2	Kabupaten Bondowoso	-482.817	-65,860.90	0.007
3	Kabupaten Situbondo	198.824	-12,120.44	-0.019

Sumber: hasil analisis

Selanjutnya pada sektor bangunan, Kabupaten yang memiliki keunggulan kompetitif yakni Kabupaten Jember dan Bondowoso, namun Kabupaten tersebut tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor ini. namun sebaliknya untuk Kabupaten Situbondo tidak memiliki keunggulan kedua-duanya, baik keunggulan spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor bangunan.

4.2.7.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.106 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	-5314.073	-889,593.89	0.004
2	Kabupaten Bondowoso	138.272	-254,298.28	-0.002
3	Kabupaten Situbondo	-1011.255	132,483.51	-0.008

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.106 diatas menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Bondowoso yang mempunyai keunggulan spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun untuk Kabupaten Jember memiliki keunggulan kompetitif walaupun tidak berspesialisai, sedangkan Kabupaten Situbondo memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran.

4.2.7.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.107 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Penggalian di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	6794.592	-357,154.06	-0.019
2	Kabupaten Bondowoso	4508.839	-194,236.53	-0.025
3	Kabupaten Situbondo	3044.419	-85,163.52	-0.037

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.107 diatas dapat diketahui bahwa baik Kabupaten Jember, Bondowoso, maupun Situbondo tidak ada yang memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor pengangkutan dan komunikasi.

4.2.7.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.108 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	-59.303	-10,149.51	0.002
2	Kabupaten Bondowoso	30.838	-98,313.58	-0.001
3	Kabupaten Situbondo	391.114	-70,040.60	-0.007

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.108 diatas diketahui bahwa Kabupaten Bondowoso dan Situbondo tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi dan kompetitif, namun sebaliknya untuk Kabupaten Jember memiliki keunggulan kompetitif walaupun tidak spesialisasi untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

4.2.7.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.109 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 7

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Jember	2848.068	143,194.61	0.023
2	Kabupaten Bondowoso	-325.092	-27,634.99	0.012
3	Kabupaten Situbondo	-91.476	-9,164.64	0.014

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.109 diatas diketahui bahwa Hanya Kabupaten Jember yang mempunyai keunggulan sekaligus baik spesialisasi maupun kompetitif. Namun untuk Kabupaten Bondowoso dan Situbondo hanya memiliki keunggulan kompetitif meskipun tidak spesialisasi untuk sektor jasa-jasa.

4.2.7.5 Analisis Tipologi Klassen

Metode *Klassen Tipology* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di SWP 1 Jawa Timur. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah.

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur terlihat bahwa semua Kabupaten yang berda di SWP 7 masuk dalam kuadran ke 4 diantaranya adalah Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo yang artinya daerah tersebut adalah daerah tertinggal (*low growth and low income*) atau disebut juga sebagai daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*), merupakan daerah yang pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.70 sebagai berikut:

Tabel 4.110 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 7 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP 7	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kabupaten Jember	5.286.563.49	6.54	4
2	Kabupaten Bondowoso	4.520.258.20	5.91	4
3	Kabupaten Situbondo	5.788.500.16	6.13	4
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

Sumber: hasil analisis

4.2.7.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 7 Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kemudian sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Tahun 2011-2031 Kabupaten/Kota di SWP 7 memiliki fungsi-fungsi ekonomi seperti sektor pertanian; pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa. Sehingga untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi disatuan wilayah pengembangan 7 maka akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Sehingga dengan dilakukannya penyesuaian tersebut diharapkan akan diketahui sektor-sektor basis pendukung utama perekonomian didaerah tersebut. Yang menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis data LQ dan MRP menunjukkan Kabupaten/Kota di SWP 7 memiliki beberapa sektor basis/prioritas dilihat dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya, oleh karena itu dalam analisis overlay dapat menunjukkan sektor prioritas tersebut dari kedua kriteria tersebut. sehingga sektor-sektor basis tersebut adalah terdiri dari sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; dan jasa-jasa merupakan sektor basis maupun prioritas yang dominan yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 7 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya.

Sektor pertanian daerah yang berada di satuan wilayah pengembangan merupakan sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB daerah dengan subsector terbesarnya adalah tanaman bahan pangan, dikarenakan mayoritas penduduk di daerah satuan wilayah pengembangan merupakan seorang petani. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, sebanyak 56,35 persen penduduk yang salah satunya di Kabupaten Jember merupakan penduduk pedesaan dan sisanya sebesar 43,65 persen adalah penduduk perkotaan. Lebih lanjut masih menurut data hasil Sensus Penduduk 2010 dari seluruh penduduk

yang bekerja (usia 15 tahun keatas) sebanyak 51,89 persen bekerja di sektor pertanian, 16,59 persen bekerja pada sektor perdagangan dan 5,20 persen bekerja di sektor industri pengolahan. Sehingga tidak mengherankan apabila sektor pertanian merupakan the main driving sector bagi roda perekonomian di Kabupaten Jember.

Namun sektor pertanian di Kabupaten Jember dan Bondowoso pada tahun 2013 mengalami penurunan. Penurunan peranan sektor pertanian lebih disebabkan oleh percepatan output sektor sekunder dan tersier yang lebih dinamis sehingga menghasilkan nilai tambah yang bagaikan deret ukur pada tiap tahunnya. Kenaikan sektor sekunder dan tersier tentunya dikarenakan sektor pertanian yang kian tangguh dan mantap. Namun diakui terjadinya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian juga ikut memberikan andil penurunan peranan sektor pertanian terhadap penciptaan nilai tambah, walaupun kecil pengaruhnya.

. Demikian pula sektor pertambangan dan penggalian, walaupun secara absolut untuk Kabupaten Jember nilainya selalu meningkat, namun untuk Kabupaten Bondowoso dan Situbondo mengalami penurunan. Misalnya di Kabupaten Bondowoso Dalam kurun waktu lima tahun terakhir peranan sektor ini semakin menurun walaupun relatif kecil, mulai tahun 2009 hingga tahun 2013, peranan sektor ini masing-masing 0,80 persen, 0,78 persen, 0,76 persen dan 0,72 persen sedangkan tahun 2013 peranannya menjadi 0,70 persen. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian relatif kecil karena pada umumnya usaha pertambangan dan penggalian di Bondowoso merupakan usaha perorangan dan berskala kecil. namun sektor ini sangat terpengaruh oleh kesediaan alam dalam memberikan resource nya dan kenaikan permintaan akan sektor ini terbatas.

Sektor basis selanjutnya merupakan sektor jasa-jasa, khususnya di Kabupaten Jember dan Bondowoso pada tahun 2013 sektor jasa-jasa mengalami kenaikan, di Kabupaten Jember tumbuh sebesar 5,96 persen. Dua subsector di dalamnya juga mengalami kenaikan. Subsektor jasa pemerintahan umum tumbuh sebesar 5,10 persen, hal ini terlihat dari naiknya belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan lainnya yang dikeluarkan pemerintah. Dan subsektor jasa swasta, yang meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa “hiburan dan rekreasi” dan jasa

“perorangan dan rumahtangga” mengalami pertumbuhan sebesar 6,81 persen. Sedangkan di Kabupaten Bondowoso, sektor jasa-jasa berdasarkan analisis LQ tidak menunjukkan kebasisan namun berdasarkan analisis MRP sektor ini memiliki pertumbuhan yang positif, sektor jasa-jasa pada tahun 2013 di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 0,28 poin yaitu dari 6,17 persen tahun 2012 menjadi 6,45 persen di tahun 2013. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan masing – masing sub sektornya, subsector jasa swasta mengalami peningkatan dari 6,84 persen tahun 2012 menjadi 7,19 persen di tahun 2013, sementara itu untuk subsector Pemerintahan Umum tahun 2013 juga mengalami peningkatan dari 5,59 persen tahun 2012 menjadi 5,80 persen pada tahun 2013.

Jika hasil analisis tersebut dihubungkan dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan oleh RTRW dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur dimana satuan wilayah pengembangan 7 memiliki fungsi ekonomi seperti pertanian; pertambangan dan penggalian; dan sektor jasa-jasa maka dapat disimpulkan bahwa disektor pertanian terdapat 3 Kabupaten yang sudah sesuai dengan kriteria fungsi ekonomi yang telah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Jawa Timur diantaranya Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo. Di sektor pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa terdapat Kabupaten Jember. Sehingga bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan lagi terhadap faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.111 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 7		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 7				Fungsi Wilayah SWP 7															
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kab.Jember	2.7	+	1.8	+	1.53	+	1.32	+	0.42	-	1.32	+	0.63	-	1.11	+	0.66	-	1.12	+
2	Kab.Bondowoso	3.13	+	1.79	+	0.34	-	0.94	-	0.65	-	1.15	+	0.50	-	1.02	+	0.38	-	1.09	+
3	Kab.Situbondo	2.18	+	1.7	+	0.90	-	0.80	-	0.40	-	1.19	+	0.66	-	0.94	-	0.89	-	0.75	-

Lanjutan Tabel. 4.111 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 7		Sektor ke															
		6				7				8				9			
														Fungsi Wilayah SWP 7			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kab.Jember	0.77	-	1.05	+	0.6	-	0.82	-	0.98	-	1.02	+	1.14	+	1.49	+
2	Kab.Bondowoso	0.76	-	0.99	-	0.20	-	0.77	-	0.45	-	0.99	-	0.91	-	1.24	+
3	Kab.Situbondo	1.12	+	0.92	-	0.68	-	0.64	-	0.65	-	0.90	-	0.98	-	1.27	+

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share* yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa. Secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota berspesialisasi maupun berkompetitif secara bersamaan. Sehingga secara keseluruhan efek alokasi di setiap Kabupaten/Kota di SWP 7 menunjukkan nilai yang negatif, yang artinya kurang meratanya distribusi pendapatan atau kesempatan kerja di antara sektor ekonomi dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing sektor.

Jika kita deskripsikan Kabupaten dengan sektor-sektor yang memiliki keunggulan baik kompetitif dan spesialisasi untuk sektor pertanian yakni Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Kabupaten yang berspesialisasi dan kompetitif di sektor pertambangan dan penggalian yakni hanya Kabupaten Jember. Untuk sektor industri pengolahan tidak terdapat Kabupaten yang memiliki keunggulan kedua-duanya. Untuk sektor bangunan Kabupaten yang beada di SWP 7 tidak ada yang memiliki keunggulan kedua-duanya. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran Kabupaten yang beada di SWP 7 tidak ada yang memiliki keunggulan kedua-duanya. Untuk sektor pengangkutan dan komunikasi Kabupaten yang beada di SWP 7 tidak ada yang memiliki keunggulan kedua-duanya. Untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Kabupaten yang beada di SWP 7 tidak ada yang memiliki keunggulan kedua-duanya. Untuk sektor jasa-jasa yakni hanya Kabupaten Jember.

Tabel 4.112 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 7 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kab. Jember	Spes	S	S	NS	NS	NS	NS	NS	NS	S
	Comp	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CD	CA	CA
2. Kab. Bondowoso	Spes	S	NS							
	Comp	CA	CD	CA	CA	CA	CD	CD	CD	CA
3. Kab. Situbondo	Spes	S	NS	NS	NS	NS	S	NS	NS	NS
	Comp	CA	CD	CA	CD	CD	CD	CD	CD	CA

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur (diolah)

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

S : Specialized.

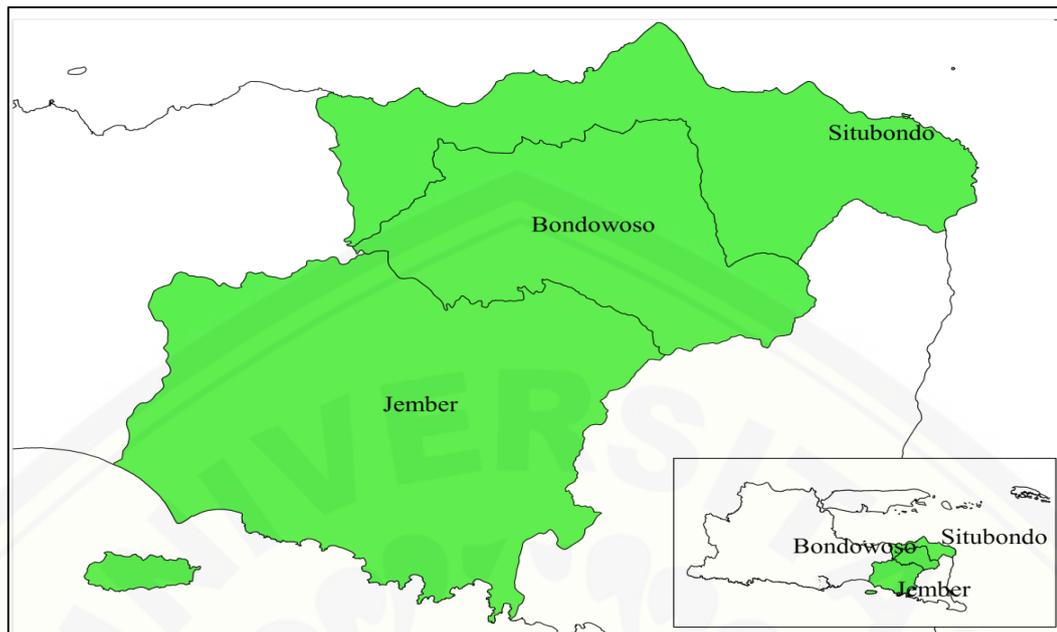
NS : Not Specialized.

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen menerangkan bahwa Kabupaten/Kota di satuan wilayah pengembangan 7 merupakan daerah yang bertipologi daerah relatife tertinggal yang diatanranya adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Daerah-daerah tersebut yang menurut hasil tipologi klassen menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita daerah lebih rendah daripada pertumbuhan dan PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur berdasar rerata pada tahun analisis.

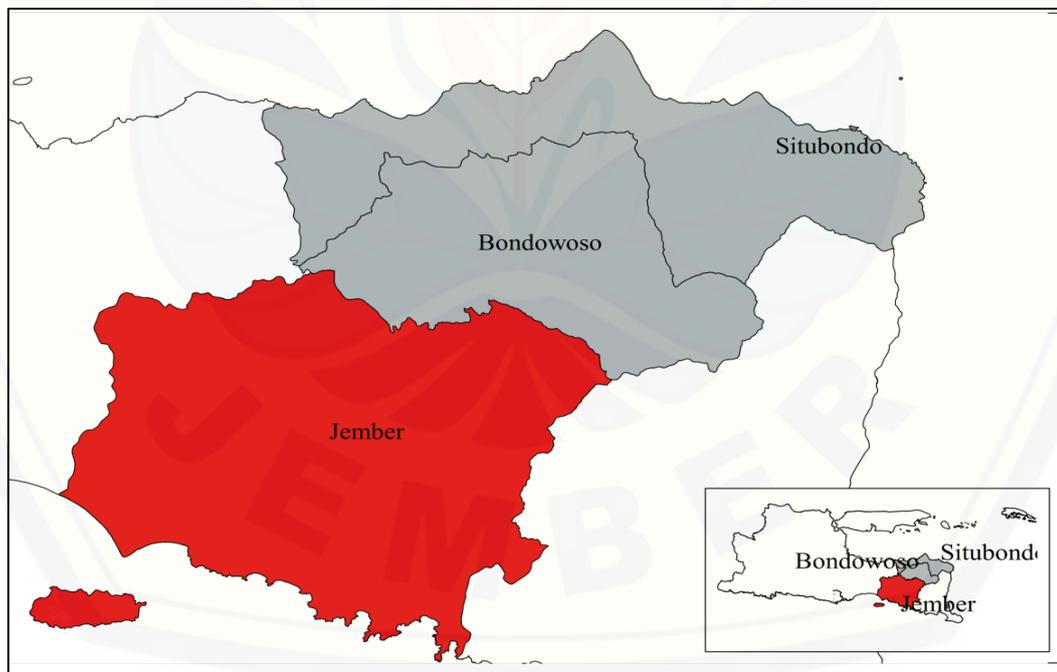
Khususnya Kabupaten di Kabupaten Jember, selama tahun analisis menerangkan bahwa rerata pertumbuhan ekonomi maupun PDRB perkapita daerah jember lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013 pendapatan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menerangkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 6,90 persen, yaitu dari 13,25 trilliun rupiah di tahun 2012 meningkat menjadi 14,16 trilliun rupiah pada tahun 2013. Kemudian besarnya PDRB perkapita tahun 2013 menurut harga konstan menjadi Rp. 5.948.560 dengan pertumbuhan sebesar 6,28 persen dibanding tahun 2012 dengan PDRB perkapita sebesar Rp. 5.597.080. namun walaupun demikian, pertumbuhan dan pendapatan perkapita Kabupaten Jember masih belum mengejar pencapaian pertumbuhan Provinsi Jawa Timur.

Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Berkembang
Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal
	1. Kabupaten Jember 2. Kabupaten Bondowoso 3. Kabupaten Situbondo

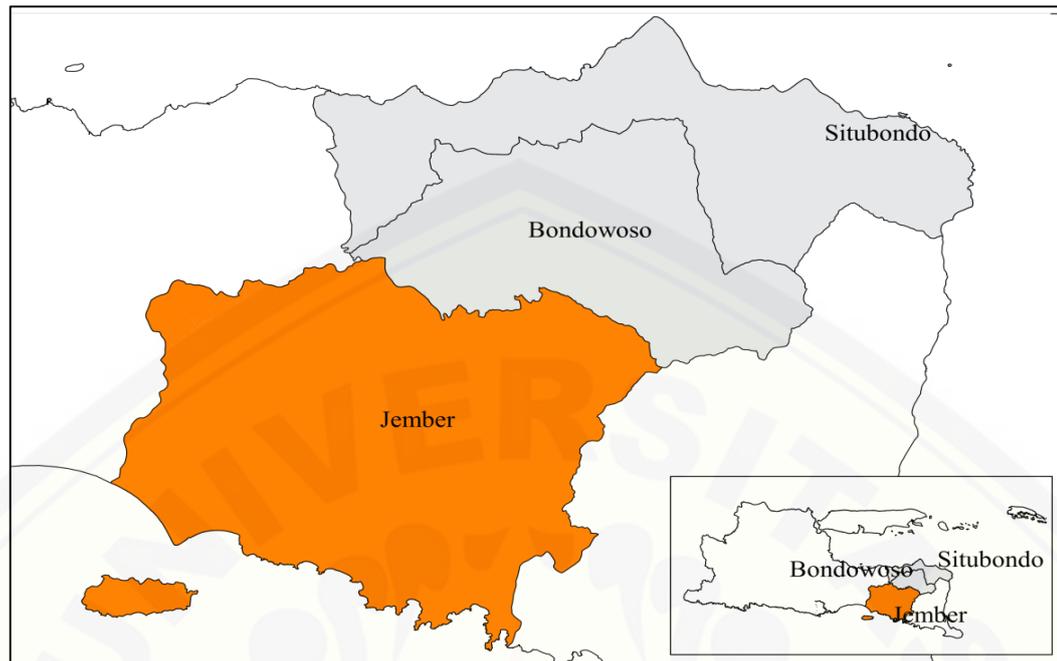
Gambar 4.174 Tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7



Gambar 4.38 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Yang Mempunyai Basis Ekonomi di Sektor Pertanian



Gambar 4.39 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Yang Mempunyai Basis Ekonomi di Sektor Pertambangan dan Penggalian



Gambar 4.40 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 7 Yang Mempunyai Basis Ekonomi di Sektor Jasa-jasa

4.2.8 Hasil Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Jawa Timur

4.2.8.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ dari Tahun 2009-2013 untuk Kabupaten/Kota di wilayah Pengembangan 8 Jawa Timur dapat diketahui pada Tabel sebagai berikut:

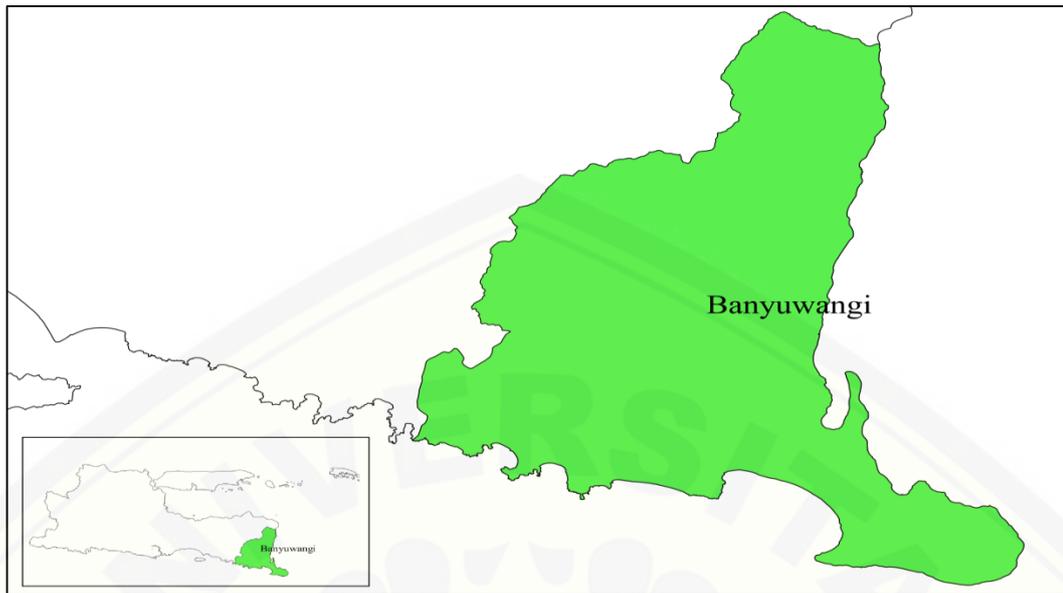
Tabel 4.113 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Provinsi Jawa Timur

Lapangan Usaha	Kabupaten Banyuwangi	
1. Pertanian	3.21	+
2. Pertambangan dan Penggalian	2.00	+
3. Industri Pengolahan	0.25	-
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0.34	-
5. Bangunan	0.27	-
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0.83	-
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0.58	-
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.07	+
9. Jasa-jasa	0.61	-

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2009-2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.113 menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 sektor basis, yaitu pertanian dengan indeks rata-rata 3.21; pertambangan dan penggalian 2.00; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan rata-rata nilai LQ sebesar 1.07 selama tahun analisis.

Hal ini menunjukkan sektor tersebut merupakan sektor basis yang menggambarkan bahwa sektor tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di SWP 8. Atas dasar pemahaman di atas, sektor ini merupakan sektor yang potensial dimana sektor ini dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Sektor yang merupakan sektor non basis untuk Kabupaten Banyuwangi yaitu sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; dan jasa-jasa.



Keterangan :

sektor pertanian sebagai sektor unggulan

Gambar 4.41 Sektor-sektor Ekonomi Basis Kabupaten di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Jawa Timur

4.2.8.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Tabel 4.114 Perhitungan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kab. Banyuwangi

		Rata-rata RPr Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Jawa Timur		0.29	0.81	0.8	0.82	1.26	1.40	1.57	1.14	0.74

No.	SWP 8	Rata-rata RPs Tiap Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kab.Banyuwangi	2.15	1.57	1.08	0.81	1.20	1.08	0.62	0.83	1.25

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel 4.179 diatas menunjukkan bahwa sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran merupakan kegiatan yang dominan pertumbuhan yang artinya kegiatan tersebut pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Banyuwangi mempunyai pertumbuhan menonjol. Sedangkan kegiatan yang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; dan jasa-jasa, yang mana kegiatan ini diharapkan akan potensial peranannya dalam memberikan kontribusi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

Sedangkan untuk sektor-sektor seperti pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pertumbuhannya rendah di Kabupaten Banyuwangi, sebaliknya tinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur yang artinya kegiatan sektoral tersebut kurang potensial untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi tersebut. sedangkan untuk sektor listrik, gas dan air bersih baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten Banyuwangi, sama-sama tidak memiliki pertumbuhan yang positif.

4.2.8.3 Analisis overlay

Kriteria kontribusi (LQ) atas Kabupaten/Kota di SWP 8, deskripsi struktur ekonomi wilayah studi dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.115 Analisis Overlay Kabupaten/Kota di SWP 8 Jawa Timur

Lapangan Usaha	Kabupaten Banyuwangi			
	LQ	n	RP _s	n
1. Pertanian	3.21	+	2.15	+
2. Pertambangan dan Penggalian	2.00	+	1.57	+
3. Industri Pengolahan	0.25	-	1.08	+
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0.34	-	0.81	-
5. Bangunan	0.27	-	1.20	+
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.83	-	1.08	+
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0.58	-	0.62	-
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.07	+	0.83	-
9. Jasa-jasa	0.61	-	1.25	+

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.180 diatas, dapat diketahui bahwa sektor yang dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya di Kabupaten Banyuwangi adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian. Dilihat dari sektor yang dapat dipacu menjadi kegiatan yang dominan di Kabupaten Banyuwangi adalah sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Bila dilihat sektor yang mengalami penurunan yakni sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Bila dilihat dari sektor yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun kontribusinya adalah listrik, gas, dan air bersih; pengangkutan dan komunikasi.

4.2.8.4 Analisis *Shift-Share* dengan Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif

4.2.8.4.1 Sektor Pertanian

Tabel 4.116 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertanian di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	93308.268	3,649,637.68	0.026

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa di Kabupaten Banyuwangi, sektor pertanian merupakan sektor yang spesialisasi dan kompetitif.

4.2.8.4.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian

Tabel 4.117 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pertambangan dan Penggalian di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	3311.749	249,397.51	0.012

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Banyuwangi merupakan sektor yang memiliki keunggulan spesialisasi dan kompetitif.

4.2.8.4.3 Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.118 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Industri Pengolahan di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	-12504.316	-2,170,099.65	0.006

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, diketahui bahwa untuk Sektor industri pengolahan di Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki keunggulan spesialisasi, namun sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif.

4.2.8.4.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Tabel 4.119 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	1163.113	-102,483.84	-0.013

Sumber: hasil analisis

Dari hasil analisis *Shift-Share*, dapat diketahui bahwa sektor listrik, gas dan air bersih tidak memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif di Kabupaten Banyuwangi.

4.2.8.4.5 Sektor Bangunan

Tabel 4.120 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Bangunan di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	-4013.729	-271,725.48	0.015

Sumber: hasil analisis

Selanjutnya pada sektor bangunan, diketahui bahwa sektor tersebut tidak spesialisasi di Kabupaten Banyuwangi, namun sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten tersebut.

4.2.8.4.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Tabel 4.121 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	-5319.623	-646,020.99	0.007

Sumber: hasil analisis

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak memiliki keunggulan spesialisasi namun kompetitif di Kabupaten Banyuwangi.

4.2.8.4.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Tabel 4.121 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	13598.331	-352,215.38	-0.040

Sumber: hasil analisis

Dari Tabel 4.121 diatas dapat diketahui bahwa tidak terdapat keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif untuk sektor pengangkutan dan komunikasi di Kabupaten Banyuwangi.

4.2.8.4.8 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Tabel 4.122 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	-696.332	47,056.46	-0.013

Sumber: hasil analisis

Kabupaten Banyuwangi untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan hanya memiliki keunggulan spesialisasi namun tidak kompetitif untuk sektor tersebut.

4.2.8.4.9 Sektor Jasa-jasa

Tabel 4.123 Hasil Analisis *Shift-Share* untuk Sektor Jasa-jasa di SWP 8

No	Kabupaten/Kota	Efek Alokasi	Spesialisasi	Kompetitif
1	Kabupaten Banyuwangi	-4869.951	-403,546.30	0.012

Sumber: hasil analisis

Untuk Sektor jasa-jasa diketahui bahwa Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki keunggulan spesialisasi untuk sektor jasa-jasa, namun sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Banyuwangi.

4.2.8.5 Analisis Tipologi Klassen Di Satuan Wilayah Pengembangan 8

Metode *Klassen Tipology* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di SWP 8 Jawa Timur. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah.

Hasil analisis Tipologi untuk Kabupaten Banyuwangi terlihat bahwa Kabupaten tersebut masuk dalam kuadran 2 yaitu daerah yang berkembang cepat (*high growth but low income*) atau juga disebut sebagai daerah maju tetapi tertekan (*retarded region*), merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tetapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan dan pendapatan perkapita Provinsi. Seperti yang terlihat pada Tabel dibawahh, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rata-rata Kabupaten Banyuwangi sebesar 6.66% dan Rp. 7.592.713.50 yang mana pertumbuhan ekonominya lebih tinggi namun untuk pendapatan perkapitanya lebih rendah

dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.124 sebagai berikut:

Tabel 4.124 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota Di SWP 8 Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No	SWP 8	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan Ekonomi	Kuadran
1	Kabupaten Banyuwangi	7.592.713.50	6.66	2
	Jawa Timur	9.733.686.88	6.54	

Sumber: hasil analisis

4.2.8.6 Pembahasan Kabupaten/Kota di SWP 8 Provinsi Jawa Timur

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola bersama sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan atas dasar pemilihan sektor-sektor ekonomi daerah yang bersangkutan. Analisis potensi setiap sektor berguna untuk mengetahui keunggulan komparatif dan kompetitif suatu sektor. Setelah diketahui potensi masing-masing sektor, yaitu kekuatan dan kelemahan maka dapat ditentukan sektor mana yang patut menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan.

Kemudian sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011-2031 yang di setiap satuan wilayah pengembangan dibentuk dan dikembangkan yang salah satunya berdasarkan potensi dan fungsi ekonominya. Yang mana setiap SWP memiliki fungsi-fungsi ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengetahui lebih jauh terhadap kesesuaian fungsi-fungsi ekonomi disetiap satuan wilayah pengembangan maka akan dilakukan perbandingan berdasarkan hasil penelitian dengan fungsi wilayah yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Sehingga dengan dilakukannya perbandingan tersebut diharapkan akan diketahui sektor-sektor basis pendukung utama perekonomian didaerah tersebut.

Yang menurut (Tarigan, 2005:79) bahwasannya terkait dengan kewajibannya (pemerintah daerah) di satu sisi menentukan sektor-sektor rill yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis data LQ dan MRP menunjukkan Kabupaten/Kota di SWP 8 memiliki beberapa sektor basis/prioritas dilihat dari kriteria kontribusi dan laju pertumbuhannya adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian merupakan sektor basis maupun prioritas yang dominan yang memiliki dominasi dalam menyumbang besaran PDRB di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 8 baik dari kriteria kontribusi dan kriteria laju pertumbuhannya. Sektor pertanian merupakan sektor basis ataupun unggulan di kabupaten Banyuwangi dengan kontribusi yang paling besar dan mendominasi 3 (tiga) tahun terakhir terhadap PDRB kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan potensi pertanian di kabupaten Banyuwangi yang cukup menjanjikan. Banyuwangi memiliki kompetensi untuk meningkatkan subsektor pertanian tersebut karena dengan luas wilayah yaitu 578.250 Ha serta hampir 25 % merupakan persawahan dan perkebunan dari total luas wilayahnya. Sektor perikanan masuk dalam kategori pertanian dalam PDRB, Banyuwangi memiliki pelabuhan ikan terbesar Indonesia kedua setelah kawasan minapolitan yang berarti bahwa kawasan yang memiliki produksi perikanan dan pengelolaan ikan. Sehingga nantinya sektor pertanian perlu diperkuat dari hulu hingga hilir tidak hanya menghasilkan produk pertanian tetapi sampai produk olahan yang lebih memiliki nilai ekonomis.

Tabel 4.125 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 7		Sektor ke																			
		1				2				3				4				5			
		Fungsi Wilayah SWP 8				Fungsi Wilayah SWP 8				Fungsi Wilayah SWP 8											
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kab.Banyuwangi	3.21	+	2.15	+	2.00	+	1.57	+	0.25	-	1.08	+	0.34	-	0.81	-	0.27	-	1.20	+

Lanjutan Tabel 4.125 Sektor Prioritas Ekonomi Basis Kabupaten/Kota Di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Berdasarkan Kontribusi dan Pertumbuhan

SWP 7		Sektor ke															
		6				7				8				9			
		Fungsi Wilayah SWP 8				Fungsi Wilayah SWP 8								Fungsi Wilayah SWP 8			
		LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n	LQ	n	RP	n
1	Kab.Banyuwangi	0.83	-	1.08	+	0.58	-	0.62	-	1.07	+	0.83	-	0.61	-	1.25	+

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share* yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah tentang sektor-sektor mana yang mempunyai daya saing kompetitif dan spesialisasi Kabupaten/Kota adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor Kabupaten/Kota berspesialisasi maupun berkompetitif secara bersamaan. Sehingga secara keseluruhan efek alokasi di Kabupaten menunjukkan nilai yang negatif, yang artinya kurang meratanya distribusi pendapatan atau kesempatan kerja di antara sektor ekonomi dengan keunggulan yang dimiliki masing-masing sektor. Sehingga keseluruhan terlihat bahwa tidak semua sektor di Kabupaten Banyuwangi memiliki keunggulan baik kompetitif dan spesialisasi. Jika kita deskripsikan sektor-sektor yang memiliki keunggulan baik spesialisasi maupun kompetitif adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 4.126 Hasil analisis *Shift-Share* Tentang Keunggulan Spesialisasi dan Kompetitif persektor Kabupaten/Kota di SWP 8 Jawa Timur

Kabupaten/Kota		Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Kabupaten Banyuwangi	Spes	S	S	NS	NS	NS	S	NS	S	NS
	Comp	CA	CA	CA	CD	CA	CA	CD	CD	CA

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur (diolah)

Keterangan:

CA : Competitive Advantage.

CD : Competitive Disadvantage.

S : Specialized.

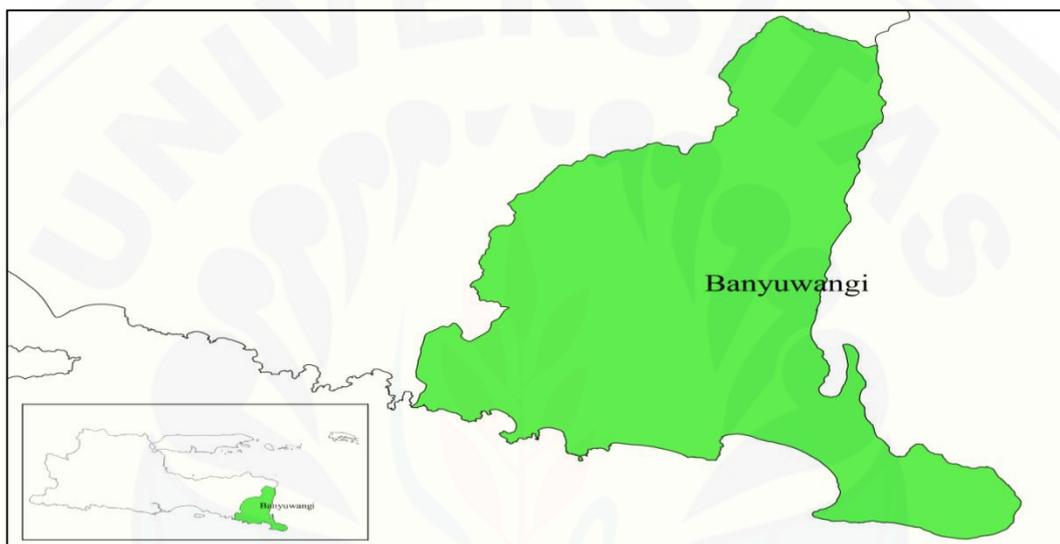
NS : Not Specialized.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang bertipologi daerah berkembang, artinya daerah banyuwangi tersebut merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Jawa Timur namun memiliki nilai PDRB perkapita yang lebih rendah dari Jawa Timur. Jika kita lihat PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banyuwangi selama kurun lima tahun menunjukkan trend yang meningkat, yakni pada tahun 2009 total PDRB sebesar Rp.10.380.354,51 juta rupiah meningkat

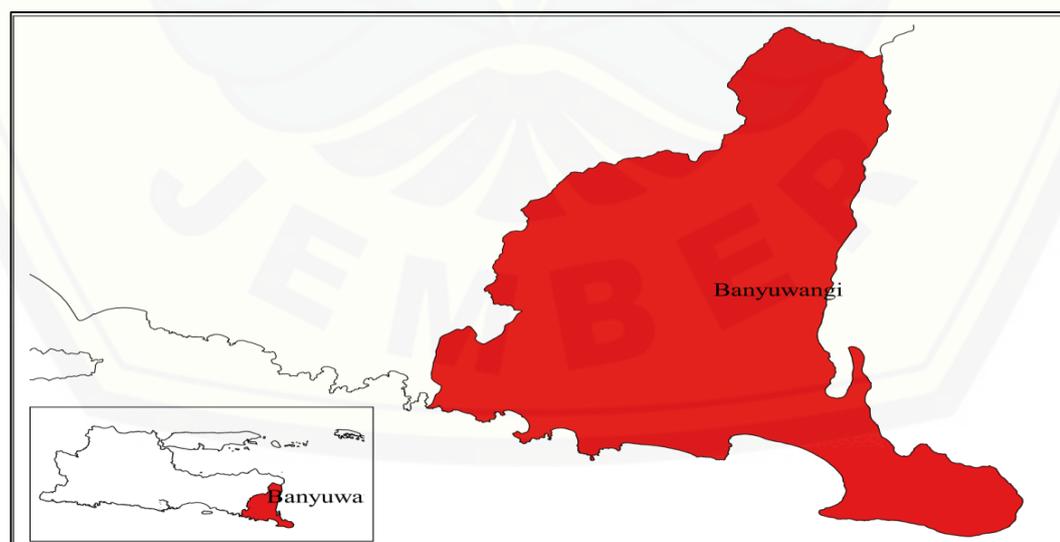
Rp.13.511.707,90 juta rupiah pada tahun 2013, dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, tahun 2009 sebesar 5.89% meningkat 6.76% tahun 2013.

Klasifikasi I Daerah Cepat Maju & Tumbuh	Klasifikasi II Daerah Berkembang
	Kabupaten Banyuwangi
Klasifikasi III Daerah Maju Tapi Tertekan	Klasifikasi IV Daerah Relatif Tertinggal

Gambar 4.192 Tipologi Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 8



Gambar 4.42 Kabupaten di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Yang Mempunyai Ekonomi Basis di Sektor Pertanian



Gambar 4.43 Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan 8 Dengan Basis Ekonomi di Sektor Pertambangan dan Penggalian

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sektor-sektor Kabupaten/Kota di setiap Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur pada BAB IV sebelumnya, maka dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

- a) Berdasarkan hasil analisis *Location Quotien* (LQ) dan Metode Rasio Pertumbuhan (MRP) yang telah di *overlay*, sektor yang merupakan sektor basis yang menjadi prioritas menurut kriteria kontribusi dan pertumbuhan sektor-sektor Kabupaten/Kota di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 1 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa. Di SWP 2 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor jasa-jasa. Di SWP 3 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa. Di SWP 4 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa. Di SWP 5 adalah sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa. Di SWP 6 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa. Di SWP 7 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa. Di SWP 8 adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian.
- b) Berdasarkan hasil analisis *Shift-Share* diketahui bahwa sektor-sektor yang memiliki keunggulan spesialisasi dan kompetitif Kabupaten/Kota di setiap Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 1 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan, sektor

jasa-jasa. Di SWP 2 adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor jasa-jasa. Di SWP 3 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa. Di SWP 4 adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa. Di SWP 5 adalah sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa. Di SWP 6 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa. Di SWP 7 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa. Di SWP 8 adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran.

- c) Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi *Klassen* diketahui bahwa Tipologi Kabupaten/Kota di SWP 1 terdiri dari empat yakni kuadran 1 cepat maju dan tumbuh terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, kuadran 2 terdiri dari Kabupaten Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, kuadran 3 terdiri dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, kuadran 4 terdiri dari Kabupaten Jombang, Pasuruan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Kota Pasuruan. Tipologi Kabupaten/Kota di SWP 2 terdiri dari dua yakni kuadran 1 daerah cepat maju dan cepat tumbuh terdiri dari Kota Malang, di kuadran 2 daerah berkembang cepat terdiri dari Kabupaten Malang dan Kota Batu. Tipologi Kabupaten/Kota di SWP 3 terdiri dari 2 yakni kuadran 1 daerah cepat maju dan cepat tumbuh terdiri dari Kota Madiun, kuadran 4 yakni daerah relative tertinggal terdiri dari Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi. Tipologi Kabupaten/Kota di SWP 4 terdiri dari 3 yakni di kuadran 1 daerah cepat maju dan cepat tumbuh terdiri Kota Kediri, kuadran ke 2 daerah berkembang terdapat Kabupaten Tulungagung, kuadran 4 daerah relatif tertinggal terdapat Kabupaten Trenggalek, Kediri, Nganjuk.

Tipologi Kabupaten/Kota di SWP 5 terdiri dari 2 yakni kuadran 3 daerah maju tapi tertekan terdapat Kota Probolinggo, kuadran 4 daerah relatif tertinggal terdiri dari Kabupaten Probolinggo dan Lumajang. Selanjutnya untuk Tipologi Kabupaten/Kota di SWP 6 maupun SWP 7 terdiri dari 1 yakni kuadran 4 daerah relatif tertinggal sehingga Kabupaten/Kota yang terdapat didalamnya merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan dan perkapita Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya khusus di SWP 8 yang hanya terdiri dari satu Kabupaten maka tipologi yang dimilikinya juga terdapat satu sehingga berdasarkan analisis Kabupaten di SWP 8 termasuk kuadran 2 yakni daerah yang berkembang, artinya Kabupaten di SWP 8 memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Jawa Timur namun nilai PDRB perkapita yang lebih rendah.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diajukan penulis antara lain:

- a) Untuk mempertahankan dan mengembangkan pembangunan daerah di setiap satuan wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur pemerintah hendaknya lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendukung. Sehingga akan lebih mengoptimalkan produktifitas dari sektor-sektor basis yang ada, agar dapat memacu peningkatan produktifitas agar mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Dan hendaknya secara konsisten dan berkesinambungan dalam menentukan prioritas pembangunan secara sektoral dalam indikator basis dan non basis untuk menentukan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.
- b) Untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi non prioritas agar bisa bersaing dengan sektor-sektor ekonomi yang sama diluar daerah dan menciptakan perkembangan sektor-sektor perekonomian yang seimbang, maka pemerintah harus lebih mempercepat kerjasama yang baik dengan

pihak swasta untuk bersama-sama menggali sumber-sumber ekonomi di Kabupaten/Kota di setiap wilayah pengembangan.

- c) Perlu mengenal lebih baik daerah-daerah khususnya daerah yang berada pada kuadran daerah tertinggal yang mempunyai potensi ekonomi spesialisasi dan potensi ekonomi rendah, agar bijak dalam menentukan skala prioritas pembangunan, sehingga sektor-sektor tersebut dapat menunjang pembangunan dan dapat merubah posisi pada tipologi daerah yang lebih baik atau meminimalisis keberadaan Kabupaten/Kota pada tipologi daerah tertinggal. Seperti halnya di satuan wilayah pengembangan 6 dan 7, yang secara keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah tersebut berada pada kuadran atau klasifikasi ke 4 atau tipologi daerah tertinggal. Diharapkan dengan sesuainya kebijakan pemerintah pusat dengan Kabupaten/Kota di masing-masing satuan wilayah pengembangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Adisasmita, H. R. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arifin Zainal. 2010. *Analisis Perbandingan Perekonomian Pada Empat Koridor di Provinsi Jawa Timur*. *Humanity*, Vol.5, No.2, 2010:161-167
- Arsyad L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Blakely E, J & Bradshaw, TK, 2002, *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*. Sage Publications, California.
- Chaniago Andrinof A. 2012. *Gagalnya Pembangunan “membaca ulang keruntuhan orde baru*. Jakarta: LP3ES
- Erika Rita dan Sri Umi M.W. 2013. *Analisis Sektor-sektor Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Kediri*. *JESP*, Vol.5 (1), Hal.65-78.
- Ghozali Bakhtiar, Y. 2014. *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2007-2011*. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya.
- Herath Janaranjana and Gebremedhin Tesfa G. Maumbe Blessing M. 2011. *A Dynamic Share Analysis of Economic Growth in West Virginia*. *Journal of Rural and Community Development*. Vol 6 (2), Pages: 155-169.
- Herzog Henry W,Jr and Olsen Richard, J. 1977. *Shift-Share Analysis Revisited: The Allocation Effect and The Stability of Regional Structure*. OAK Ridge National Laboratory. Tennessee.
- Huda Miftakhul dan Santoro Budi E. 2014. *Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Potensi Daerahnya*. *Jurnal Teknik POMITS*. Vol.3 (2), ISSN: 2337-3539. Hal.81-86.
- Hoover E.M. 1971. *An Introduction to Rergional Economics*. (1 st ed.). New York: Alfred A.Knopf, Inc.

- Howard Dick dan James J.Fox serta Jamie Mackie. 1997. *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Alih bahasa, Bambang Sumantri. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hoppes R. Bradley. 1997. *Shift-Share Analysis for Regional Health Care Policy. The Journal of Regional Analysis and Policy*. Southwes Missouri State University. P.35-45.
- Irma Adelman and Erinc Yeldan. 2000. *Is This The End Of Economic Development? Structural Change and Economic Dynamics* 11. P.95-109. Elsevier. (Diakses 21 Desember 2014).
- Januardy A.J. dan Hidayat. 2013. *Analisis Struktur Perekonomian Di Kota Manado. Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vo.1 (3), Hal: 930-938.
- Januar J. MT. 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah. Teori, Konsep dan Implementasi*. Jember.
- Kuncoro Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah, Bagaimanan Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan?.* Jakarta : Salemba Empat.
- Kurniawan Basuki P. dan Mardhono. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Peran Karakteristik Regional di Jawa Timur: periode 2000-2009. JESP*. Vol.5 (1), Hal.21-30.
- Mangun Nudiatulhuda. 2007. *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis S-2 Jurusan Magister IESP Program Pascasarjana .Universitas Diponegoro Semarang.
- Mankiw Gregory. 2006. *Makroekonomi*. Edisi ke enam. Jakarta: Erlangga
- Mondal W.I. 2009. *An Analysis Of The Industrial Development Potential Of Malaysia: A Shift-Share Approach. Journal of Business & Economics Research*. Vol.7 (5), p.41-46
- Husna, N dan Noor I serta Rozikin M. 2011. *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik. Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1 (1), Hal:188-196.
- Nazara Suahasil. 2010. *Pemerataan Antardaerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan*.

- Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar FEUI 10 Maret 2010. UI Depok.
- Nazara S and Hewings Geoffrey J.D. 2003. *Towards Regional Growth Decomposition With Neighbor's Effect: A New Perspective On Shift-Share Analysis*. University of Illinois at Urbana-Champaign. <http://www.real.illinois.edu/d-paper/03/03-t-21.pdf> (16 Desember 2014)
- Nugroho SBM. 2004. *Model Ekonomi Basis Untuk Perencanaan pembangunan Daerah, Jurnal, Dinamika Pembangunan*, Vol.1 (1), Hal: 23-29.
- Oktavilia Shanty. 2011. *Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal sebagai Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Prosiding Seminar Nasional penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN 2089-3590. Vol.2 (1) hal:219-228.
- Panjiputri Agata F. 2013. *Analisis Potensi Pengembangan Pusat pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Strategis Tangkallangka. Economics Development Analysis Journal* 2 (3) ISSN 2252-6889. hal.1-13.
- Prijambodo Bambang. 1995. *Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijakannya*. Publikasi FE-UI No.004.
- Prishardoyo, Bambang. 2008. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. JEJAK*, Vol.1(1), Hal:1-9
- Rahardja Prahatma dan Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia. Jakarta: Mandala.
- Ratnasari, E. D. 2014. *Sektors Analysis And Determination Of GDP Forming Leading Sektor In District Kebumen. Jurnal Fokus Bisnis*, Vol.13 (1).
- Romer Paul M. 1994. *The Origins of Endogenous Growth. Journal of Economic Perspectives*. Vol.8 (1), Pages.3-22
- Roosmawarni Anita dan Soekarnoto. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktural Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. No.3, Hal.35-47.

- Rustiadi, E, Saefulhakim S. dan Panuju D.R. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso Eko B. dan Aulia Belinda U. dkk. 2012. *Analisis Keterkaitan Wilayah secara Sektoral Kawasan GKS Plus terhadap Jawa Timur*. Seminar Nasional CITIES. Hal.1-15.
- Selting Anne C and Loveridge Scott. 1990. *Testing Dynamic Shift-Share*. <http://jrap-journal.org/pastvolumes/1990/v24/24-1-2.pdf> (16-12-2014).
- Soeparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
- Stimson Robert J, and Stough Roger R, as well Roberts Brian H. 2006. *Regional Economic Development Analysis and Planning Strategy*. Secon Edition. Springer Berlin Heidelberg New York.
- Subandi. 2011. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Sudarti. 2009. *Penentuan Leading Sektor Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. *Jurnal Humanity*, Vol. V (1), Hal: 68-79.
- Sukirno Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunoto dan Syafriandi. 2010. *Analisis Sektor Unggulan Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu*. *Majalah Ilmiah Interest*. Vol.IX (2), Hal: 82-91.
- Tambunan Mangara. 2010. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tambunan Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan Robinson. 2005. *Ekonomi Regional*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro Michael P. dan Stephen Smith C. 2008. *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sembilan*. Jakarta: Erlangga

- Titisari, K.H. 2009. *Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah Boyolali, Karanganyar, dan Sragen. dalam Jejak Vol II (2)*, Hal: 167-182.
- Tjokroamidjojo, 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Masagung.
- Widjaja H.A.W. 2011. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo Rudi dan Januar Jani. 2005. *Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jember.
- Yusuf M. 1999. *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol. XLVII (2)*, Hal: 105-233.
- Yustika Ahmad Erani. 2013. *Ekonomi Kelembagaan, Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Malang: PT. Gelora Aksara Pratama.
- _____. 2005. *Perekonomian Indonesia. Deskripsi, preskripsi dan kebijakan*. Malang: Bayumedia.
- Wahyuningtyas Rosita dan Rusgiyono A. dan Wilandari Y. 2013. *Analisis Sektor Unggulan menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010. Jurnal Gaussian, Vol.2 (3)*, Hal: 219-228.